



**PERATURAN DAERAH  
PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**NOMOR 6 TAHUN 2002**

**TENTANG**

**RENCANA STRATEGIS PEMBANGUNAN DAERAH  
PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN 2002 – 2004**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang : a. bahwa Rencana Strategis Pembangunan Daerah (RENSTRADA) merupakan penjabaran lebih lanjut dari Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) yang menjadi acuan pengelolaan pembangunan selama tiga tahun kedepan bagi seluruh lembaga/instansi Pemerintah Daerah, Legislatif dan segenap komponen masyarakat yang antara lain memuat Nilai Capaian Indikator Kegiatan, Program dan Kebijakan.
- b. bahwa Rencana Strategis Pembangunan Daerah (RENSTRADA) adalah dokumen perencanaan taktis strategis pembangunan daerah sebagai dasar pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas Kepala Daerah yang dimuat di dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) selama tiga tahun;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur tentang Rencana Strategis Pembangunan Daerah (RENSTRADA) Propinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2002 – 2004;

- Mengingat : 1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara;
2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);
3. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 206);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Dekonsentrasi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4095);
11. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
12. Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2000 tentang Pengundangan Peraturan Daerah dan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 264 Seri D Nomor 264);
13. Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Propinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 347 Seri D Nomor 347);
14. Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 10 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 349 Seri D Nomor 349);
15. Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 353 Seri D Nomor 353);
16. Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2001 – 2004 (Lembaran Daerah tahun 2001 Nomor 181, Seri D Nomor 179);
17. Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2001 tentang Program Pembangunan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2001 – 2004 Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 182, Seri D Nomor 180);

## **Dengan persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR,**

### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TENTANG RENCANA STRATEGIS PEMBANGUNAN DAERAH  
PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2002 – 2004**

#### **Pasal 1**

Rencana Strategis Pembangunan Daerah (RENSTRADA) Propinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2002 – 2004 adalah penjabaran lebih lanjut dari Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) dan merupakan perencanaan taktis strategis untuk selanjutnya dijadikan landasan dan pedoman bagi seluruh lembaga/instansi Pemerintah Daerah, Legislatif dan segenap komponen masyarakat yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Propinsi Nusa Tenggara Timur selama tiga tahun.

#### **Pasal 2**

Sistematika Rencana Strategis Pembangunan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2002 – 2004 sebagai berikut :

- BAB I Pendahuluan.**
- BAB II Lingkungan Strategis**
- BAB III Strategi Pembangunan Daerah dan Faktor Penentu Keberhasilan**
- BAB IV Program, Kegiatan dan Indikator Keberhasilan.**
- BAB V Pengukuran dan Evaluasi Kinerja**
- BAB VI Penutup**

#### **Pasal 3**

Rencana Strategis Pembangunan Daerah (RENSTRADA) Propinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2002 – 2004 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### **Pasal 4**

Pelaksanaan lebih lanjut Rencana Strategis Pembangunan Daerah (RENSTRADA) Tahun 2002–2004 dituangkan dalam Rencana Pembangunan Tahunan yang memuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

## Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur.

NOMOR 6  
Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 25 Januari 2002

RENCANA STRATEGIS  
PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR

TAMUH 2002

PIET ALEXANDER TALLO

Diundangkan di Kupang  
pada tanggal 25 Januari 2002

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI  
NUSA TENGGARA TIMUR,

TH. M. HERMANUS

LEMBARAN DAERAH PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN 2002 NOMOR 006 SERI B NOMOR 003

Sesuai dengan arahan dari Garis Besar Haluan Negara 1999-2004 pada Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1999 tentang Garis Besar Haluan Negara dan Rencana Strategis dalam Program Pembangunan Nasional Lima Tahun (PROSNA) yang memuat uraian rinci dan terukur yang diterangkan dalam Rencana Pembangunan bersama Dewan Perwakilan Rakyat, Program Pembangunan Dalam Tiga Tahun (PROPEDA) dirintis dalam Rencana Raya Negara (RRN) yang memuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang ditetapkan oleh Presiden bersama Dewan Perwakilan Rakyat.

Rencana Strategis Pembangunan Daerah (RENSTRADA) yang disusun sebagai dasar pertanggungjawaban Kepala Daerah atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) memuat antara lain Nilai Capaian Indikator Kegiatan, Nilai Capaian Indikator Program dan Nilai Capaian Indikator Kebijakan adalah dokumen perencanaan pembangunan selama empat tahun dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya.

## **PENJELASAN ATAS**

### **PERATURAN DAERAH PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**NOMOR 6 TAHUN 2002**

#### **TENTANG**

#### **RENCANA STRATEGIS PEMBANGUNAN DAERAH PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2002 - 2004**

##### **I. PENJELASAN UMUM**

###### **1. Dasar Pemikiran**

Sesuai dengan arahan dari Garis Besar Haluan Negara 1999-2004 pada kaidah pelaksanaan ditegaskan bahwa Garis-garis Besar Haluan Negara dalam pelaksanaannya dituangkan dalam Program Pembangunan Nasional lima tahun (PROPENAS) yang memuat uraian rinci dan terukur yang ditetapkan oleh Presiden bersama Dewan Perwakilan Rakyat. Program Pembangunan Nasional lima tahun (PROPENAS) dirinci dalam Rencana Tahun (REPETA) yang memuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan ditetapkan oleh Presiden bersama Dewan Perwakilan Rakyat.

Berdasarkan arahan Garis Besar Haluan Negara 1999 – 2004 maka pada tingkat Daerah Propinsi dilakukan perubahan yang disesuaikan dengan kondisi daerah. Perubahan-perubahan yang terjadi selanjutnya dirumuskan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah yang terdiri dari Pola Dasar (POLDAS) Pembangunan Daerah, Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) dan Rencana Strategis Pembangunan Daerah (RENSTRADA).

Rencana Strategis Pembangunan Daerah (RENSTRADA) yang disusun sebagai dasar pertanggungjawaban Kepala Daerah atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) memuat antara lain Nilai Capaian Indikator Kegiatan, Nilai Capaian Indikator Program dan Nilai Capaian Indikator Kebijakan adalah dokumen perencanaan pembangunan selama empat tahun dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya.

Mengacu pada GBHN 1999–2004, Program Pembangunan Nasional (PROPENAS), Pola Dasar (POLDAS) Pembangunan Daerah dan Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) maka disusunlah Rencana Strategis Pembangunan Daerah (RENSTRADA) dengan pendekatan yang komprehensif, kontekstual dan sejauh mungkin dilakukan pula secara kuantitatif atas seluruh bidang pembangunan. Fokus Renstrada diarahkan pada pengukuran dan penilaian pembangunan daerah atas pelaksanaan Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Disamping itu, Renstrada juga memuat prioritas-prioritas pembangunan daerah dalam rangka alokasi anggaran yang terdapat di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Propinsi NTT.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 S/D 5

Cukup Jelas

Lampiran : Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur  
Nomor : 6 Tahun 2002  
Tanggal : 25 Januari 2002

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. UMUM

Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah telah membawa beberapa implikasi politik, antara lain : 1. Mengubah secara mendasar praktik pemerintahan, di mana Pemerintah Pusat secara sangat substansial telah mengalihkan begitu banyak kewenangan kepada Pemerintah Daerah. 2. Tetap menyediakan Dana Perimbangan dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU) yang jumlahnya cukup signifikan bagi daerah-daerah dengan tingkat perekonomian yang relatif rendah. 3. Aparat pemerintahan dituntut untuk mewujudkan praktik pemerintahan yang memenuhi prinsip-prinsip Pemerintahan yang baik dan bersih (*Good Governance*) seperti: Partisipasi yang konstruktif, Penegakan hukum, Keterbukaan, Melayani, Berorientasi pada kesepakatan, pemerataan, efektif dan efisien, bertanggungjawab dan memiliki visi.

Bagi Propinsi NTT, kewenangan yang lebih besar tersebut akan dapat mendorong kemandirian Pemerintah Daerah untuk mengatur diri sendiri secara lebih baik dan mampu memanfaatkan secara optimal sumberdaya yang dimiliki bagi kemaslahatan warganya. Demikian pula peranan DAU dalam struktur penerimaan dan belanja daerah sangatlah dominan. Pada satu sisi kondisi semacam ini sangat membantu Pemerintah Propinsi untuk mengimplementasi berbagai program pembangunan bagi kepentingan masyarakat, pada sisi lain

daerah sangatlah dominan. Pada satu sisi kondisi semacam ini sangat membantu Pemerintah Propinsi untuk mengimplementasi berbagai program pembangunan bagi kepentingan masyarakat, pada sisi lain dominannya DAU tersebut menandakan ketergantungan fiskal yang sangat besar kepada Pemerintah Pusat. Kenyataan ini tentu saja kontradiktif dengan hakekat pemberian otonomi yang semakin besar kepada Pemerintah Daerah.

Disamping itu, untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih dalam praktik pemerintahan bukanlah hal yang mudah. Praktik pemerintahan yang cenderung *top down* dan sentralistik yang telah demikian lama diterapkan telah menjadikan birokrasi pemerintah menjadi resistens terhadap berbagai perubahan. Oleh karena itu, diperlukan kerja keras dengan strategi yang tepat untuk mewujudkan praktik pemerintahan yang memenuhi prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dan bersih sebagaimana dimaksud.

Dalam kaitannya dengan pelaksanaan otonomi daerah, Pemerintah Propinsi NTT berhadapan dengan situasi di mana imbas dari krisis ekonomi yang terjadi beberapa tahun lalu telah memerosotkan kinerja ekonomi daerah dan masyarakat secara signifikan. Pertumbuhan ekonomi nyaris stagnan sehingga tidak tercipta kesempatan kerja dan lapangan usaha baru secara berarti. Pada sisi lain angkatan kerja terus bertambah setiap tahun, sehingga pengangguran terbuka maupun tertutup terus meningkat. Kondisi semacam ini sangat rentan terhadap berbagai gejolak sosial yang dapat menimbulkan biaya sosial yang tinggi bagi pemerintah dan masyarakat.

an 2.000

Menyadari akan kondisi semacam ini, Pemerintah Propinsi telah bertekad untuk mengatasi berbagai persoalan dan kesulitan yang dihadapi masyarakat dengan memberi prioritas pada pengembangan ekonomi, pendidikan dan kesehatan rakyat yang diharapkan dapat menjadi pemicu bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di waktu mendatang.

Mengacu pada prioritas tersebut, maka telah disusun Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pola Dasar (Poldas) Pembangunan Daerah NTT yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan induk yang memuat pernyataan politis tentang visi, misi dan strategi pembangunan daerah, dan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2001 tentang Program Pembangunan Daerah (Propeda) yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan manajerial komprehensif dan memuat tentang rencana program dan kegiatan yang berkaitan dengan pendapatan dan belanja, baik yang bersumber dari APBN maupun APBD Propinsi, termasuk gambaran tentang kegiatan investasi swasta dan masyarakat.

Karena sifat dari kedua dokumen perencanaan pembangunan tersebut di atas masih umum, maka dipandang perlu menguraikan lebih lanjut dan rinci tentang program dan kegiatan-kegiatan pokok pembangunan daerah NTT yang dapat dibiayai dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Propinsi NTT dalam suatu dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat taktis – strategis atau yang disebut dengan Rencana Startegis Pembangunan Daerah (Renstrada) Daerah Propinsi NTT. Berkenaan dengan Renstradada sebagai Dokumen Perencanaan Taktis Strategis, maka kedudukan Renstrada dapat dipandang dari 2 (dua) aspek, yaitu : Pertama, aspek

struktural, artinya bahwa Renstrada sebagai bagian atau salah satu komponen dalam sistem perencanaan pembangunan harus dapat menjelaskan tentang Program dan Kegiatan-kegiatan pokok pembangunan yang dapat dibiayai APBD. *Kedua*, akuntabilitas, bahwa Renstrada harus dapat memberikan indikasi pengukuran terhadap kegiatan, program dan kebijakan pembangunan yang dibiayai oleh APBD berdasarkan pendekatan atau tolok ukur kinerja, yang terdiri dari : masukan (*Inputs*), Keluaran (*Outputs*), Hasil (*Outcomes*), Manfaat (*Benefits*) dan Dampak (*Impacts*).

Sebagai salah satu komponen atau bagian dari keseluruhan sistem perencanaan, maka Renstrada dimaksudkan untuk menyediakan informasi perencanaan pembangunan yang akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan program dan kegiatan tahunan daerah (Repetada) yang selanjutnya dijabarkan lebih lanut kedalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara periodik. Sebagai acuan LPJ Kepala Daerah, maka Renstrada hanya memuat program-program yang dapat dibiayai oleh APBD Propinsi yang telah disusun berdasarkan atau berpedoman pada pendekatan kinerja. Hal ini didasarkan pada (1). Pasal 8 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, yang menyebutkan bahwa APBD disusun dengan pendekatan kinerja. (2). Pasal 4 PP Nomor 108 tahun 2000 tentang Tatacara Pertanggungjawaban Kepala Daerah yang menyebutkan bahwa: a. Pertanggung jawaban Kepala Daerah dinilai berdasarkan tolok ukur Renstrada, b. Setiap daerah wajib menetapkan Renstrada dalam jangka waktu 1 bulan setelah Kepala

Daerah dilantik, c. Renstrada sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Terminologi penyusunan Renstrada sebagai salah satu komponen atau bagian dari keseluruhan sistem perencanaan pembangunan dapat dijelaskan bahwa Renstrada Daerah, berstatus sebagai : 1. Dokumen perencanaan untuk suatu jangka waktu tertentu dan memuat strategi serta daftar indikasi program dan kegiatan yang khusus dibiayai dari APBD. 2. Acuan LPJ Kepala Daerah sesuai PP 108 Tahun 2000 yang format LPJ sesuai yang terdiri dari :

- a. Laporan Perhitungan APBD;
- b. Nota Perhitungan APBD;
- c. Laporan Aliran Kas; dan
- d. Neraca Daerah.

Pasal 30 ayat 1 PP 108 Tahun 2000 yang mengatakan bahwa; bagi Kepala Daerah yang diangkat sebelum PP ini, penilaian pertanggungjawabannya didasarkan pada : a. Rencana Pembangunan Lima Tahunan Daerah apabila masa jabatannya kurang dari dua tahun. b. Renstrada apabila masa jabatannya lebih dari dua tahun. Namun demikian, hendaknya dipahami bahwa Renstrada tidak saja disusun untuk kepentingan LPJ Kepala Daerah. Tetapi Renstrada adalah salah satu bagian atau komponen dari keseluruhan sistem perencanaan pembangunan daerah.

Berdasarkan status Renstrada di atas, maka dapat ditemukan fungsi dan cakupan Renstrada Daerah sekaligus untuk membedakan Renstrada dengan Dokumen Perencanaan lain (Poldas dan Propeda), yaitu :

1. Menjabarkan program pembangunan sebagaimana telah dituangkan dalam Propeda ke dalam Rencana Program dan

Kegiatan Pembangunan untuk suatu periode waktu tertentu dengan menggunakan bahasa program yang bersifat lebih taktis strategis.

2. Menyediakan satu acuan resmi bagi seluruh jajaran pemerintah daerah dan DPRD dalam menentukan prioritas program dan kegiatan yang akan dibiayai dari APBD;
3. Menuntun seluruh jajaran aparatur Pemerintah untuk menyusun Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (Repetada).
4. Memberikan arah bagi Pemerintah dan DPRD Propinsi NTT dalam menyusun Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) secara terpadu, terarah dan terukur;
5. Menyediakan satu tolok ukur bagi pengukuran dan evaluasi kinerja Kepala Daerah yang akan dipertanggungjawabkan kepada DPRD Propinsi NTT yang terdiri dari :
  - a. Masukan yaitu suatu besaran dari sumber daya yang digunakan seperti : SDM, dana, material, teknologi, waktu, dll.
  - b. Keluaran yaitu wujud produk yang langsung diperoleh dari penggunaan masukan.
  - c. Hasil yaitu wujud pencapaian yang diperoleh dari bekerjanya suatu keluaran.
  - d. Manfaat yaitu tingkat pencapaian yang dapat dirasakan sebagai nilai tambah dari penggunaan atau bekerja keluaran da hasil.
  - e. Dampak yaitu kondisi makro yang diharapkan dapat dicapai dari berdasarkan keluaran, hasil dan manfaat yang telah diperoleh.

Bersamaan dengan itu, dalam rangka pelaksanaan Tap MPR RI No. XI/MPR/98 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas KKN, Presiden menerbitkan Inpres No. 7/1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (AKIP) yang didalamnya mewajibkan Gubernur, Bupati, Walikota dan Pimpinan Instansi Pemerintah untuk senantiasa mempertanggungjawabkan kewenangan yang dimiliki melalui penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) secara rutin. Penyusunan LAKIP tersebut didasarkan pada Rencana Startegis Pembangunan Daerah (Renstrada) yang disusun dan digunakan sebagai acuan baik oleh Pemerintah Daerah maupun Instansi Pemerintah.

Dari latar belakang singkat di atas, dapat disimpulkan bahwa berbagai perubahan yang terjadi selama lima tahun terakhir telah memaksa Pemerintah Daerah untuk melakukan revitalisasi dan reformasi dalam sistem perencanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah pada umumnya. Sejalan dengan praktik manajemen pemerintahan yang semakin berkembang, perencanaan strategis yang biasanya identik dengan korporasi swasta telah dimodifikasi sedemikian rupa sehingga dimungkinkan untuk diaplikasi dalam manajemen pemerintahan, mengingat lingkungan strategis Pemerintah Daerah telah mengalami perubahan yang sangat mendasar.

## B. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pembangunan Daerah merupakan rangkaian hubungan fungsional dan sinergis dari berbagai kegiatan bidang-bidang pembangunan yang memanfaatkan secara optimal potensi daerah dengan dukungan nasional dan internasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di daerah dan memperkokoh eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di dalam dokumen Propeda

Propinsi NTT 2001 – 2004, ditegaskan bahwa permasalahan pokok pembangunan di NTT adalah rendahnya kualitas sumberdaya manusia sebagai akumulasi dari sejumlah permasalahan pembangunan sebagai berikut :

1. Rendahnya Efisiensi dan Keefektifan Pengelolaan Sumberdaya Ekonomi.
2. Masih Tingginya Jumlah Penduduk Miskin
3. Rendahnya Tingkat Pendidikan Rakyat
4. Rendahnya Tingkat Kesehatan Rakyat
5. Rendahnya Partisipasi Masyarakat
6. Pelaksanaan Otonomi Daerah
7. Belum Meratanya Penyebaran Infrastruktur
8. Pengelolaan Lingkungan Yang Belum Optimal
9. Tata Ruang
10. Penyelesaian Pengungsi Timor Timur
11. Tantangan Globalisasi
12. Lemahnya Penegakkan Hukum dan HAM

## C. VISI, MISI DAN TUJUAN PEMBANGUNAN DAERAH

### C.1. V I S I

Di dalam Pola Dasar Pembangunan Propinsi NTT 2001 – 2004, dirumuskan Visi Pembangunan Daerah sebagai berikut: *Terwujudnya manusia dan masyarakat Nusa Tenggara Timur yang mandiri, maju dan sejahtera lahir dan bathin secara adil dan merata berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.*

Rumusan visi sebagaimana disebutkan di atas bersifat politis dan melingkupi rentang waktu yang tak terhingga, sehingga sulit dikukur tingkat pencapaiannya. Untuk mewujudkan makna atau hakekat mandiri, maju, sejahtera lahir dan bathin secara adil dan merata yang merupakan substansi pokok dari rumusan visi di atas, Pemerintah

Propinsi NTT memberi prioritas pada pembangunan ekonomi, pendidikan dan kesejahteraan rakyat. Untuk kepentingan perencanaan strategis, rumusan visi tersebut perlu dijabarkan sehingga bersifat indikatif dan dapat diukur tingkat pencapaiannya.

Dengan demikian, dalam rentang 2002 – 2004, pembangunan daerah diarahkan pada peningkatan kemampuan ekonomi, pendidikan dan kesehatan manusia dan masyarakat NTT sehingga secara mandiri mampu mewujudkan kemajuan, kesejahteraan lahir bathin bagi diri sendiri dan masyarakatnya.

## C.2. M I S I

Demi terwujudnya manusia dan masyarakat Nusa Tenggara Timur yang maju, mandiri dan sejahtera secara adil dan merata, maka misi pembangunan daerah adalah:

1. Meningkatkan pemahaman, penghayatan dan pengamalan terhadap nilai-nilai luhur Pancasila secara baik dan benar, terutama dalam menumbuhkembangkan prinsip saling menghormati antara berbagai komunitas yang berbeda, tegaknya supremasi hukum dan hak asasi manusia, berbudi pekerti luhur, berdisiplin tinggi dan berwawasan jender demi terwujudnya keamanan, ketertiban, ketentraman dan kedamaian dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat.
2. Memberdayakan masyarakat melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia sebagai pelaku utama pembangunan melalui optimalisasi pemberdayaan ekonomi rakyat, pendidikan rakyat dan kesehatan rakyat dengan dukungan aparatur penyelenggara

- pemerintahan daerah sebagai fasilitator yang profesional, adil, jujur, transparan serta bebas kolusi, korupsi dan nepotisme.
3. Mewujudkan otonomi daerah yang bertanggungjawab sebagai proses demokratisasi dan pemerataan pembangunan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memupuk kerjasama regional dan internasional bagi kepentingan masyarakat dan pembangunan daerah.

### C.3. TUJUAN PEMBANGUNAN DAERAH

Tujuan pembangunan daerah Nusa Tenggara Timur adalah terwujudnya manusia dan masyarakat Nusa Tenggara Timur yang usia harapan hidupnya panjang dengan derajat kesehatan yang tinggi, mempunyai pengetahuan dengan kemampuan menguasai, memanfaatkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan serta mempunyai standart hidup layak yang diukur dengan PDRB Ril Per Kapita (daya beli).

### D. TUJUAN & SASARAN PENYUSUNAN RENSTRADA

Berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tatacara Pertanggungjawaban Kepala Daerah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 050/1240/II/Bangda tanggal 21 Juni 2001 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Propinsi, Kabupaten dan Kota, serta setelah diketahuinya Status Renstrada sebagaimana telah dikemukakan pada Bagian Umum di atas, maka

tujuan dan sasaran penyusunan Renstrada adalah : ~~menyediakan perangkat perencanaan strategis bagi Kepala Daerah dan seluruh jajarannya untuk menjabarkan visi dan misi penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ke dalam program dan kegiatan lima tahunan daerah.~~

#### **D.1. Tujuan Penyusunan Renstrada**

- Menyediakan perangkat perencanaan strategis bagi Kepala Daerah dan seluruh jajarannya untuk menjabarkan visi dan misi penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ke dalam program dan kegiatan lima tahunan daerah.
- Menetapkan program dan kegiatan lima tahunan melalui sumber pembiayaan APBD sesuai dengan skala prioritas pembangunan daerah.
- Menyediakan landasan penilaian dan toluk ukur kinerja Kepala Daerah pada akhir tahun anggaran dan masa jabatan.

#### **D.2. Sasaran Penyusunan Renstrada**

- Tersusunya perangkat perencanaan strategis bagi Kepala Daerah dan seluruh jajarannya dalam menyelenggarakan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ke dalam program dan kegiatan lima tahunan daerah.
- Tersusunnya program dan kegiatan lima tahunan melalui sumber pembiayaan APBD sesuai dengan skala prioritas pembangunan daerah.
- Tersusunnya perangkat penilaian kinerja Kepala Daerah pada setiap akhir tahun anggaran dan masa jabatan secara obyektif.

### **E. SITEMATIKA**

Mengacu pada Surat Edaran Mendagri No. 050/1240/II/Bangda, Tanggal 21 Juni 2001 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Propinsi, Kabupaten dan Kota, maka

penyusunan Renstrada Propinsi NTT mengikuti sistematika sebagai berikut.

## BAB I. PENDAHULUAN

- A. Umum mengenai Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban
- B. Permasalahan Pembangunan Daerah
- C. Visi, Misi Dan Tujuan Pembangunan Daerah
- D. Tujuan dan Sasaran Penyusunan Renstrada
- E. Sistematika Renstrada

## BAB II LINGKUNGAN STRATEGIS

- A. Lingkungan Internal
- B. Lingkungan Eksternal

## BAB III STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH DAN FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN

- A. Strategi Utama
- B. Strategi Penunjang
- C. Faktor Penentu Keberhasilan

## BAB IV PROGRAM DAN INDIKATOR KEBERHASILAN

### IV.1. PROGRAM PEMBANGUNAN

- A. Program Pokok
  1. Bidang Ekonomi
    - a. Sub Bidang Ekonomi Produksi
    - b. Sub Bidang Prasarana Ekonomi
  2. Bidang Pendidikan
  3. Bidang Kesehatan
- B. Program Penunjang
  1. Bidang Tata Ruang
  2. Bidang Kesejahteraan Sosial

3. Bidang Hukum dan HAM
4. Bidang Politik, Pemerintahan dan Otonomi Daerah
5. Bidang Agama
6. Bidang Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban

### 1. Lingkungan Masyarakat

#### IV.2. INDIKATOR KEBERHASILAN

##### A. Indikator Keberhasilan Program Pokok

1. Bidang Ekonomi
  - c. Sub Bidang Ekonomi Produksi
  - d. Sub Bidang Prasarana Ekonomi
2. Bidang Pendidikan
3. Bidang Kesehatan

##### C. Indikator Keberhasilan Program Penunujang

1. Bidang Tata Ruang
2. Bidang Kesejahteraan Sosial
3. Bidang Hukum dan HAM
4. Bidang Politik, Pemerintahan dan Otonomi Daerah
5. Bidang Agama
6. Bidang Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat

#### BAB V PENGUKURAN DAN EVALUASI KINERJA

- A. Kerangka Pengukuran Kinerja
- B. Evaluasi Kinerja
- C. Kesimpulan Hasil Evaluasi Kinerja

#### BAB VI PENUTUP

## BAB II

# LINGKUNGAN STRATEGIS NUSA TENGGARA TIMUR

### A. LINGKUNGAN INTERNAL

#### 1. Lingkungan Fisik

Secara administratif, Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) terdiri dari 13 kabupaten dan 1 kota, 124 kecamatan, 309 kelurahan dan 2.207 desa. NTT adalah propinsi kepulauan dengan luas daratan 47.349.9 Km<sup>2</sup>, luas perairan ± 200.000 Km<sup>2</sup>, terdiri dari 566 pulau besar dan pulau kecil, 42 pulau telah bernama dan 524 pulau belum bernama. Propinsi NTT terletak di bagian selatan Kepulauan Indonesia memanjang dari arah Barat ke Timur. Bagian Utara dibatasi oleh Laut Flores, Timur dibatasi oleh Eks Timor Timur, Selatan dibatasi oleh Samudera Hindia dan Barat dibatasi oleh Propinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). NTT mempunyai jarak relatif dekat dengan negara tetangga Australia dan negara-negara Pasifik Selatan lainnya, sehingga NTT adalah bagian dari lingkaran Pasifik dan memiliki akses yang besar untuk mengakselerasi era perdagangan bebas yang tergabung dalam APEC.

Letak astronomis kepulauan NTT seluruhnya berada di selatan katulistiwa, pada posisi 8°-12° Lintang Selatan dan 118°-125° Bujur Timur. Jarak Utara-Selatan membentang sepanjang 4° dan jarak Barat-Timur sepanjang 7°, sehingga NTT berada pada zona iklim tropik yang sangat tipikal. Musim kemarau antara 8-9 bulan sedangkan penghujan hanya 3-4 bulan. Curah hujan berada pada kisaran 800-3000 mm/tahun dengan panjang hari hujan rata-rata 100 hari/tahun. Suhu minimum dan maksimum berkisar antara 23 – 34° C.

Topografis NTT berbukit-bukit dengan dataran tersebar secara sporadis pada gugusan yang sempit. Pada semua pulau dominan permukaannya berbukit dan bergunung-gunung, dataran-dataran yang sempit memanjang mengikuti garis pantai, diapit dataran tinggi atau perbukitan. Lahan dengan kemiringan 15 – 40 persen mencapai luasan 38,07% dan lahan dengan kemiringan lebih dari 40% mencapai 35,46%. Kondisi geomorfologis yang demikian menyebabkan pertanian pada dataran sangat terbatas baik pertanian basah maupun lahan kering. Pertanian lahan kering banyak dilakukan pada daerah-daerah dengan kemiringan yang curam sehingga produktivitas menjadi rendah.

Jenis tanah di NTT meliputi jenis tanah mediteran seluas 1.110.807 ha (23,45%), Litosol seluas 1.903.184 (40,19%), Alufial seluas 136.250 ha (2,46%), Grumosol seluas 136.750 ha (2,88%) dan Regosol seluas 64.250 ha (1,36%). Lebih lanjut dapat dikemukakan bahwa kedalaman tanah di berbagai daerah relatif tipis yang disebabkan oleh berbagai faktor seperti struktur batuan induk berupa koral dan tanah yang terbuka karena vegetasi penutup yang minim sehingga rentan erosi. Kedalam tanah < 30 cm mencapai luas 1.938.403 ha (40,94%) kedalaman 31-60 cm seluas 1.186.801 ha (25,06%) kedalaman 61-90 cm seluas 199.707 ha (10,55%) dan sisa 995.489 ha (21,03%) merupakan daerah-daerah yang memiliki kedalaman lebih dari 90 cm. Dengan demikian dapat dipahami bahwa lapisan tanah yang tipis dengan kedalaman kurang dari 30 cm paling luas. Sedangkan lapisan tanah yang tebal dengan kedalaman lebih dari 90 cm berada pada luasan yang sempit.

Berdasarkan gambaran tentang lingkungan fisik di atas, dapat diidentifikasi beberapa kekuatan dan kelemahan sebagai berikut.

### **1. Kekuatan**

- Wilayah lautan yang luas mengandung potensi ekonomi yang relatif besar.
- Luasan lahan yang belum dimanfaatkan relatif besar sangat potensial untuk pengembangan ternak dan tanaman perkebunan.
- Potensi tambang bahan mineral dan energi yang belum dieksplorasi dan dieksplorasi relatif besar.
- Tersedia cukup banyak obyek wisata yang dapat dikembangkan untuk menunjang perekonomian daerah.
- Letak geografis yang strategis sangat menguntungkan bagi perdagangan internasional.
- Iklim tropis yang dominan sangat menguntungkan bagi pengembangan pertanian, kehutanan, peternakan dan pariwisata.

### **2. Kelemahan**

- Tidak tersedia data yang cukup tentang potensi dan persebarannya menjadi kendala bagi investor.
- Kepemilikan lahan yang bersifat komunal sulit menjamin pengalihan kepemilikan lahan untuk kepentingan produktif.
- Tidak tersedia data potensi yang cukup dan adanya klaim kepemilikan adat terhadap lokasi tambang menyulitkan investor untuk melakukan penambangan atau kepentingan investasi lainnya.
- Promosi wisata dan sarana penunjang kepariwisataan belum menunjang, sehingga kurang menarik peminat dan investor.

- Sumberdaya ekonomi terfragmentasi dalam jumlah kecil pada rentang wilayah yang luas sehingga membutuhkan biaya pengumpulan yang tinggi.
- Rawan bencana, kekeringan dan ancaman hama.
- curah hujan yang rendah dan tidak merata.
- Topografi tanah yang rentan erosi.

## 2. Lingkungan Sosial Budaya

Sebagai daerah kepulauan, masyarakat Nusa Tenggara Timur merupakan suatu mosaik yang terdiri dari berbagai kelompok etnis dan sub etnis dengan latar belakang sosial budaya yang sangat beragam. Sikap dasar masyarakat NTT pada dasarnya sangat menjunjung tinggi perbedaan latar belakang sosial kultural yang ada, sehingga kondusif bagi terciptanya suatu lingkungan sosial budaya yang akrab. Pola kekerabatan yang tercipta memungkinkan partisipasi dapat berkembang dengan baik. Demikian juga dengan ragam nilai sosial budaya, kesenian, ritus-ritus dan artefak yang menyertainya merupakan suatu obyek kajian yang sangat bernilai bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun untuk kepentingan pariwisata.

Berdasarkan gambaran ringkas tentang lingkungan sosial budaya di atas, dapat diidentifikasi kekuatan dan kelemahannya sebagai berikut.

### 1. Kekuatan

- Relasi-relasi sosial yang bersifat sentrifugal sangat mendukung terciptanya kekompakan, keakraban dan partisipasi sosial yang tinggi.

- Pola kekerabatan dan komunikasi sosial yang bercorak primer memungkinkan terciptanya kegotongroyongan dalam masyarakat
  - Organisasi sosial yang bercorak primer memungkinkan komunikasi langsung yang menjamin keakraban dan saling pengertian yang tinggi.
  - Hirarki sosial yang bersifat komando (paternalistik) menjamin terciptanya ketaatan dan kepatuhan.
  - Sistem sosial yang solid dapat menjamin pelestarian nilai-nilai sosial budaya dalam masyarakat.
  - Keragaman budaya yang tinggi mengandung kearifan-kearifan lokal dan daya tarik bagi percepatan pembangunan.
2. Kelemahan
- Relasi sosial yang sentrifugal sangat rentan konflik.
  - Pola kekerabatan dan komunikasi sosial yang bercorak primer cenderung menutup diri terhadap lingkungan sekitar yang semakin terdiferensiasi.
  - Struktur sosial yang bercorak paternalistik menghambat adopsi inovasi teknologi yang sulit berkembang, melemahkan kreativitas dan inisiatif serta melenggakkan ketergantungan.
  - Sistem sosial yang kukuh (rigid) cenderung membatasi masyarakat untuk mengakomodasi nilai-nilai baru yang berkembang.
  - Keragaman budaya yang tinggi membutuhkan pola pendekatan kemasyarakatan yang beragam.

- Keterikatan yang kuat pada kearifan-kearifan lokal cenderung menciptakan resistensi terhadap perkembangan teknologi atau cara-cara baru yang lebih maju dan efisien.

### **3. Infrastruktur Pembangunan**

Pembangunan yang telah dilakukan sampai saat ini telah menghasilkan bangunan infrastruktur fisik yang cukup banyak. Sarana dan prasarana ekonomi seperti jalan, jembatan, bendungan, pasar, pelabuhan dan sebagainya telah menjadi bagian yang penting dari upaya-upaya peningkatan perekonomian daerah dan masyarakat. Sarana dan prasarana pendidikan seperti gedung-gedung sekolah, sarana belajar seperti laboratorium dan perpustakaan serta program-program peningkatan kemampuan profesional guru telah dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan derajat pendidikan masyarakat. Demikian juga sarana dan prasarana kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, poliklinik, peralatan medis, penyebaran obat-obatan dan tenaga medis serta para medis untuk melayani kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan yang baik telah dilakukan.

Dari gambaran singkat di atas, dapat diidentifikasi kekuatan dan kelemahan dari berbagai upaya pemerintah dalam membangun infrastruktur pembangunan sebagai berikut:

#### **1. Kekuatan**

- Terdapat banyak infrastruktur fisik yang telah dibangun. Pemanfaatan yang optimal terhadap ragam infrastruktur fisik tersebut akan memperkuat dan meningkatkan kemampuan produktif masyarakat.
- Adanya komitmen pemerintah yang tinggi dalam pembangunan infrastruktur sebagaimana terlihat dari semakin meningkatnya

alokasi anggaran pembangunan infrastruktur fisik setiap tahunnya merupakan jaminan bagi peningkatan kemampuan produktif masyarakat.

## 2. Kelemahan

- Persebaran infrastruktur yang dibangun kurang merata, sehingga masih banyak lapisan masyarakat yang belum terlayani dengan baik.
- Banyak infrastruktur fisik yang kurang sesuai dengan kebutuhan masyarakat sehingga tidak dimanfaatkan secara optimal, bahkan sebagian telah rusak karena tidak dimanfaatkan.
- Penempatan infrastruktur yang tidak sesuai sebagai akibat lemahnya perencanaan mengakibatkan banyak infrastruktur yang tidak produktif.
- Kurang baiknya pengawasan dalam pembangunan infrastruktur mengakibatkan banyak infrastruktur yang dibangun dengan kualitas yang rendah.
- Model pembangunan infrastruktur yang sentralistik mengakibatkan kurang berkembangnya partisipasi dan kesadaran masyarakat untuk pemeliharaan infrastruktur yang telah dibangun.

## 4. Ketenagakerjaan

Penduduk NTT pada tahun 1999 berjumlah 3.806.664 jiwa yang terdiri dari 1.876.685 laki-laki atau 49,30 persen dan 1.929.979 perempuan atau 50,70 persen. Jumlah penduduk tersebut terdiri dari 761.333 rumah tangga, yang berarti setiap rumah tangga terdiri dari 5 jiwa. Pada tahun 1999 jumlah angkatan kerja sebanyak 2.853.915 orang atau bertambah sebanyak 81.234 orang dari tahun sebelumnya

yang terdistribusi pada sektor primer sebanyak 14.213 orang, pada sektor sekunder sebanyak 42.563 dan pada sektor tersier sebanyak 21.458 orang.

Berdasarkan data kependudukan di atas, dapat diidentifikasi sejumlah kekuatan dan kelemahan yang berkaitan dengan aspek ketenagakerjaan sebagai berikut.

### 1. Kekuatan

- Tenaga kerja produktif sangat dominan dalam struktur ketenagakerjaan di NTT.
- Tingkat partisipasi tenaga kerja sangat tinggi, hal ini dapat dilihat dari angka pengangguran terbuka yang relatif rendah.
- Konsentrasi tenaga kerja produktif pada sektor pertanian diperdesaan relatif besar, merupakan dukungan bagi pengembangan sektor pertanian.

### 2. Kelemahan

- Kualitas sumberdaya manusia (tenaga kerja) relatif rendah ditunjukkan dengan rata-rata pendidikan setingkat sekolah dasar.
- Kemampuan serapan teknologi yang relatif rendah menjadikan sulitnya menggunakan input teknologi yang lebih baik dalam proses produksi.
- Produktivitas dan daya beli per kapita relatif rendah.
- Persebaran tenaga kerja belum terdiferensiasi pada sektor non pertanian menjadikan sektor pertanian menyerap tenaga kerja secara berlebihan sehingga produktivitasnya rendah.

### 5. *Institusi Sosial*

Institusi sosial dalam arti lembaga-lembaga sosial

kemasyarakatan dengan corak organisasi dan ragam aktivitas menunjukkan perkembangan yang cukup berarti setiap tahunnya. Lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan tersebut secara langsung atau tidak langsung telah mengambil berbagai peran dalam proses pembangunan. Lembaga-lembaga keagamaan yang jumlahnya sangat banyak memainkan peranan yang sangat penting dalam pembinaan umatnya. Demikian juga lembaga-lembaga pendidikan formal dan non-formal yang terus berkembang merupakan pilar bagi pengembangan dan percepatan proses alih teknologi dan peningkatan kualitas SDM serta tumbuhnya LSM sebagai mitra kerja pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat merupakan modal yang penting bagi keberlanjutan pembangunan.

Berdasarkan uraian singkat di atas, dapat diidentifikasi kekuatan dan kelemahan dari berbagai institusi sosial yang ada sebagai berikut:

### **1. Kekuatan**

- Jumlah lembaga keagamaan yang banyak dan beragam memungkinkan proses pembinaan warga masyarakat dengan baik.
- Jumlah lembaga pendidikan formal dan non formal yang semakin bertambah dan beragam memungkinkan proses alih teknologi dan pembinaan SDM dapat berkembang dengan baik.
- Bertumbuhnya LSM yang menangani berbagai bidang pembangunan menjadi mitra pemerintah yang produktif dalam pembangunan.

### **2. Kelemahan**

- Tersedianyanya perangkat peraturan yang cukup untuk menjamin keterturan dan kelancaran pelaksanaan pembangunan.
- Tersedianyanya perangkat peraturan yang cukup untuk membatasi dan menindak praktik KKN.

## 2. Kelemahan

- Aturan-aturan hukum yang sudah ada kurang disosialisasikan dengan baik sehingga menimbulkan keragaman pemahaman dan kekeliruan dalam penerapannya.
- Aturan-aturan hukum yang sudah belum diimplementasi secara optimal sehingga dampaknya bagi keteraturan, kelancaran dan kepastian hukum belum optimal.
- Terdapat cukup banyak aturan-aturan hukum yang kurang konsisten dengan tata urutan peraturan perundang-undangan sehingga sulit mengimplementasikannya.
- Penerapan aturan-aturan hukum dalam rangka pemberantasan KKN belum dijalankan secara menyeluruh dan konsisten.

## B. LINGKUNGAN EKSTERNAL

### 1. Politik dan Keamanan Dalam Negeri

Sejalan dengan terbentuknya pemerintahan baru yang dipimpin Presiden Megawati Soekarnoputri, secara berangsur-angsur kondisi politik dalam negeri mulai tenang dan stabil sehingga pemerintah dapat memikirkan dan melaksanakan berbagai program pembangunan dengan tenang. Pada sisi lain proses demokratisasi yang mulai berkembang sejalan dengan arus reformasi yang digerakkan beberapa tahun terakhir telah menempatkan partai politik, elemen-elemen masyarakat dan legislatif sebagai kekuatan yang mampu

mengimbangi dan mengawasi pemerintahan dengan baik. Kesemuanya ini memberi peluang yang cukup baik bagi pelaksanaan pembangunan.

Namun demikian, proses demokratisasi yang tidak diikuti dengan kesiapan seluruh komponen masyarakat untuk mengambil peran secara bertanggungjawab telah menimbulkan berbagai gejolak yang sangat merugikan kepentingan publik dan keberlangsungan pembangunan. Demikian juga masalah keamanan yang belum stabil sebagai akibat tuntutan kemerdekaan pada sejumlah propinsi dapat menciptakan kondisi yang kurang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan.

Berkaitan dengan gambaran ringkas tentang kondisi politik dan keamanan dalam negeri tersebut, dapat diidentifikasi beberapa peluang dan ancaman sebagai berikut:

### **1. Peluang**

- Politik dalam negeri yang semakin membaik akan memberi jaminan terhadap pelaksanaan pembangunan.
- Proses demokrasi yang semakin membaik akan memberi kontribusi bagi meningkatnya partisipasi masyarakat pelaksanaan pembangunan.
- Politik dalam negeri semakin membaik akan memberi jaminan terhadap masuknya investasi asing yang berguna bagi peningkatan aktivitas ekonomi di daerah.
- Perhatian pemerintah dan masyarakat yang tinggi untuk menciptakan situasi yang aman memberi peluang bagi masyarakat untuk mengembangkan berbagai kegiatan produktif secara bebas.

## 2. Ancaman

- Masih terbatasnya pemahaman masyarakat terhadap proses demokrasi mengakibatkan berbagai gejolak yang mengganggu kepentingan umum dan pembangunan.
- Komunikasi politik yang kurang terkoordinasi dan terarah dapat mengakibatkan kebingungan, saling curiga dan disharmoni di dalam masyarakat.
- Tindakan pengamanan yang tidak proporsional dapat mengakibatkan ketakutan dan ketidak ketentraman dalam masyarakat.
- Kurangnya kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam menciptakan keamanan, ketertiban dan ketentraman dapat menimbulkan berbagai kekacauan yang merugikan masyarakat dan pemerintah.

## 2. Perekonomian Dalam Negeri

Dalam kondisi di mana tingkat ketergantungan fiskal daerah terhadap pemerintah pusat masih tinggi, gejolak perekonomian nasional akan berpengaruh secara signifikan terhadap perekonomian daerah. Cara kerja dan kebijakan stabilisasi ekonomi makro yang ditunjukkan menteri ekonomi pada kabinet saat ini telah memberikan harapan yang cukup baik bagi pemulihan ekonomi nasional di waktu mendatang. Sejumlah kesepakatan yang telah dicapai Pemerintah R.I. dengan IMF merupakan jaminan dilaksanakannya reformasi ekonomi dengan baik. Demikian juga kebijakan fiskal nasional sebagaimana tertuang dalam RAPBN 2002 menunjukkan dampak ekspansif yang signifikan bagi perekonomian daerah.

Berdasarkan gambaran ringkas di atas, dapat diidentifikasi peluang dan ancaman sebagai berikut:

### 1. Peluang

- Perekonomian dalam negeri yang semakin membaik dapat mendorong peningkatan dan pertumbuhan ekonomi di daerah.
- Semakin meningkatnya transfer pemerintah pusat akan meningkatkan ketersediaan pendanaan pembangunan di daerah.
- Minat berinvestasi yang semakin meningkat secara nasional dapat mendorong peningkatan investasi di daerah.
- Perekonomian daerah yang semakin terintegrasi dengan perekonomian nasional dan internasional dapat mendorong pembangunan ekonomi di daerah.
- Ekspansi lembaga-lembaga keuangan ke daerah dapat memberikan dukungan pendanaan pemabangunan bagi daerah.

### 2. Ancaman

- Ketidaksiapan masyarakat dan pelaku ekonomi untuk meningkatkan daya saing dapat menghambat pertumbuhan ekonomi di daerah.
- Ketergantungan yang semakin besar terhadap transfer pemerintah pusat dapat mengurangi kreativitas dan kesungguhan pemerintah daerah dalam memperkuat basis keuangan daerahnya.
- Meningkatnya investasi tanpa kesiapan masyarakat dan pelaku ekonomi di daerah mengakibatkan mengalirnya sumber daya ekonomi ke tempat lain.

- Gejolak -gejolak perekonomian pada tingkat nasional dan internasional dapat menghambat pertumbuhan ekonomi di daerah.
- Sektor rill yang tidak dikembangkan secara sungguh-sungguh di daerah mengakibatkan semakin dominannya pelaku ekonomi yang berasal dari luar daerah sehingga mendorong pelarian modal keluar daerah.

### **3. Kebijakan Pembangunan Nasional**

Beberapa kebijakan pembangunan nasional yang dilaksanakan Pemerintah Pusat menunjukkan keberpihakan yang cukup baik bagi daerah. Implementasi otonomi daerah telah memberi kewenangan yang relatif besar bagi daerah untuk menggagas, merencanakan dan melaksanakan kegiatan pembangunannya secara bebas dan bertanggungjawab. Demikian juga dipertahankannya kementerian Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia menunjukkan betapa perhatian Pemerintah Pusat terhadap ketertinggalan Kawasan Timur Indonesia sangatlah besar. Masih terdapat sejumlah kebijakan pembangunan nasional yang sungguh berpihak pada daerah. Khususnya pada pembangunan di wilayah perdesaan. Dengan demikian dapat diidentifikasi beberapa peluang dan ancaman sebagai berikut:

#### **1. Peluang**

- Pemberian kewenangan pengelolaan pembangunan yang semakin besar kepada daerah akan mendorong keleluasan untuk merencanakan dan melaksanakan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

- komitmen pemerintah untuk mendorong perkembangan UKM memberikan peluang bagi daerah untuk mendorong pembinaan UKM kearah yang lebih baik.
- Komitmen pemrintah bagi penggembangan lembaga-lembaga keuangan mikro di perdesaan akan mendorong masuknya aliran modal ke perdesaan.
- Komitmen pemerintah untuk mempercepat pembangunan Kawasan Timur Indonesia melalui penggembangan kawasan-kawasan khusus akan mendorong percepatan pembangunan di daerah.

## 2. Ancaman

- Kewenangan pengelolaan pembangunan yang semakin besar pada kabupaten/kota tanpa diikuti perubahan cara berpikir mengakibatkan semakin sulitnya koordinasi Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- Pembinaan UKM yang tidak berkelanjutan akan mengakibatkan pembinaan yang telah dilaksanakan dengan biaya besar menjadi mubasir.
- Meningkatnya aliran modal ke perdesaaan melalaui lembagan keuangan mikro perdesaan tanpa diikuti dengan pendampingan yang intensif dapat mengakibatkan masyarakat terbebani hutang kepada lembaga-lembaga keuangan.
- Penggembangan kawasan khusus tanpa diikuti kemampuan perencanaan dan pengelolaan program secara baik akan membebani Pemerintah Daerah.

#### 4. Kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek) telah memungkinkan pelipatgandaan produksi barang, jasa dan informasi. Demikian juga dengan kemajuan Iptek di bidang komunikasi telah mengakibatkan batas-batas antar negara menjadi kabur. Kesemuanya ini memberi ragam pilihan yang semakin tinggi bagi masyarakat untuk menata kehidupannya.

Sisi lain yang perlu diantisipasi dari kemajuan Iptek yang cepat menuntut ketersediaan SDM berkualitas dalam jumlah yang relatif besar, sehingga kemajuan Iptek tersebut dapat diserap dan direplikasi dengan baik dalam berbagai bidang kehidupan. Bagi daerah dengan kualitas SDM yang rendah, kemajuan Iptek yang semakin cepat dapat menjadi bumerang yang membahayakan. Berdasarkan pemahaman demikian, kemajuan Iptek dapat menciptakan peluang dan ancaman sebagai berikut:

##### 1. Peluang

- Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat mendorong berkembangnya pikiran-pikiran pengembangan yang makin beragam.
- Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat mendorong percepatan perkembangan masyarakat.
- Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi memberikan peluang bagi daerah dalam memanfaatkan potensi-potensi sumber daya secara effisien dan effektif.

##### 2. Ancaman

- Rendahnya kemampuan masyarakat dalam menyerap ilmu pengetahuan dan teknologi dapat menciptakan kesenjangan pada tingkat lokal, nasional dan internasional.
- Ketidakmampuan masyarakat untuk menyeleksi masuknya nilai-nilai baru dapat menimbulkan ekses-ekses yang negatif dalam masyarakat.
- Pemanfaatan sumber daya alam yang secara berlebihan dengan teknologi maju dapat mengakibatkan degradasi lingkungan.

## 5. Internasional

Semakin luas dan terintegrasinya pergaulan antar bangsa menjadikan aspek internasional harus diperhitungkan sebagai kekuatan bagi pembangunan daerah. Perhatian internasional terhadap berbagai ketertinggalan di daerah perdesaan pada negara-negara yang sedang berkembang menciptakan peluang pengembangan yang baik. Bagi NTT, kehadiran negara baru Timor Lorosae sesungguhnya dapat menjadi tetangga yang produktif dalam berbagai bidang. Dalam dimensi yang lebih luas, terbentuknya pakta-pakta ekonomi lintas negara dan ditandatanganinya traktat-traktat politik, ekonomi dan keamanan bilateral maupun multilateral sesungguhnya menciptakan peluang yang beragam bagi daerah.

Di balik peluang tersebut, dimensi internasional dapat menjadi ancaman serius bagi daerah. Kompetisi yang semakin tajam, perjanjian dan persyaratan perdagangan yang semakin rumit dan sulit dapat menjadikan suatu daerah tidak bisa menikmati peluang yang tersedia. Investasi asing yang masuk pada suatu daerah tanpa diikuti dengan kesiapan masyarakat untuk memanfaatkannya akan menjadi ancaman serius bagi masyarakat. Untuk jelasnya berikut ini

disampaikan beberapa peluang dari ancaman yang muncul dari dimensi internasional sebagai berikut:

### **1. Peluang**

- Integrasi dan keterkaitan perekonomian yang semakin meluas akan menciptakan peluang bagi pengembangan potensi ekonomi daerah
- Semakin meningkatnya perhatian lembaga-lembaga internasional terhadap pembangunan daerah akan mendorong percepatan pembangunan di daerah
- Perhatian dunia internasional terhadap pelestarian lingkungan di negara-negara berkembang dapat mengurangi beban daerah terhadap penaganan lingkungan.
- Peningkatan permintaan terhadap komoditas pertanian dari wilayah tropis dapat mendorong peningkatan produksi komoditas pertanian di daerah.
- Kehadiran Negara baru Tmor Lorosae yang berbatas langsung dengan Propinsi NTT dapat menciptakan peluang-peluang ekonomi melalui kerjasama perdagangan lintas batas.

### **2. Ancaman**

- Gejolak moneter internasional secara langsung akan mempengaruhi kinerja perekonomian daerah.
- Liberalisasi ekonomi akan diikuti dengan kompetisi yang semakin tinggi. Ketidaksiapan masyarakat dan pelaku ekonomi dalam berkompetisi akan mengancam pertumbuhan ekonomi di daerah.
- Kekurangsiapan pemerintah daerah untuk memanfaatkan bantuan internasional secara transparan dan bertanggung

jawab dapat menurunkan kredibilitas pemerintah dan masyarakat di daerah di mata lembaga-lembaga internasional.

- Pengembangan komoditas agrobisnis di daerah dalam skala kecil dapat menghambat daya saing komoditas pertanian di daerah.
- Meningkatnya arus transaksi ekonomi lintas batas tanpa diikuti dengan kesiapan pelaku ekonomi di daerah mengakibatkan keuntungan lebih banyak dinikmati pelaku ekonomi yang berasal dari luar daerah.
- Peningkatan permintaan agregat yang berasal dari Timor Lorosae harus diikuti dengan peningkatan kapasitas produksi di daerah. Ketidak seimbangan kapasitas produksi di daerah dengan permintaan yang ada mengakibatkan hilangnya keuntungan yang mesti diperoleh pelaku ekonomi di daerah.
- Peningkatan transaksi ekonomi lintas batas tanpa diikuti regulasi secara proposional akan mengakibatkan tumbuhnya perdagangan gelap yang merugikan perekonomian daerah.

## BAB III

# STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH DAN FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN

### A. STRATEGI UTAMA

Di dalam Pola Dasar Pembangunan Propinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2001 – 2004, telah ditegaskan bahwa Strategi Pembangunan Daerah yang dipilih adalah **Pertumbuhan Melalui Pemerataan** dengan prinsip membangun dari apa yang dimiliki rakyat dan apa yang ada pada rakyat melalui:

- Peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang dititikberatkan pada pembangunan ekonomi, pendidikan dan kesehatan.
- Penguatan dan peningkatan kemampuan kelembagaan ekonomi, politik, hukum, agama dan sosial budaya pada lingkup pemerintah dan masyarakat.
- Pengalokasian sumberdaya secara proporsional dan bertanggungjawab.

Berdasarkan hasil analisis kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman pada lingkungan strategis NTT sebagaimana tampak pada matriks dan diagram analisis SWOT (terlampir), strategi utama di atas pada dasarnya merupakan gabungan dari strategi pertumbuhan (Strategi S-O) yang menekankan pada penggunaan kekuatan yang dimiliki untuk memanfaatkan peluang yang tersedia secara optimal dan strategi pemerataan (Strategi W-O) yang menekankan pada upaya-upaya untuk mengatasi kelemahan yang dihadapi sehingga peluang yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal.

Mengacu pada kekuatan dan peluang yang dimiliki, strategi utama yang menekankan pada peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang dititikberatkan pada pembangunan ekonomi, pendidikan dan kesehatan, secara operasional dapat dijabarkan lebih lanjut sebagai berikut:

1. Meningkatkan kemampuan ekonomi rakyat secara berkelanjutan melalui:
  - pemerataan kepemilikan faktor produksi;
  - peningkatan produksi untuk pemenuhan permintaan domestik;
  - penguatan kelembagaan ekonomi;
  - pengembangan pusat-pusat industri rakyat;
  - pengembangan basis pasar;
  - peningkatan kemampuan kewiraswastaan;
  - peningkatan penguasaan teknologi;
  - pembangunan infrastruktur ekonomi yang sesuai;
  - mendorong peningkatan investasi skala menengah dan besar sebagai mitra pengembangan ekonomi rakyat.
2. Meningkatkan kualitas, relevansi dan pemerataan kesempatan pendidikan bagi anak usia sekolah melalui:
  - pengembangan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah;
  - pengembangan sistem pembelajaran yang berorientasi pada peningkatan kualitas peserta didik;
  - pengembangan berbagai jenis pendidikan kejuruan berdasarkan kebutuhan masyarakat dan dunia kerja;

- penyebarluasan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah pada wilayah-wilayah terpencil;
3. Meningkatkan layanan kesehatan bagi peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui:
- pembangunan dan penyebaran sarana dan prasarana kesehatan pada wilayah-wilayah terpencil;
  - penyediaan layanan kesehatan dan medis yang terjangkau masyarakat lapisan bawah;
  - penyediaan tenaga kesehatan dan medis yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

## **B. STRATEGI PENUNJANG**

Hasil analisis terhadap lingkungan strategis NTT menunjukkan bahwa selain kekuatan dan peluang, terdapat juga kelemahan dan ancaman yang berasal dari lingkungan internal dan eksternal. Kelemahan dan ancaman tersebut merupakan faktor-faktor yang dapat menghambat implementasi strategi utama dengan baik. Karena itu diperlukan strategi penunjang untuk mengatasi kelemahan dan ancaman yang dihadapi, sehingga strategi utama yang telah ditetapkan dapat diimplementasi dengan baik.

Mengacu pada hasil analisis SWOT terhadap lingkungan strategis NTT, maka ditetapkan dua strategi penunjang sebagai berikut.

### **1. Peningkatan Stabilitas**

Peningkatan stabilitas (Strategi S-T), di dasarkan pada pertimbangan bahwa sejumlah ancaman yang muncul dari lingkungan eksternal perlu mendapat perhatian serius agar

kekuatan yang dimiliki dapat digunakan secara optimal. Peningkatan stabilitas yang dimaksud dilakukan melalui:

- Peningkatan upaya penegakkan hukum untuk menciptakan keteraturan, ketertiban dan kepastian hukum bagi masyarakat dan pelaku ekonomi;
- Penciptaan iklim dan komunikasi politik lokal yang kondusif;
- Peningkatan pembinaan masyarakat untuk meningkatkan kepekaan dan kemampuan beradaptasi dalam lingkungan yang cepat berubah;

## 2. Peningkatan Partisipasi Masyarakat

Peningkatan partisipasi masyarakat (Strategi W-T) didasarkan pada pertimbangan bahwa aspek kelemahan dan ancaman dalam lingkungan strategis cukup menonjol sehingga diperlukan upaya-upaya komprehensif untuk mengatasinya. Partisipasi masyarakat menjadi pilihan strategi dengan pertimbangan bahwa dalam kondisi di mana pemerintah menghadapi kesulitan untuk mengatasi berbagai kelemahan dan ancaman yang dihadapi, keterlibatan masyarakat menjadi unsur yang sangat menentukan. Strategi ini dapat dilaksanakan melalui:

- pemberdayaan dan pelibatan masyarakat dan institusi-institusi sosial kemasyarakatan dalam pembangunan dan pembinaan masyarakat khususnya;
- pemberdayaan birokrasi pemerintah untuk meningkatkan pelayanan publik dan menggalang partisipasi masyarakat dalam pembangunan;

- pengembangan model kemitraan yang tepat antara pemerintah dan institusi-institusi sosial yang ada sehingga dapat memanfaatkan sumberdaya yang tersedia secara efisien dan efektif bagi kemaslahatan masyarakat.

### **C. FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN**

Keberhasilan implementasi strategi utama dan strategi penunjang di atas sangat ditentukan oleh sampai sejauhmana sejumlah faktor penentu keberhasilan dapat dikendalikan dan dipenuhi dengan baik. Faktor penentu keberhasilan yang dimaksud mencakup kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah, pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance*), menguatnya etos kerja masyarakat dan meningkatnya peranan wanita.

#### **1. Kapasitas Kelembagaan dan Aparatur Pemerintah**

Kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah menjelaskan tentang kemampuan kelembagaan pemerintah mengakomodasi aspirasi yang berkembang, menyesuaikan diri terhadap perubahan yang terjadi, kemampuan mendefinisikan permasalahan dan merumuskan berbagai kebijakan publik yang sesuai kebutuhan masyarakat dan menciptakan birokrasi yang efisien dan efektif, kemampuan aparatur dalam mengimplementasikan kebijakan-kebijakan secara arif-bijaksana serta kemampuan aparat untuk berempati dalam melayani kepentingan publik.

Kemampuan-kemampuan yang disebutkan di atas mengisyaratkan adanya perubahan mendasar dalam model kepelayanan birokrasi dari *rowing oriented* ke *steering oriented*.

Birokrasi pemerintah bukanlah satu-satunya sarana yang mengerjakan segala sesuatu (*rowing*) untuk pembangunan, tetapi hanya salah satu sarana yang menjalankan fungsi pokok mengarahkan dan memberi kesempatan (*steering*) bagi segenap elemen masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Dengan kata lain postur birokrasi harus mengalami pencerahan (*enlightenment*) dari postur birokrasi yang dilayani menjadi birokrasi yang melayani.

## 2. Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa

Fakta menunjukkan bahwa praktik KKN yang telah berkembang demikian canggih merupakan penghambat yang paling utama dalam pembangunan. Budaya KKN yang terus meluas telah merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Ide *good governance* mendapat aksentuasi yang kuat dalam kaitannya dengan pertanggungjawab moral, sosial, politik dan hukum pemerintah terhadap masyarakat sebagai sumber kekuasaan yang dimiliki pemerintah.

UNDP merumuskan sembilan prinsip pemerintahan yang bersih dan berwibawa (*Good Governance*) adalah sebagai berikut: Partisipasi yang konstruktif, Penegakan hukum, Keterbukaan, Melayani, Berorientasi pada kesepakatan, pemerataan, efektif dan efisien, bertanggungjawab dan memiliki visi. Mewujudkan sembilan prinsip *good governance* tersebut dalam praktik pemerintahan bukanlah hal yang mudah. Praktik pemerintahan yang diwarnai KKN, cenderung *top down* dan sentralistik yang telah demikian lama diterapkan telah menjadikan birokrasi pemerintah resistens terhadap berbagai perubahan. Diperlukan kerja keras

dengan strategi yang tepat untuk mewujudkan praktik pemerintahan yang memenuhi prinsip *good governance* tersebut.

### **3. Etos Kerja Masyarakat**

Etos kerja menunjuk pada cara berpikir dan sikap bathin yang didasarkan pada seperangkat nilai yang mengutamakan kerja keras, jujur, hemat, disiplin dan kemauan belajar yang tinggi. Pada tataran teoretis maupun praksis, telah terbukti bahwa etos kerja yang tinggi memainkan peranan yang sangat signifikan bagi kemajuan suatu bangsa.

Etos kerja bersumber dari etika yang merupakan sekumpulan nilai yang diajarkan dan dihayati melalui institusi-institusi keagamaan, pendidikan dan masyarakat serta institusi sosial lainnya. Bagi masyarakat NTT yang religius, institusi keagamaan memainkan peranan yang sangat penting. Semua agama pada dasarnya mengajarkan nilai-nilai yang mengandung makna pengutamaan terhadap kerja keras, jujur, profesional, hemat, disiplin dan kemauan belajar yang tinggi. Persoalannya adalah bahwa nilai atau etika yang diajarkan dan dihayati tersebut kurang terjelma di dalam cara berpikir dan sikap bathin, sehingga etika yang dihayati belum menjadi ethos sebagaimana disebutkan di atas.

Dengan demikian keberhasilan pemerintah, lembaga-lembaga keagamaan, pendidikan, ekonomi dan lembaga sosial lainnya mendorong terciptanya kondisi yang kondusif bagi terwujudnya transformasi nilai-nilai yang mengutamakan kerja keras, jujur, profesional, hemat, disiplin dan kemauan belajar yang tinggi menjadi etos atau cara berpikir dan sikap bathin masyarakat akan menjadi

syarat yang memungkinkan pembangunan dapat berjalan dengan baik.

#### 4. Peranan Wanita

Data statistik menunjukkan bahwa jumlah penduduk wanita di NTT lebih besar dibanding jumlah penduduk laki-laki. Dalam struktur sosial masyarakat NTT, wanita atau pihak wanita memiliki sejumlah *privilege* sebagai simbol dari keutamaannya. Demikian juga dalam praktik kehidupan keluarga, peranan wanita sangat dominan. Pengalaman menunjukkan bahwa banyak kegagalan program pembangunan karena wanita tidak mendapat tempat secara proporsional. Kesemuanya ini menegaskan bahwa wanita merupakan suatu kelompok yang harus diperhitungkan sebagai kekuatan yang menentukan keberhasilan pembangunan.

Betapapun demikian, realitas menunjukkan bahwa dalam berbagai bidang kehidupan, wanita senantiasa ditempatkan pada posisi subordinasi yang kurang memungkinkan potensi dan kemampuannya dikembangkan dan bermanfaat secara optimal. Mengingat potensinya yang sangat besar, maka dalam keseluruhan tahapan pembangunan, wanita perlu mendapatkan perhatian yang setara dengan laki-laki. Dengan kata lain, dibutuhkan suatu model perencanaan dan implementasi pembangunan yang berperspektif gender untuk menjamin kesempatan dan peran wanita yang sama bagi wanita dan laki-laki, sebab keberhasilan mengangkat peran wanita secara signifikan menjadi syarat yang menentukan keberhasilan pembangunan.

## **BAB IV PROGRAM DAN INDIKATOR KEBERHASILAN**

### **A. PROGRAM POKOK**

Berdasarkan strategi pembangunan (utama dan penunjang) sebagaimana dikemukakan pada bagian sebelumnya, program pokok pembangunan daerah diprioritaskan pada program pembangunan ekonomi, pendidikan dan kesehatan. Rincian dari masing-masing program pokok adalah sebagai berikut.

#### **1. BIDANG EKONOMI**

Program pokok bidang ekonomi terdiri dari dua bagian yaitu sub bidang ekonomi produksi dan sub bidang prasarana ekonomi. Rincian dari masing-masing program sub bidang adalah sebagai berikut.

##### **1.1. Sub Bidang Ekonomi Produksi**

Secara umum program pokok sub bidang ekonomi produksi diarahkan untuk mendorong peningkatan produksi dan produktivitas masyarakat dalam rangka peningkatan pendapatan masyarakat dan daerah serta mendorong perubahan struktur ekonomi kearah yang lebih seimbang dan dinamis. Rincian programnya adalah sebagai berikut.

###### **1. Program Pengembangan Institusi Kepemilikan Lahan**

Program ini bertujuan: Memberdayakan institusi-institusi kepemilikan tanah seperti: pemilik tanah, petani penggarap, buruh-tani dan penyewa tanah.

Kegiatan pokok program ini adalah : (1). Menyusun model-model institusi kepemilikan tanah; (2). Melakukan sosialisasi model, monitoring dan evaluasi.

Indikator keberhasilan terdiri dari : (1). Tercapainya proporsi rasio penduduk terhadap penggunaan lahan; (2). Terwujudnya model institusi dan pembentukan institusi kepemilikan lahan dan tersedianya data kepemilikan lahan; (3). Terlaksananya sosialisasi model institusi kepemilikan lahan di kalangan masyarakat.

## **2. Program pengembangan Sarana Permodalan Pedesaan**

Program ini bertujuan: (1). Merciptakan kondisi bagi keberlanjutan skema pendanaan yang ada dan memberikan dorongan yang kuat bagi penciptaan skema pendanaan pembangunan lainnya yang tidak bersifat duplikatif. (2). Membangun akses kepada lembaga perbankan atau lembaga keuangan lainnya. (3). Mendorong masyarakat untuk menabung sebagian pendapatannya, sehingga meningkat investasi masyarakat.

Kegiatan pokok program ini adalah : (1). Menyusun model dan mekanisme pembentukan lembaga penjamin kredit bagi masyarakat. (2). Melakukan sosialisasi, (3). Membuat regulasi pelaksanaan dan kegiatan pendampingan. (4). Menyusun alternatif model skema pendanaan pembangunan, (5). Melakukan sosialisasi tentang arti penting tabungan masyarakat dalam perencanaan investasi; (6). Memberdayakan masyarakat untuk memanfaatkan fasilitas kredit yang tersedia.

Indikator keberhasilan terdiri dari : (1). Terwujudnya pemahaman masyarakat akan manfaat berbagai jenis skema pendanaan pembangunan; (2). Terwujudnya pemahaman masyarakat tentang mekanisme pengajuan kredit dan manfaat kredit bagi pelaksanaan kegiatan ekonomi; (3). Terdokumentasinya jumlah kelompok sasaran penerima bantuan atau kredit usaha; (4). Terciptanya hubungan

bisnis antara masyarakat dengan lembaga perbankan dan non-bank, serta lembaga penjamin kredit lainnya. (5) Meningkatnya jumlah penabung dan tabungan sebagai salah satu daya tarik investasi swasta; (6) Terwujudnya peningkatan daya serap kredit untuk masyarakat.

### **3. Program Pemberdayaan Kelembagaan Ekonomi Masyarakat**

Program ini bertujuan: (1) Meningkatkan dan mengembangkan citra Koperasi dan UKM sebagai pelaku ekonomi yang tangguh, profesional dan mandiri; (2). Mengembangkan basis kegiatan ekonomi rakyat yang cepat menghasilkan/berproduksi; (3). Menumbuhkan iklim persaingan diantara sesama lembaga ekonomi yang bertumpu pada mekanisme pasar.

Kegiatan pokok program ini adalah (1) Mengembangkan pendidikan dan latihan keterampilan usaha; (2) Melakukan pendampingan melalui bimbingan dan konsultasi; (3) Menciptakan jaringan kerja sama dan kemitraan usaha yang didukung oleh organisasi masyarakat setempat, pemerintah daerah, swasta, dan perguruan tinggi; (4) Menyediakan prasarana dan sarana usaha bagi masyarakat; (5). Menyusun standarisasi melalui kurikulum dan modul pelatihan kewirausahaan. (6). Melakukan sosialisasi informasi secara luas kepada masyarakat.(7). Melakukan pelatihan dengan melibatkan berbagai kelompok masyarakat secara selektif.

Indikator keberhasilan terdiri dari: (1). Terselenggaranya pendidikan dan latihan keterampilan usaha (kewirausahaan) bagi lembaga ekonomi masyarakat, (2). Meningkatnya peran koperasi dan UKM di berbagai sektor dan aktivitas ekonomi, (3). Terciptanya kondisi persaingan lembaga-lembaga ekonomi rakyat melalui

peningkatan efisiensi produksi.

#### **4. Program Pengembangan Tanaman Pangan Dan Hortikultura**

Program ini bertujuan: (1). Meningkatkan produksi dan produktivitas melalui usaha ekstensifikasi, intensifikasi, diversifikasi dan rehabilitasi serta optimalisasi pemanfaatan lahan; (2). Mengembangkan sistem ketahanan pangan, (3). Mengembangkan sistem agribisnis berbasis tanaman pangan dan hortikultura, 4). Mengembangkan kelembagaan pangan yang dapat mendorong kelancaran pola distribusi dan pola konsumsi pangan masyarakat; (5). Mengembangkan kelembagaan pangan masyarakat.

Kegiatan pokok program ini adalah: (1) Mengoptimalkan pemanfaatan, rehabilitasi, dan pengembangan prasarana dan sarana pendukung ketahanan pangan; (2). Meningkatkan efisiensi sistem produksi, teknologi pengolahan dan distribusi komoditas pangan, (3) Mengembangkan lembaga teknologi pangan, kegiatan penelitian, revitalisasi tata niaga pangan dan lumbung desa, (4) Melakukan pembinaan, pengendalian sistem pemantauan ketahanan pangan, (5) Menyusun peta informasi potensi pengembangan bisnis pangan dan sentra-sentra produksi pertanian tanaman pangan; (6) Mengembangkan kemitraan usaha dan kelembagaan bisnis pangan, serta pembinaan pelaku bisnis pangan, (7). Meningkatkan keanekaragaman produksi tanaman pangan dan hortikultura (8). Menyusun standarisasi benih dan bibit serta standarisasi teknik produksi, (9). Meningkatkan sistem distribusi *input* produksi, (10). Melakukan sosialisasi berbagai standarisasi kepada masyarakat petani.

Indikator keberhasilan terdiri dari : (1). Terwujudnya optimalisasi kelembagaan penunjang, sarana dan prasarana agribisnis, 2). Meningkatnya jumlah dan kualitas petani; (3). Meningkatnya rasio kepemilikan petani terhadap luas lahan garapan; (4). Meningkatnya jumlah kalori bahan makanan yang dikonsumsi masyarakat, (5). Meningkatnya kualitas pengetahuan masyarakat tentang sistem pengelolaan tanaman pangan (6). Menyusun model dan membentuk institusi perekonomian rakyat yang dapat mengakses *input* produksi pangan, pasar dan informasi bisnis pangan bagi pemerataan distribusi pangan; (7) Melakukan efisiensi sistem produksi, teknologi pengolahan dan distribusi komoditas pangan.

## 5. Program Pengembangan Perkebunan

Tujuan program ini adalah (1). Meningkatkan produksi dan produktivitas melalui usaha intensifikasi, diversifikasi dan rehabilitasi serta optimalisasi pemanfaatan lahan perkebunan; (2). Mengembangkan sistem ketahanan pangan melalui usaha perkebunan, 3). Mengembangkan sistem agribisnis berbasis perkebunan 4). Mengembangkan kelembagaan usaha dan penunjang yang dapat mendorong kelancaran pola distribusi dan pola konsumsi pangan masyarakat; (5). Meningkatkan status gizi melalui distribusi dan pola konsumsi, (6). Mengembangkan dan merehabilitasi prasarana dan sarana pendukung ketahanan pangan.

Kegiatan pokok program ini adalah : (1). Menginventarisasikan dan mengevaluasi sumber daya potensial untuk pengembangan produksi perkebunan. (2). Mengoptimalkan pemanfaatan, rehabilitasi, dan pengembangan prasarana dan sarana pendukung perkebunan.(3). Meningkatkan efisiensi sistem produksi, (4). Melakukan pembinaan, pengendalian sistem pemantauan.

Indikator keberhasilan terdiri dari : (1). Tersedianya data dan informasi sumber daya potensi untuk produksi perkebunan. (2). Terwujudnya optimalisasi fungsi kelembagaan penunjang perkebunan. (3). Terjadinya efisisensi sistem produksi dan teknologi pengolahan komoditi perkebunan. (4). Tersedianya informasi potensi pengembangan komoditi perkebunan. (5). Terciptanya kondisi kondusif bagi pelaku bisnis perkebunan.

## 6. Program Pengembangan Peternakan

Program ini bertujuan: (1) Meningkatkan produksi dan produktivitas ternak melalui intensifikasi, ekstensifikasi, diversifikasi dan pemulihan genetika; (2) Mengembangkan sistem ketahanan pangan berbasis ternak, 3). Mengembangkan sistem agribisnis peternakan; (4) Meningkatkan status gizi melalui pola distribusi dan konsumsi ternak, (5). Mengembangkan kelembagaan usaha peternakan masyarakat

Kegiatan pokok : (1) Mengembangkan inseminasi buatan, (2). Menata sistem distribusi terseleksi, (3). Meningkatkan sosialisasi dan penerapan berbagai teknologi peternakan dan pemeliharaan, (4) Memperbaiki kualitas ternak sapi Bali dan sapi Ongole, (5) Mengendalikan kesehatan hewan, (6). Mengidentifikasi dan mengembangkan pakan ternak, (7). Meningkatkan kerjasama dengan mitra usaha peternakan dalam berbagai forum koordinasi, (8). Meningkatkan sarana layanan di bidang peternakan.

Indikator keberhasilan terdiri dari : (1) Meningkatnya jumlah dan mutu ternak; (2) Meningkatnya kepemilikan ternak dan konsumsi protein hewani per kapita, (3) Meningkatnya unit usaha industri pengolahan hasil perternakan, (4). Terciptanya sistem tata niaga yang kondusif bagi posisi tawar peternak, (5). Meningkatnya status

gizi masyarakat yang bersumber dari keragaman protein hewani, (6). Terwujudnya optimalisasi peran dan fungsi kelembagaan di bidang peternakan, (7). Meningkatnya produksi dan nilai tambah usaha peternakan, (8) Berkurangnya angka kematian ternak, (9) Meningkatnya produksi pakan ternak,

## **7. Program Pembangunan Dan Pengembangan Kehutanan**

Program ini bertujuan: (1) Meningkatkan produksi dan produktivitas Hutan melalui Intensifikasi, ekstensifikasi, rehabilitasi dan pengembangan komoditi hutan unggulan melalui pola Hutan Tanaman Industri dan Hutan Kemasyarakatan; (2) Mengembangkan sistem ketahanan pangan berbasis kehutanan, 3) Mengembangkan sistem agroforestri; (4) Mengembangkan kelembagaan usaha hutan dan asosiasi pengolah hasil hutan.

Kegiatan pokok : (1). Mengembangkan dan meningkatkan pelayanan pusat pembibitan tanaman hutan unggulan, (2) Menata sistem pengembangan usaha hutan unggulan di masyarakat, (3) Meningkatkan sosialisasi dalam penerapan berbagai teknologi pengembangan tanaman hutan dan usaha hutan non kayu, (4) Mengintroduksi dan mengembangkan jenis tanaman hutan unggulan baru yang prospektif, (5) Mengendalikan bahaya kebakaran hutan, (6). Merevitalisasi pemanfaatan kawasan hutan produksi, (7). Meningkatkan kemitraan usaha pengembangan Hutan Tanaman Industri

Indikator keberhasilan terdiri dari : (1) Meningkatnya jumlah dan mutu hasil hutan produksi, hutan tanaman industri dan hutan kemasyarakatan; (2) Meningkatnya kepemilikan usaha kehutanan, (3) Meningkatnya unit usaha industri pengolahan hasil hutan, (4)

Terciptanya sistem tata niaga perkayuan, (5) Meningkatnya kualitas lingkungan hidup masyarakat, (6) Terwujudnya optimalisasi peran dan fungsi kelembagaan dan asosiasi pengusaha kehutanan.

### **8. Program Pengembangan Perikanan.**

Program ini bertujuan: (1) Meningkatkan jumlah hasil tangkapan dan budidaya ikan melalui intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi usaha perikanan; (2) Mengembangkan sistem ketahanan pangan berbasis Perikanan, (3) Mengembangkan sistem agribisnis perikanan; (4) Meningkatkan status gizi melalui pola distribusi dan konsumsi ikan, (5) Mengembangkan kelembagaan usaha perikanan laut dan darat

Kegiatan pokok program ini adalah : (1). Memberdayakan masyarakat nelayan dan petani ikan; (2). Melakukan pengawasan pemanfaatan sumber daya laut dan perikanan; (3). Mengoptimalkan pengembangan teknologi perikanan darat dan laut; (4). Melaksanakan Gerakan Masuk Laut (Gemala); (5). Mengendalikan pelaksanaan pemberantasan hama dan penyakit ikan.

Indikator keberhasilan terdiri dari : (1) Tersusunnya pedoman pelaksanaan eksplorasi, eksploitasi dan konservasi sumber daya perikanan laut dan darat; (2) Meningkatnya pendapatan masyarakat pesisir dan petani ikan; (3) Terwujudnya peluang usaha yang kondusif bagi terlaksananya investasi swasta di bidang kelautan dan perikanan; (4) Meningkatnya jumlah dan mutu hasil perikanan; (5) Meningkatnya status gizi masyarakat yang bersumber dari keragaman protein ikan.

## **9. Program Peningkatan Perdagangan Produk Unggulan Daerah.**

Program ini bertujuan: (1). Meningkatkan nilai tambah atas produk-produk unggulan daerah,(2). Menjalin aliansi-aliansi strategis dengan pelaku-pelaku ekonomi di luar NTT.

Kegiatan pokok dalam program ini, adalah (1). Meningkatkan pengawasan standart mutu, (2). Meningkatkan keterampilan kerja melalui pelatihan, pendampingan dan magang, (3). Meningkatkan promosi dagang di dalam dan ke luar negeri, (4). Menciptakan dan mengembangkan prasarana promosi dagang baik di dalam daerah maupun di luar daerah, (5). Membina dan mengembangkan jaringan kerja sama dagang antar pelaku ekonomi di dalam dan di luar daerah.

Indikator keberhasilan terdiri dari : (1). Meningkatnya promosi dagang produk-produk dagang daerah, sehingga terbentuknya pemasaran (*outlet*) perdagangan yang menguntungkan daerah; (2). Meningkatnya volume ekspor atas produk-produk unggulan daerah; (3). Meningkatnya investasi di bidang pengembangan komoditas unggulan daerah, (4). Meningkatnya jaringan kerjasama antar pelaku ekonomi di NTT dan di luar NTT

## **10. Program Pengembangan Kerjasama Antar Wilayah Dan Peningkatan Promosi Pariwisata.**

Program ini bertujuan: (1). Menciptakan kondisi yang memungkinkan kerjasama antar daerah sehingga dapat mendorong pembangunan kepariwisataan; (2). Mengembangkan jenis-jenis obyek wisata sehingga terciptanya kondisi bagi pengembangan industri pariwisata; (3). Meningkatkan kualitas daya tarik wisata baik wisman

maupun wisnus; (4). Memberikan rekomendasi bagi pembangunan infrastruktur kepariwisataan.

Kegiatan pokok dalam program ini adalah : (1). Melaksanakan kegiatan kepariwisataan berbasis sapta Pesona Wisata; (2). Mengembangkan potensi wisata di NTT melalui berbagai peristiwa dan atraksi wisata; (3). Menjadikan potensi wisata di Nusa Tenggara Timur bernilai ekonomis dan sosial; (4). Mengembangkan dan mempromosikan obyek-obyek wisata bahari, alam dan budaya melalui media cetak dan elektronik; (5). Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kepariwisataan; (6) Melakukan koordinasi perencanaan pengembangan kepariwisataan antardaerah dan wilayah.

Indikator keberhasilan terdiri dari : (1). Meningkatnya arus dan jumlah kunjungan wisata; (2).Meningkatnya pendapatan masyarakat dan daerah baik secara langsung (*direct income effect*) dan secara tidak langsung (*indirect and induced income effect*); (3). Meluasnya jaringan kerjasama pariwisata baik di dalam maupun di luar negeri; (4). Terwujudnya NTT sebagai Daerah Tujuan Wisata (DTW) potensial.

## **11. Program Pengembangan Industri Kecil dan Rumah Tangga (IKRT)**

Program ini bertujuan: (1). Menciptakan IKRT unggulan sebagai penggerak utama pembangunan ekonomi daerah. (2). Mengembangkan IKRT berbasis potensi daerah yang memiliki peluang pasar. (3). Menciptakan aksesibilitas IKRT terhadap lembaga keuangan, baik perbankan maupun non-bank. (4) Menumbuh-kembangkan rasa cinta terhadap produk komoditas industri lokal.

Kegiatan pokok program ini adalah (1) Meningkatkan pelatihan dan pemagangan yang mendukung peningkatan kemampuan kelembagaan IKRT (2). Mendorong penyediaan pusat promosi/penjualan hasil IKRT didesa (3). Meningkatkan jumlah dan skala usaha IKRT; (4). Melakukan bimbingan dan pendampingan bagi pengembangan usaha industri rumah tangga; (5) Menciptakan regulasi/peraturan yang dapat mendorong berkembangnya IKRT; (6) mendorong tumbuhnya asosiasi IKRT secara mandiri.

Indikator keberhasilan terdiri dari : (1) Meningkatnya jiwa kewirausahaan pada setiap pelaku ekonomi IKRT (2). Meningkatnya jumlah dan kualitas komoditas sesuai kebutuhan/permintaan pasar. (3). Meningkatnya kesadaran yang bertanggungjawab dari IKRT terhadap pemanfaatan kredit perbankan. (4). Terciptanya iklim kemitraan usaha antara pelaku industri lokal (IKRT) dengan pelaku industri luar NTT .

## **12. Program Pengembangan Investasi Dan Penguatan Sumber-Sumber Pendapatan Daerah.**

Program ini bertujuan (1). Meningkatkan dan mengembangkan investasi (2). Meningkatkan dan mengembangkan sumber-sumber pendapatan daerah, (3). Meningkatkan kapasitas kebijakan fiskal daerah, (4). Merevitalisasi perangkat peraturan investasi.

Kegiatan pokok program ini adalah (1). Mendata dan memetakan obyek-obyek pajak yang dapat mendorong kenaikan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP); (2). Merevitalisasi pungutan retribusi; (3). Menata kembali berbagai peraturan tentang pungutan pajak dan retribusi; (4). Mengembangkan sistem pelayanan investasi satu pintu; (5). Menata kelembagaan pungutan pajak dan retribusi, (6). Melakukan

promosi investasi melalui berbagai sarana promosi, (7). Menata kembali daya tarik investasi unggulan daerah, (8). Mengembangkan berbagai studi kelayakan investasi, (9). Mengembangkan dan mengefektifkan sumber-sumber pendapatan daerah non-pajak dan retribusi melalui optimalisasi fungsi pelayanan jasa kelembagaan pemerintah.

Indikator keberhasilan terdiri dari : (1). Tersedianya perangkat peraturan perijinan dan kemudahan investasi pemerintah, PMA, PMDN dan non fasilitas; (2). Terciptanya kondisi bagi pelaksanaan perluasan pungutan pajak dan retribusi; (3). Tersedianya perangkat peraturan pemungutan pajak dan retribusi; (4). Tersedianya data dan informasi bagi pengembangan investasi, (5). Meningkatnya kualitas aparatur pelayanan dan kualitas layanan investasi.

### **13. Program Peningkatan Profesionalitas Dan Kinerja BUMD**

Program ini bertujuan: (1). Meningkatkan kemampuan manajemen BUMD sehingga dapat mendorong peningkatan kinerja BUMD, (2). Memperluas kesempatan kerja dan kesempatan berusaha BUMD, (3). Meningkatkan kontribusi BUMD bagi penerimaan daerah, (4). Meningkatkan kinerja BUMD melalui layanan publik.

Kegiatan pokok program ini adalah (1). Menata kembali sistem rekrutmen aparat BUMD berdasarkan kaidah-kaidah profesionalitas, (2). Melakukan pendidikan, pelatihan dan pemagangan, (3). Meningkatkan fungsi manajemen dan kelembagaan BUMD, (4) Menciptakan dan mencari peluang usaha yang prospektif dan spesifik, (5). Melakukan kerjasama melalui pola kemitraan usaha dengan para pelaku ekonomi lainnya baik di dalam maupun di luar daerah, (6). Meningkatkan dukungan sarana dan prasarana pengembangan usaha.

Indikator keberhasilan terdiri dari : (1). Meningkatnya kemampuan manajemen BUMD (2). Meningkatnya kinerja dan profesionalitas BUMD; (3) Meningkatnya kontribusi BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah; (4). Terwujudnya BUMD yang memiliki spesifikasi kerja dan daya saing tinggi, (5). Terjalinnya kerja sama antara BUMD dan sesama pelaku ekonomi lainnya dalam berbagai bidang kegiatan/usaha, (6). Meningkatnya kemampuan dan keterampilan pengelola BUMD.

#### **14. Program Pembangunan Dan Pengembangan Pertambangan**

Program ini bertujuan: (1). Menciptakan kebijakan dan regulasi pertambangan, energi dan air bawah tanah yang berbasis lingkungan; (2). Meningkatkan skala dan nilai tambah produk pertambangan, energi dan air bawah tanah; (3). Meningkatkan pemenuhan kebutuhan produk pertambangan, energi dan air bawah tanah.

Kegiatan pokok program ini adalah (1).Melakukan pemutakhiran data dan informasi dibidang pertambangan, energi dan air bawah tanah; (2). Menyusun kebijakan dan regulasi bidang pertambangan, energi dan air bawah tanah; (3). Melakukan pendampingan usaha pertambangan, energi dan air bawah tanah; (4). Meningkatkan promosi bidang pertambangan, energi dan air bawah tanah; (5) Meningkatkan pemanfaatan potensi pertambangan, energi dan air bawah tanah (6) Mengembangkan teknologi pertambangan, energi dan air bawah tanah; (7) Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap rencana, kebijakan dan regulasi dibidang pertambangan, energi dan air bawah.

Indikator keberhasilan terdiri dari : (1). Tersusunnya rencana dan kebijakan serta regulasi di bidang pertambangan, energi dan air bawah tanah; (2). Meningkatnya kemampuan Pelaku pertambangan, energi dan air bawah tanah; (3). Terwujudnya peningkatan investasi di bidang pertambangan, energi dan air bawah tanah; (4) Terwujudnya pemenuhan kebutuhan pertambangan, energi dan air bawah tanah; (5) Terwujudnya pemanfaatan potensi pertambangan, energi dan air bawah tanah yang ramah lingkungan.

## **1.2. Sub Bidang Prasarana Ekonomi**

Program pokok sub bidang prasarana ekonomi diarahkan untuk menunjang peningkatan produksi melalui pemerataan akses terhadap prasarana ekonomi dan pemerataan kepemilikan faktor-faktor produksi di kalangan masyarakat. Rinciannya adalah sebagai berikut.

### **1. Program Pengembangan Perumahan Rakyat**

Program ini bertujuan; (1) Menyediakan rumah sehat baik oleh pemerintah, swasta maupun masyarakat; (2) Meningkatkan sistem pengembangan rumah sehat yang bertumpu pada kemampuan dana masyarakat.

Kegiatan pokok adalah (1). Membangun dan mengembangkan rumah sehat di wilayah pedesaan dan perkampungan kumuh di perkotaan, (2) Mengembangkan Skim kredit murah dan mudah. (3) Mengembangkan kemitraan kerja diantara Pemerintah, swasta dan masyarakat dalam pembangunan rumah sehat.

Indikator keberhasilan terdiri dari : (1) Meningkatnya penyediaan rumah sehat terutama di pedesaan dan wilayah kumuh perkotaan, (2) Meningkatnya penyediaan rumah sehat untuk masyarakat berpenghasilan rendah, (3) Berkembangnya pola kemitraan

pengembangan rumah sehat.

## **2. Program Pembangunan dan Pengembangan Permukiman**

Program ini bertujuan: (1) Meningkatkan konsentrasi pemukiman untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangan ekonomi produksi. (2) Meningkatkan tata permukiman sesuai tata ruang, (3) Meningkatkan kapasitas jaringan prasarana dan sarana permukiman di perkotaan dan pedesaan.

Kegiatan pokok program ini adalah (1) Membangun dan mengembangkan permukiman pada kawasan-kawasan potensial, (2) Memperbaiki dan menyediakan prasarana dan sarana pemukiman di perkotaan dan pedesaan, (3) Meningkatkan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana permukiman, (4) Meningkatkan kemampuan pengelolaan, prasarana, sarana permukiman berbasis masyarakat, (5) Merevitalisasi standar dan peraturan jasa konstruksi dan jasa konsultasi.

Indikator keberhasilan terdiri dari : (1) Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman (2) Meningkatnya kawasan-kawasan permukiman baru sesuai tata ruang, (3) Meningkatnya sarana dan prasarana permukiman.

## **3. Program Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan**

Program ini bertujuan: (1) Mempertahankan tingkat pelayanan prasarana jalan dan jembatan. (2) Meningkatkan aksesibilitas jasa pelayanan prasarana jalan dan jembatan ke dan dari sentra-sentra produksi.

Kegiatan pokok program ini adalah : (1) Melaksanakan rehabilitasi dan pemeliharaan jalan dan jembatan dengan melibatkan

masyarakat; (2) Meningkatkan kondisi jalan dan penggantian jembatan; (3) Melakukan perencanaan dan pengawasan teknis jalan dan jembatan; (5). Mendorong dan memfasilitasi masyarakat membangun jalan dan jembatan desa pada sentra-sentra produksi.

Indikator keberhasilan terdiri dari : (1) Meningkatnya pelayanan prasarana jalan dan jembatan yang mampu memenuhi kebutuhan minimum dalam pemulihan ekonomi (2) Tersedianya prasarana jalan dan jembatan yang berkaitan dengan landasan pembangunan ekonomi yang berkesinambungan (3) Terciptanya sistem jaringan jalan yang terpadu sesuai fungsi jalan (arteri, kolektor, lokal termasuk jalan desa).

#### **4. Program Peningkatan Fasilitas dan Pengawasan Lalu Lintas Jalan serta Peningkatan Fasilitas Penyeberangan.**

Program ini bertujuan: (1) Memperlancar arus lalu lintas manusia, barang dan jasa serta menurunkan angka kecelakaan di jalan raya. (2) Memperlancar mobilitas arus penumpang dan barang pada setiap pelabuhan penyeberangan.

Kegiatan pokok program ini adalah : (1) Mengintesifkan pembinaan awak kendaraan umum. (2) Meningkatkan kemampuan teknis aparatur lalu lintas Angkutan Jalan Raya. (3) Menertibkan sarana dan fasilitas keselamatan lalu lintas/angkutan darat. (4) Meningkatkan prasarana dan sarana angkutan penyeberangan yang memadai. (5). Meningkatkan kemitraan kerja antara pemerintah, swasta dan masyarakat di bidang keselamatan lalu lintas jalan dan penyeberangan.

Indikator keberhasilan terdiri dari : (1) Meningkatnya kelancaran arus lalu lintas jalan raya (2) Menurunnya angka kecelakaan lalu

lintas (3) Meningkatnya jumlah arus penumpang dan barang (4) Meningkatnya kemampuan aparatur pengawas dan pengendali. (5). Bertambahnya fasilitas pelabuhan penyeberangan

### **5. Program Pengembangan Fasilitas Pelabuhan, Keselamatan Pelayaran dan Peningkatan Sarana Angkutan Laut.**

Program ini bertujuan: (1) Meningkatkan kelancaran mobilitas arus penumpang dan barang di setiap pelabuhan laut (2) Menjamin keselamatan dan penegakan hukum pelayaran.

Kegiatan pokok program adalah : (1) Meningkatkan jumlah dan kualitas pelayanan sarana angkutan laut. (3). Penegakan aturan dan hukum pelayaran (4). Menertibkan prasarana angkutan laut. (5) Menginventarisir dan mengkaji ulang kondisi pelabuhan laut yang tingkat risiko pelayarannya tinggi (6). Meningkatkan mutu aparatur pelayaran.

Indikator keberhasilan terdiri dari: (1) Meningkatnya pergerakan arus penumpang dan barang pengguna jasa perhubungan laut/pelayaran (2) Menurunnya tingkat hambatan dan kecelakaan dalam pelayaran, (3) Meningkatnya jumlah mutu aparatur yang berkualitas .

### **6. Program Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Udara, Keselamatan Penerbangan dan Peningkatan Sarana Penerbangan.**

Program ini bertujuan: (1) Meningkatkan kelancaran arus penumpang, barang; (2) Menjamin keselamatan penerbangan.

Kegiatan pokok program ini adalah : (1) Menegakkan peraturan penerbangan untuk menjamin keselamatan penerbangan (2). Meningkatkan kualitas aparatur di bidang jasa angkutan udara.

Indikator keberhasilan terdiri dari : (1) Terwujudnya pelayanan angkutan udara yang menjamin keselamatan penumpang (2) Meningkatnya arus penumpang, barang dan jasa.

### **7. Program Pengembangan Meteorologi dan Geofisika.**

Program ini bertujuan: Mengukur dan memprakirakan perubahan iklim dan gelaja alam lainnya sehingga dapat menunjang kegiatan pembangunan pada bidang-bidang lainnya.

Kegiatan pokok program ini adalah (1) Menyediakan sarana dan parasarana yang memadai. (2) Mengembangkan SDM (3) Membangun dan mengembangkan sistem informasi dengan daya jangkau yang luas.

Indikator keberhasilan terdiri adalah Tersedianya data dan informasi yang akurat yang mendukung pembangunan sektor lain.

### **8. Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi**

Program ini bertujuan: menunjang tercapainya Peningkatan produksi, produktivitas dan ketahanan pangan serta pengembangan agribisnis dengan meningkatkan efektivitas dan produktivitas pengelolaan jaringan irigasi.

Kegiatan pokok adalah (1) Meningkatkan mutu SDM pengelolaan jaringan irigasi (2) Melakukan penataan ulang tugas dan fungsi pemerintah pusat, propinsi, kabupaten maupun kota dalam rangka menciptakan kemandirian pengelolaan jaringan irigasi P3A; (3) Memberdayakan P3A melalui pendampingan oleh perguruan tinggi dan LSM, (4) Memberdayakan organisasi petani lainnya dalam pengelolaan jaringan irigasi, (5) Mengkaji kembali sistem pembiayaan pengelolaan irigasi (operasi dan pemeliharaan, rehabilitasi, dan peningkatan);(6) Mengembangkan jaringan irigasi sesuai kebutuhan.

Indikator keberhasilan terdiri dari : (1) Terselenggaranya penataan kembali tugas dan peran pemerintah propinsi/kabupaten dan kota dalam pengelolaan irigasi berdasarkan pemberian kewenangan; (2) Meningkatnya peran lembaga P3A melalui pembentukan gabungan/induk P3A untuk mengelola jaringan irigasi sampai ke tingkat jaringan utama.

## **9. Program Konservasi Pengembangan dan Pengelolaan Sumberdaya Air.**

Program ini bertujuan: (1) Meningkatkan pemanfaatan dan produktivitas sumber daya air (2) Meningkatkan konservasi sumber-sumber air.

Kegiatan pokok program ini adalah : (1) Meningkatkan mutu SDM dalam pengelolaan sumberdaya air; (2) Menata kembali tugas, peran dan tanggungjawab pemerintah pusat, pemerintah propinsi/kabupaten/ kota, swasta dan masyarakat dalam pengelolaan sumber-sumber air; (3) Mensosialisasikan kebijakan-kebijakan di bidang pengembangan sumber daya air; (4) Membentuk jaringan kelembagaan pengelolaan data hidrologi; (5) Mengkaji kembali karakteristik satuan wilayah sungai; (6) Meningkatkan pengelolaan wilayah sungai secara terpadu; (7) Memelihara, memperbaiki, dan mengembangkan waduk, danau, situ, telaga, embung, serta peranan penampung air yang dimanfaatkan untuk meningkatkan penyediaan air irigasi, air minum; (8) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan dan konservasi sumberdaya air; (9) Membentuk badan pengelolaan sumberdaya air baku; (10) Melakukan identifikasi dan evaluasi jaringan irigasi.

Indikator keberhasilan terdiri dari : (1) terselenggaranya pengelolaan sumber daya air yang efisien dan efektif; (2) meningkatnya pemanfaatan dan produktivitas sumber air; (3) terlindungnya sumber-sumber air.

#### **10. Program Pembinaan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah.**

Program ini bertujuan menjaga keseimbangan antara pemanfaatan dan pelestarian fungsi serta daya dukung sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Kegiatan pokok program ini adalah (1) Meningkatkan mutu SDM dibidang pengelolaan lingkungan hidup; (2) Mengidentifikasi dan menginventarisasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup : (3) Mengkaji kembali kebijakan pengelolaan, konservasi, preservasi dan rehabilitasi sumber daya alam; (4) Meningkatkan pengelolaan daerah aliran sungai (DAS) secara optimal; (5) Melaksanakan reboisasi dan rehabilitasi dalam kawasan hutan, lahan kritis serta lahan bekas pertambangan (6) Menyusun dan menerapkan pedoman tentang evaluasi ekonomi lingkungan dan sumberdaya alam; (7) Menetapkan status pengelolaan kawasan konservasi (cagar alam, taman wisata alam, taman nasional, hutan lindung, sumber air tanah dan mata air); (8) Mengembangkan teknologi pemanfaatan sumber daya alam yang ramah lingkungan; (9) Mengembangkan pariwisata yang berwawasan lingkungan (*eco – tourism*).

Indikator keberhasilan terdiri dari : (1) Terwujudnya keseimbangan pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup secara optimal, efisien dan berkelanjutan; (2) Terlindungnya kawasan konservasi dari kerusakan akibat

Indikator keberhasilan terdiri dari : (1) terselenggaranya pengelolaan sumber daya air yang efisien dan efektif; (2) meningkatnya pemanfaatan dan produktivitas sumber air; (3) terlindungnya sumber-sumber air.

#### **10. Program Pembinaan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah.**

Program ini bertujuan menjaga keseimbangan antara pemanfaatan dan pelestarian fungsi serta daya dukung sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Kegiatan pokok program ini adalah (1) Meningkatkan mutu SDM dibidang pengelolaan lingkungan hidup; (2) Mengidentifikasi dan menginventarisasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup : (3) Mengkaji kembali kebijakan pengelolaan, konservasi, preservasi dan rehabilitasi sumber daya alam; (4) Meningkatkan pengelolaan daerah aliran sungai (DAS) secara optimal; (5) Melaksanakan reboisasi dan rehabilitasi dalam kawasan hutan, lahan kritis serta lahan bekas pertambangan (6) Menyusun dan menerapkan pedoman tentang evaluasi ekonomi lingkungan dan sumberdaya alam; (7) Menetapkan status pengelolaan kawasan konservasi (cagar alam, taman wisata alam, taman nasional, hutan lindung, sumber air tanah dan mata air); (8) Mengembangkan teknologi pemanfaatan sumber daya alam yang ramah lingkungan; (9) Mengembangkan pariwisata yang berwawasan lingkungan (*eco - tourism*).

Indikator keberhasilan terdiri dari : (1) Terwujudnya keseimbangan pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup secara optimal, efisien dan berkelanjutan; (2) Terlindungnya kawasan konservasi dari kerusakan akibat

pemanfaatan sumber daya alam yang tidak terkendali dan eksploratif; (3) Menurunya kerusakan sumberdaya alam dan lingkungan hidup.

### **11. Program Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup Daerah.**

Program ini bertujuan: (1)melestarikan fungsi lingkungan hidup baik daya dukung maupun daya tampung; (2) Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan pengendalian kerusakan lingkungan hidup.

Kegiatan pokok program ini adalah : (1) Meningkatkan SDM dan kemampuan kelembagaan pengendalian pencemaran lingkungan hidup; (2) mengembangkan teknologi pengelolaan sumber daya air, hutan dan lahan yang ramah lingkungan termasuk teknologi lokal/tradisional.; (3) Meningkatkan pemulihan kualitas lingkungan yang rusak; (4) Menetapkan indeks dan baku mutu lingkungan daerah, serta menyiapkan model dan pedoman audit lingkungan; (5) Mengembangkan teknologi pengelolaan limbah rumah tangga dan limbah industri; (6) Melakukan pemantuan, pengawasan dan evaluasi secara kontinu terhadap standar mutu lingkungan dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup.

Indikator keberhasilan terdiri dari : (1) Terwujudnya upaya pencegahan dan penanggulangan kerusakan serta pencemaran lingkungan hidup; (2)Tercapainya kualitas lingkungan hidup yang bersih dan sehat sesuai dengan baku mutu lingkungan yang telah ditetapkan.

### **12. Program Pembinaan dan Pengelolaan Daerah Pesisir dan Laut**

Program ini bertujuan: mengelola dan mengembangkan sumber

daya wilayah pesisir dan laut secara terpadu dan lestari.

Kegiatan pokok program ini adalah : (1) Meningkatkan mutu SDM di bidang pengelolaan wilayah pesisir dan laut; (2) Meningkatkan upaya rehabilitasi dan konservasi ekosistem hutan mangrove, padang lamun dan terumbu karang ;(3) Mengembangkan zonasi pesisir dan laut; (4) Menetapkan dan memanfaatkan ruang wilayah laut lintas kabupaten/kota; (5) Membangun sistem database keanekaragaman hayati laut; (6) Menetapkan dan mengelola kawasan-kawasan konservasi pesisir dan laut (taman wisata alam laut) berbasis masyarakat; (7) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam upaya penyelamatan, perlindungan dan pemanfaatan lestari sumber daya pesisir dan laut; (8) Mengatur pengelolaan lingkungan dalam pemanfaatan sumberdaya laut 4 - 12 mil; (9) Memelihara dan mengembangkan obyek wisata bahari.

Indikator keberhasilan terdiri dari : (1) Meningkatnya pemanfaatan sumberdaya wilayah pesisir dan laut secara optimal dan lestari sesuai tata ruang kawasan; (2) Terciptanya keterpaduan sistem pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir dan laut antara propinsi kabupaten/kota; (3) Meningkatnya peran masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir dan laut.

### **13. Program Peningkatan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan.**

Program ini bertujuan: Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam pelestarian, pengawasan dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Kegiatan pokok program ini adalah: (1) menginventarisasi, mengidentifikasi dan mengintegrasikan nilai, norma dan kearifan lokal

kedalam peraturan hukum dibidang lingkungan hidup; (2) Melakukan pelatihan dan pemagangan masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya alam yang ramah lingkungan, (3) Melakukan sosialisasi peraturan-peraturan, hak dan kewajiban masyarakat dalam pengelolaan SDA dan pelestarian lingkungan hidup; (4) Mengembangkan kemitraan dalam rangka pemanfaatan sumberdaya alam, (5) Memanfaatkan kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya alam; (6) Menguatkan peran serta lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dalam bidang lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam; (7) Meningkatkan upaya perlindungan hak-hak adat masyarakat lokal dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan, (8) Memanfaatkan lembaga adat dalam kepemilikan dan pengelolaan sumberdaya alam.

Indikator keberhasilan terdiri dari : Meningkatnya kesadaran, pengetahuan dan ketrampilan serta pemantapan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup berbasis masyarakat secara bertanggung jawab.

## **2. BIDANG PENDIDIKAN**

Program pokok bidang pendidikan diarahkan pada peningkatan kualitas, relevansi dan pemerataan pendidikan untuk menghasilkan sumberdaya manusia berkualitas yang mampu memanfaatkan berbagai potensi dan peluang bagi kesejahteraannya. Rincian program bidang pendidikan adalah sebagai berikut.

### **1. Program Pembangunan Pendidikan Dasar**

Tujuan program: (1) Meningkatkan pemerataan kesempatan belajar bagi anak usia sekolah dari kelompok keluarga miskin di daerah terpencil; (2) Meningkatkan mutu pendidikan dasar baik

SD/MI maupun SLTP/MTs, (4) Mewujudkan manajemen pendidikan dasar berbasis sekolah ; dan (5) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pendidikan dasar.

Kegiatan pokok program ini adalah : 1) Memperluas pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan bagi anak usia sekolah dari kelompok keluarga miskin di daerah tertinggal, seperti; pemberian beasiswa, pengembangan SD inti dan sekolah dasar luar biasa (SDLB) dan pendidikan luar sekolah (PLS); 2) Penyelarasan kurikulum pendidikan dasar sesuai kebutuhan anak didik dan berbasis potensi daerah (muatan lokal); 3) Pelatihan pelatih tenaga guru (TOT), pelatihan guru pemandu, pelatihan guru mata pelajaran pokok, pelatihan kepala sekola, pelatihan tenaga pengawas pendidikan dasar dan melaksanakan pendidikan guru setara program Diploma 2 (D2); 4) Menyediakan buku pelajaran pokok, buku bacaan, alat peraga pendidikan ilmu pengetahuan sosial (IPS), ilmu pengetahuan alam (IPA) dan matematika; 5) Melakukan lomba bidang studi dan karya tulis bagi siswa dan lomba penulisan naskah pendidikan muatan lokal bagi guru-guru; lomba sekolah sehat (UKS) dan lomba gugus sekolah; 6) Mengawasi proses belajar mengajar melalui kegiatan pemetaan mutu sekolah, penilaian guru dan hasil belajar, serta pengembangan standarisasi penilaian mutu pendidikan SD, SLTP dan SLB; 7). Mengembangkan manajemen pendidikan dasar berbasis sekolah dan pemantapan perencanaan pembangunan pendidikan termasuk sekolah unggul.

Indikator keberhasilan terdiri dari : (1). Meningkatnya angka partisipasi kasar (APK) tingkat pendidikan dasar; 2) Meningkatnya mutu pendidikan SD/MI dan SLTP/MTs, (3). Meningkatnya kualitas

tenaga guru melalui pelatihan; 4) Tersedianya buku pelajaran pokok, buku bacaan dan alat peraga pendidikan dasar; 5) Terlaksananya management pendidikan dasar berbasis sekolah secara profesional; 6) Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan SD/MI dan SLTP/MTs swasta; 7) Terpenuhinya pemerataan guru di daerah perkotaan maupun di desa.

## **2. Program Pembangunan Pendidikan Menengah (SMU/SMK, MA)**

Tujuan program ini adalah : 1). Meningkatkan pemerataan kesempatan belajar; 2) Meningkatkan mutu pendidikan dan daya saing siswa; 3) Meningkatkan relevansi dan efisiensi pengelolaan pendidikan, 4). Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan pendidikan SMU/SMK dan MA.

Kegiatan pokok program ini adalah : 1) Memperluas pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan tingkat menengah dengan memberikan beasiswa bagi siswa dari keluarga miskin di daerah tertinggal; 2) Pengembangan tenaga guru profesional melalui pelatihan, penataran, kursus, magang di sekolah unggul dan penyetaraan kualifikasi pendidikan guru; 3) Menyediakan buku pelajaran pokok, buku bacaan dan alat peraga pendidikan; 4) Menyelenggarakan lomba bidang studi dan karya tulis bagi siswa dan naskah pendidikan muatan lokal bagi guru; 5) Menyusun kurikulum sekolah unggul sesuai kebutuhan daerah, nasional dan global; 6) Mengembangkan sistem management pendidikan menengah berbasis sekolah dan sekolah unggul dengan mengoptimalkan partisipasi masyarakat terutama BP3.

Indikator keberhasilan terdiri dari : 1) Meningkatnya angka partisipasi kasar (APK) untuk tingkat pendidikan menengah dengan

adanya pemerataan memperoleh kesempatan belajar; 2) Meningkatnya mutu, jumlah dan daya saing tamatan pendidikan menengah terutama jumlah dan mutu tamatan sekolah kejuruan yang memasuki pasar kerja; 3) Meningkatnya relevansi, efisiensi dan standart mutu pendidikan; 4) Meningkatnya peranserta masyarakat dalam pengelolaan pendidikan SMU/SMK dan MA.

### **3. Program Pembangunan Pendidikan Tinggi**

Tujuan Program ini adalah : 1) Meningkatkan pemerataan memperoleh kesempatan belajar di pendidikan tinggi; 2) Meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan tinggi 3). Meningkatkan manajemen pendidikan tinggi; 4) Meningkatkan peranserta masyarakat dalam pengembangan pendidikan tinggi.

Kegiatan pokok program ini adalah : 1) Memperluas pemerataan kesempatan belajar di pendidikan tinggi melalui pemberian beasiswa bagi mahasiswa dari kelompok keluarga miskin; 2) Meningkatkan mutu tenaga akademik melalui pendidikan Strata 2, Strata 3 dan pendidikan jangka pendek lainnya, 3). Mendorong penulisan buku bermuatan lokal; 4). Melakukan pembinaan, pengawasan terhadap penyelenggaraan perguruan tinggi, 5). Meningkatkan kemitraan kerja antara perguruan tinggi, pemerintah dunia usaha dan masyarakat.

Indikator keberhasilan terdiri dari : 1) Meningkatnya angka partisipasi kasar (APK) pendidikan tinggi; 2) Meningkatnya mutu dan relevansi pendidikan tinggi, 3). Tertatanya manajemen pendidikan tinggi yang efisien dan efektif, 4) Meningkatnya jumlah lulusan perguruan tinggi yang dapat ditampung dalam dunia kerja; 5). Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan pendidikan tinggi.

#### **4. Program Pembinaan Pendidikan Luar Sekolah**

Tujuan Program ini adalah : (1). Meningkatkan pemerataan kepada masyarakat yang tidak atau belum memperoleh pendidikan formal; (2). Meningkatkan pengetahuan dasar dan ketrampilan masyarakat agar mampu berusaha menciptakan lapangan kerja; 3). Memfasilitasi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat untuk menyelenggarakan pendidikan luar sekolah.

Kegiatan pokok : 1). Melaksanakan penuntasan buta aksara bagi penduduk usia 10 - 44 tahun, 2). Membangun dan mengembangkan taman bacaan dan perpustakaan yang berada di perkotaan dan di perdesaan, 3). Melakukan pelatihan ketrampilan mengembangkan usaha; 4). Melaksanakan sosialisasi pendidikan luar sekolah melalui Kejar paket A dan B. 5). Mengembangkan modul pembelajaran PLS; 6). Melatih tenaga tutorial dan mengembangkan lembaga tutorial PLS di daerah perdesaan; 7) Melakukan pembinaan dan pengawasan program PLS terutama di perdesaan, 8). Mengembangkan kemitraan kerja antara pemerintah dunia usaha dan lembaga sosial lainnya dalam menyelenggarakan PLS.

Indikator keberhasilan terdiri dari : 1). Terlayaninya kegiatan bagi masyarakat yang tidak atau belum menikmati pendidikan formal; 2). Tersedianya lembaga pendidikan luar sekolah, 3). Tersedianya tenaga tutorial dan sarana yang memadahi; 4). Meningkatnya partisipasi masyarakat dan lembaga non-pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan luar sekolah. 5). Meningkatnya pemberdayaan sanggar atau pusat-pusat kegiatan pembelajaran masyarakat.

## 5. Program Revitalisasi Manajemen Pendidikan

Tujuan program ini adalah : Meningkatkan sinkronisasi dan koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan program pendidikan baik antar jenjang, jalur maupun antar daerah.

Kegiatan pokok program ini adalah : (1). Mengembangkan kurikulum muatan lokal melalui kemitraan kerja diantara komponen pendidikan; 2) Memfasilitasi penyelenggaraan evaluasi Cawu Regional pada setiap jenjang pendidikan, (4). Menyusun rencana induk pembangunan pendidikan dan rencana pengembangan sekolah unggul menjelang tahun 2020; 5) Mengembangkan manajemen pendidikan berbasis sekolah dengan dukungan masyarakat; 6) Melakukan pengendalian pembangunan pendidikan baik aspek alokasi tenaga kependidikan, sarana dan prasarana dan kegiatan belajar mengajar.

Indikator keberhasilan terdiri dari : Tertatanya sistem sinkronisasi, koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan evaluasi program pembangunan pendidikan.

## 6. Program Pengembangan, Penyebarluasan dan Pemanfaatan IPTEK.

Tujuan program ini adalah : (1). Meningkatkan pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengkajian terobosan dalam rangka pemanfaatan IPTEK, (2). Meningkatkan penguasaan masyarakat terhadap hasil-hasil penelitian dan pengkajian, (3). Mendorong pemerintah, masyarakat dan dunia usaha untuk memanfaatkan hasil-hasil penelitian dan pengkajian, (4). Meningkatkan kemampuan peneliti di pemerintah, (5). Memanfaatkan peluang dan fasilitas pemerintah pusat dalam melakukan penelitian dan pengkajian IPTEK

terobosan di daerah

Kegiatan pokok : (1). Meningkatkan koordinasi pusat-pusat penelitian dalam rangka pemanfaatan hasil penelitian yang sudah ada, (2). Membangun dan mengembangkan sistem informasi penelitian, (3). Standarisasi kualifikasi peneliti dan metodologi penelitian serta manajemen penelitian. (4). Mengembangkan kajian-kajian sosial budaya terhadap hasil-hasil penelitian IPTEK sebagai masukan bagi perumusan kebijakan pemerintah, (5). Mengembangkan asisten teknis kepada usaha kecil, koperasi dan wirausaha tradisional; (6). Meningkatkan kemandirian layanan teknologi dan keunggulan inovasi teknologi bangsa sendiri agar dapat meningkatkan daya saing dunia usaha dan masyarakat; (7). Memperluas kemitraan penelitian termasuk menyederhanakan proses kemitraan untuk meningkatkan keefektifan dan keleluasaan dalam berhubungan dengan dunia usaha.

Indikator keberhasilan terdiri dari : (1). Meningkatnya kemampuan lembaga LITBANG dalam melakukan penelitian dan pengkajian IPTEK terobosan, (2). Terwujudnya pemanfaatan IPTEK di daerah.

### **3. PEMBANGUNAN KESEHATAN RAKYAT**

Pembangunan kesehatan diarahkan pada pemulihan, pemantapan dan pengembangan kehidupan sosial dan budaya melalui peningkatan mutu kesehatan dengan agenda pokok: peningkatan kinerja institusi kesehatan, peningkatan pelayanan kesehatan secara merata dan menjangkau seluruh masyarakat, peringkatan penyuluhan paradigma hidup sehat serta peningkatan kualitas penduduk. Rincian programnya adalah sebagai berikut.

## **1. Program Penyediaan dan Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan**

Tujuan Program : (1). Menyediakan dan menempatkan secara merata tenaga kesehatan yang mendukung berbagai jenis layanan kesehatan; (2). Meningkatkan mutu dan kinerja tenaga kesehatan dalam melaksanakan berbagai kegiatan layanan kesehatan.

Kegiatan pokok : (1). Mengumpulkan data tentang jenis dan jumlah tenaga kesehatan yang ada dan yang dibutuhkan; (2). Mengumpulkan data mutasi jenis tenaga kesehatan dan melakukan pengolahan dan analisis data serta penyajian informasi tenaga kesehatan; (3). Merencanakan kebutuhan berbagai jenis tenaga kesehatan baru sesuai kebutuhan dan melaksanakan pendidikan, pelatihan tenaga kesehatan; (4). Merencanakan peningkatan pendidikan formal dan berbagai jenis tenaga kesehatan dan merencanakan pelatihan berbagai jenis tenaga kesehatan yang ada serta pemberian bea siswa; (5). Menyelenggarakan kerja sama dan kemitraan dengan berbagai institusi pendidikan, organisasi profesi kesehatan dan LSM yang ada; (6). Mengatur penempatan jenis-jenis tenaga kesehatan strategis; (7). Merencanakan mutasi berbagai jenis tenaga kesehatan lintas kabupaten/kota sesuai dengan kebutuhan dan merencanakan pola pengembangan karier tenaga kesehatan.

Indikator keberhasilan terdiri dari : (1). Tersedianya data dan informasi tentang profil tenaga kesehatan; (2). Tersedianya tenaga dokter, para medis, bidan dan tenaga kesehatan terlatih sesuai kebutuhan; (3). Terwujudnya peningkatan mutu tenaga kesehatan dan mengurangi ketimpangan layanan kesehatan.

## **2. Program Peningkatan Mutu Layanan Kesehatan Masyarakat.**

Tujuan program ini adalah (1). Mengembangkan kemitraan kerja antara unit organisasi layanan pemerintah dan non pemerintah. (2). Meningkatkan mutu layanan kesehatan melalui bimbingan, penyuluhan dan pengendalian antara pemerintah dan masyarakat. (3). Meningkatkan pengawasan mutu lingkungan kesehatan. (4). Meningkatkan pengawasan air bersih, perumahan, bangunan sehat dan pembuangan limbah.

Kegiatan pokok program ini adalah (1) Untuk meningkatkan upaya pencegahan penyakit melalui tindakan imunisasi dan upaya pencegahan lainnya (2). Meningkatkan bimbingan dan pengendalian mutu layanan kesehatan; (3). Meningkatkan bimbingan, pengendalian dan pengawasan kualitas air, lingkungan, bahan-bahan konsumsi, peralatan dan obat terlarang lainnya; (4) Meningkatkan upaya penanggulangan masalah gizi masyarakat.

Indikator keberhasilan terdiri dari : (1). Menurunnya angka prevalensi dan insiden 10 penyakit utama; (2). Meningkatkan angka pemanfaatan fasilitas pelayanan kesehatan; (3). Terwujudnya lingkungan kesehatan masyarakat yang dapat mendorong peningkatan investasi pembangunan kesehatan, (4). Meningkatnya status gizi masyarakat.

## **3. Program Peningkatan Mutu Layanan Medik.**

Tujuan program ini adalah (1). Meningkatkan kinerja layanan medik pengobatan bagi masyarakat. (2). Meningkatkan mutu dan jumlah sarana dan prasarana layanan medik kesehatan bagi masyarakat.

Kegiatan pokok program ini adalah (1). Meningkatkan pola kemitraan bagi layanan medik perorangan, layanan dasar dan layanan rujukan; (2). Menyelenggarakan kemitraan layanan medik melalui penyedian obat, dan penyediaan alat kesehatan serta kedokteran; (3). Menyelegarkan kemitraan dalam layanan penunjang medik (laboratorium dan rontgen); (4). Melaksanakan bimbingan dan pengendalian mutu dan layanan medik penyakit menular baik perorangan, kelompok maupun lembaga; (5). Melaksanakan bimbingan dan pengendalian mutu layanan medik penyakit tidak menular, seperti : kecelakaan, degeneratif, dan kardiofaskuler; dan layanan medik rujukan; (6). Melaksanakan bimbingan dan pengendalian mutu standar dan perijinan layanan medik seperti : obat, alat kesehatan dan kedokteran; (7). Melaksanakan bimbingan dan pengendalian mutu penunjang pengobatan (laboratorium, radiologi).

Indikator keberhasilan terdiri dari : adalah (1). Meningkatnya kemitraan antara unit organisasi layanan pemerintah dan non pemerintah dalam meningkatkan kinerja layanan medik pengobatan bagi masyarakat; (2). Meningkatnya mutu dan jumlah sarana dan prasarana mutu layanan medik.

#### **4. Program Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) Kesehatan.**

Tujuan program ini adalah (1). Menyediakan dan mengembangkan sistem informasi tentang akibat bencana/KLB yang dapat menimbulkan masalah kesehatan; (2). Meningkatkan bimbingan dan pengendalian penanggulangan masalah kesehatan dalam berbagai bentuk layanan kesehatan darurat; (3). Meningkatkan

mutu pengorganisasian sumber daya dalam rangka penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana.

Kegiatan pokok program ini adalah (1). Mengumpulkan data dan mengolah data dan informasi tentang KLB yang mengancam kesehatan; (2). Meneliti faktor penyebab KLB dan membuat pemetaan daerah rawan bencana; (3). Mengumpulkan dan menganalisa data cakupan sarana air bersih di daerah rawan bencana; (4). Melaksanakan investigasi pencemaran dan keracunan untuk pengendalian dampak penting akibat bencana; (5). Menyelenggarakan bimbingan dan pengendalian dalam penanggulangan masalah kesehatan dan pemulihan keadaan (6). Menyelenggarakan administrasi SDM yang dipersiapkan untuk mobilisasi Penanggulangan Masalah Kesehatan (PMK), melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan PMK serta menyelenggarakan pelatihan tenaga PMKB.

Indikator keberhasilan terdiri dari : (1). Tersedianya data dan informasi tentang masalah kesehatan akibat bencana dan KLB; (2). Meningkatnya kesiapan dan kesiagaan penanggulangan masalah kesehatan baik teknis organisasi maupun pengelolaannya.

## **5. Program Penyuluhan Kesehatan dan Pengembangan Swadaya Masyarakat.**

Tujuan program ini adalah (1). Memberdayakan perorangan, kelompok dan masyarakat untuk memelihara, meningkatkan dan melindungi kesehatannya; (2). Meningkatkan pengetahuan, kemauan dan kemampuan serta mengembangkan iklim yang mendukung, yang dilaksanakan dari, oleh dan untuk masyarakat.

Kegiatan pokok program ini adalah (1). Menyebarluaskan informasi kesehatan melalui berbagai media massa; (2). Meningkatkan jaring kemitraan antara organisasi masyarakat dan dunia usaha dalam membudayakan PHBS; (3). Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam membudayakan PHBS; (4). Meningkatkan bimbingan dan penyuluhan tentang obat, makanan dan minuman, kosmetika, alat kesehatan, narkotika dan psikotropika serta bahan berbahaya dalam rangka perlindungan kepada masyarakat; (5). Mendorong pengembangan kebijakan pembangunan berwawasan kesehatan; (6). Mengembangkan profesionalisme dalam penyelenggaraan kegiatan Usaha Kesehatan Masyarakat (UKM).

o Indikator keberhasilan terdiri dari : (1). Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan profesional penyelenggaraan penyuluhan kesehatan masyarakat; (2). Meluasnya informasi kesehatan melalui berbagai media massa dan jalur informasi lainnya; (3). Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam mebudayakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

## **6. Program Peningkatan Mutu Perencanaan Dan Penganggaran Kesehatan.**

Tujuan program ini adalah (1). Menyediakan data dan informasi masalah kesehatan untuk mendukung perencanaan dan pembuatan kebijakan dalam mengelola berbagai program kesehatan; (2). Menyusun perencanaan berbagai program dan pembuatan kebijakan dalam mengelola berbagai program kesehatan; (3). Menyusun penganggaran berbagai program dalam mengelola berbagai program kesehatan.

Metodologi operasi pengelola kesehatan yang berkualitas.

Kegiatan pokok program ini adalah (1). Mengembangkan sistem pencatatan dan pelaporan; (2). Menyediakan data dan informasi tentang profil kesehatan tahunan. (3). Mengatur penyusunan rencana dan pembuatan kebijakan berbagai program kesehatan; (4). Menata kelembagaan dan ketatalaksanaan sumber daya pendukung untuk pelaksanaan berbagai program kesehatan; (5). Melakukan pengendalian, pemantauan terhadap berbagai program pembangunan kesehatan.

Indikator keberhasilan terdiri dari : Terwujudnya sistem perencanaan dan penganggaran pembangunan kesehatan berdasarkan data dan informasi yang akurat.

## **B. PROGRAM PENUNJANG**

### **1. TATA RUANG**

Tujuan program ini adalah Mengembangkan sistem penataan ruang

Kegiatan pokok program ini adalah (1) Meningkatkan kualitas rencana tata ruang dan kemampuan kelembagaan; (2) Meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang dan peran serta masyarakat; (3) Mensosialisasikan perangkat perundang-undangan; (4) Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang; (5) Membuat peta zonasi laut.

Indikator keberhasilan terdiri dari : (1). Tersedianya rencana tata ruang wilayah propinsi; (2). terselenggaranya pengaturan pemanfaatan tata ruang yang optimal dan berkualitas; (3). Terlaksananya pengendalian, pengawasan pemanfaatan tata ruang; (4) Tersedianya aparatur pengelola tata ruang yang berkualitas.

## **2. PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN SOSIAL**

### **2.1. Kependudukan**

#### **2.1.1. Program Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Keluarga.**

Tujuan program ini adalah Meningkatkan koordinasi pengelolaan administrasi kependudukan

Kegiatan pokok program ini adalah (1). Meningkatkan hubungan kerjasama antar instansi terkait dibidang kependudukan, (2). Menyediakan data dan informasi kependudukan.

Indikator keberhasilan: (1). Meningkatnya kemampuan lembaga/instansi terkait kependudukan; (2) Tersedianya data dan informasi administrasi kependudukan.

#### **2.1.2. Program Pengelolaan Administrasi Kependudukan**

Tujuan program ini adalah Meningkatkan pengelolaan administrasi kependudukan.

Kegiatan pokok program ini adalah 1) Mengkaji dan mengembangkan administrasi kependudukan; 2) Menyediakan data dan informasi kependudukan yang akurat; 3) Melakukan pendidikan dan pelatihan administrasi kependudukan; 4) Meningkatkan hubungan kerja sama antar instansi terkait dibidang kependudukan.

Indikator keberhasilan terdiri dari : 1) Meningkatnya pengembangan administrasi kependudukan yang berfungsi sebagai bank data kependudukan; 2) Meningkatnya kemampuan aparatur pengelola data kependudukan; 3) Meningkatnya kemampuan kelembagaan penyajian data dan informasi.

## 2.2. Pemuda dan Olah Raga.

### 2.2.1. Program Pembinaan dan Keserasian Kepemudaan

Tujuan program ini adalah Mewujudkan keserasian pembinaan pemuda di berbagai bidang pembangunan.

Kegiatan pokok program ini adalah (1) melakukan evaluasi pola pembinaan kepemudaan; (2) melakukan KIE dan advokasi kepemudaan; (3) mengintegrasikan pola pembinaan kepemudaan secara terpadu (4) melakukan intensifikasi kegiatan penelitian dan pengembangan masalah kepemudaan termasuk pemanfaatan dan pendayagunaan hasilnya.

Indikator keberhasilan terdiri dari : (1) Terwujudnya pola pembinaan kepemudaan yang serasi diberbagai bidang pembangunan; (2) Meningkatnya aktifitas pemuda sesuai profesi dan fungsinya dalam pembangunan.

### 2.2.2. Program Peningkatan Partisipasi Pemuda

Tujuan program ini adalah Memberi kesempatan yang lebih besar kepada pemuda guna memperkuat jati diri dan potensinya.

Kegiatan pokok ini adalah 1). Menumbuhkembangkan kewirausahaan generasi muda; 2). Memperluas kesempatan dalam berorganisasi dan berkreasi bagi pemuda secara bebas dan bertanggung jawab; 3) Meningkatkan apresiasi seni dan budaya daerah dan budaya bangsa dikalangan pemuda sebagai media persahabatan antar daerah dan antar negara; 4) Meningkatkan rasa kesetiakawanan dan kepedulian sosial di kalangan pemuda; 5) mencegah berbagai pengaruh negatif budaya asing di kalangan pemuda dalam rangka memperkuat ketahanan budaya nasional; 6) meningkatkan peran aktif pemuda dalam penanggulangan masalah

penyalahgunaan NAPZA, minuman keras, penyebaran penyakit HIV/AIDS, dan penyakit menular seksual dikalangan pemuda, 7) meningkatkan peran aktif pemuda dalam penanggulangan kriminalitas termasuk tawuran dikalangan pelajar dan pemuda,

Indikator keberhasilan terdiri dari : 1) meningkatnya partisipasi pemuda dalam berbagai bidang pembangunan; 2) terbentuknya regulasi dan suasana yang kondusif yang menjamin kebebasan pemuda untuk mengorganisasikan dirinya secara bertanggung jawab, 3) meningkatnya jumlah wirausahawan muda, 4) menurunnya jumlah kasus dan penyalahgunaan narkoba oleh pemuda serta meningkatnya peran dan partisipasi pemuda dalam pencegahan dan penanggulangan narkoba, 5) menurunnya angka kriminalitas yang dilakukan pemuda.

### **2.2.3. Program Pengembangan dan Pembinaan Keserasian Olaraga**

Tujuan program ini adalah 1) mewujudkan keserasian pembinaan olahraga diberbagai bidang pembangunan; 2) Mewujudkan paradigma sehat melalui peningakatan jasmani masyarakat.

Kegiatan pokok program ini adalah : 1) Melakukan evaluasi pola pembinaan keolahragaan; 2) Mengembangkan olah raga usia dini; 3) Mengembangkan pendidikan jasmani di sekolah dan perguruan tinggi; 4) Mengembangkan pendidikan jasmani di tempat kerja; 5). Melakukan identifikasi bakat dan potensi keolahragaan; 6) melakukan pembinaan dan pembibitan olahragawan berbakat berdasarkan cabang olahraga prioritas; 7) melakukan pendidikan, pelatihan dan pemagangan bagi pelatih dan wasit; 8) menyelenggarakan kompetisi olahraga pelajar, mahasiswa dan masyarakat; 9) memberikan

penghargaan bagi insan olahraga yang berdedikasi dan prestasi; 10) Melakukan pembinaan organisasi olahraga termasuk sanggar-sanggar senam; 11) Melakukan pembinaan cabang olahraga prioritas;

Indikator keberhasilan terdiri dari : 1) Terwujudnya pola pembinaan dan pengembangan keolahragaan; 2). meningkatnya kesegaran jasmani masyarakat; 3). meningkatnya perkembangan olah raga masyarakat, khususnya bagi penyandang cacat, lanjut usia dan olah raga tradisionil; 4). meningkatnya jumlah dan bibit olah ragawan berbakat; 5). meningkatnya prestasi oleh ragawan di tingkat daerah, nasional dan internasional.

### 2.3. Kebudayaan/Kesenian

Tujuan Program ini adalah Menumbuh kembangkan nilai-nilai luhur budaya daerah/ budaya lokal yang merupakan bagian tak terpisahkan dari budaya bangsa.

Kegiatan pokok program ini adalah 1) meningkatkan pelestarian, pengembangan dan pemanfaatan tradisi dan peninggalan sejarah; 2) menciptakan ilkim yang kondusif bagi timbulnya kreasi sastra, seni, dan budaya, 3) membina dan mengembangkan kesenian tradisional; 4) meningkatkan jumlah sanggar seni budaya; 5).Meningkatkan peran permuseuman sebagai wadah dokumentasi warisan seni budaya lokal.

Indikator keberhasilan terdiri dari : 1) berkembangnya sistem nilai budaya lokal/ daerah yang diperkaya oleh budaya baru yang serasi, serta tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama; 2) terwujudnya pemahaman dan apresiasi masyarakat pada budaya-budaya lokal; 3) berkembangnya kebebasan berkreasi dalam berkesenian, 4) meningkatnya jumlah sanggar-sanggar seni daerah;

5) terdokumentasinya warisan budaya dan kesenian daerah/lokal.

#### **2.4. Pemberdayaan Perempuan, Kesetaraan dan Keadilan Jender (KKJ).**

Tujuan program ini adalah 1) Meningkatkan kedudukan dan peranan perempuan dalam berbagai bidang pembangunan, 2) Memperjuangkan KKJ serta kemitrasejajaran antara laki-laki dan perempuan, 3) Meningkatkan kualitas peran dan kemandirian organisasi perempuan, 4). Memberikan kesempatan yang sama kepada kaum perempuan untuk ikut terlibat dalam proses pembangunan .

Kegiatan pokok program ini adalah 1) Menciptakan peraturan yang menunjang proses pemberdayaan perempuan; 2) Memperluas dan mengembangkan kesempatan kerja yang berbasis jender; 3). Meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja perempuan melalui pendidikan sekolah dan luar sekolah; 4). Meningkatkan perlindungan tenaga kerja perempuan; 5) mendorong terbentuknya lembaga perjuangan hak-hak perempuan; 6). Meningkatkan perlakuan yang adil terhadap perempuan dalam keluarga; 7). Membina nilai persatuan dan kesatuan serta nilai historis perjuangan perempuan.

Indikator keberhasilan terdiri dari : 1) Terselenggaranya pengarusutamaan jender pada semua bidang pembangunan, 2) menurunnya tindak kekerasan terhadap perempuan 3) meningkatnya kualitas hidup perempuan, 4). Meningkatnya penegakan hukum dan HAM atas setiap aksi kekerasan terhadap perempuan secara konsisten dan konsekuensi

## 2.5. Kesejahteraan Sosial

Tujuan program ini adalah membangun ketahanan sosial yang dapat menopang pemberdayaan terhadap penyandang masalah sosial/kemasyarakatan seperti korban bencana alam/KLB, pengungsian dan gejala malnutrisi serta menurunnya kualitas generasi muda, meningkatkan kepedulian terhadap penyandang masalah sosial/kemasyarakatan, fakir miskin, anak terlantar dan kenakalan remaja.

Kegiatan pokok program ini adalah 1). Meningkatkan upaya penanggulangan penyandang masalah sosial; 2) Meningkatkan kemampuan kelembagaan pelayanan masalah-masalah sosial; 3). Meningkatkan peran serta dunia usaha dalam penanggulangan masalah sosial.

Indikator keberhasilan terdiri dari : 1). Terbinanya kesejahteraan sosial; 2). Meningkatnya mutu pelayanan masalah-masalah sosial. 3) Terwujudnya pelayanan dan rehabilitasi sosial; 4). Meningkatnya peran serta dunia usaha dalam penanggulangan masalah sosial 5) Terkordinasinya upaya penanggulangan bencana alam.

## 2.6. Tenaga Kerja

Tujuan Program ini adalah (1). Mewujudkan iklim kerja yang menjamin perlindungan, keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan tenaga kerja; (2). Menciptakan kawasan transmigrasi sebagai pusat-pusat pertumbuhan yang layak huni, layak usaha dan layak lingkungan alam maupun sosial.

Kegiatan pokok program ini adalah (1). Menyempurnakan mekanisme pengadaan dan pengiriman tenaga kerja ke luar negeri; (2). Melakukan sosialisasi tentang peraturan perundang-undangan

ketenagakerjaan; (3). Meningkatkan perlindungan tenaga kerja wanita terutama melalui penyuluhan dan pelatihan agar tidak terjadi diskriminasi dan marjinalisasi; (4). Melakukan sosialisasi tentang tujuan transmigrasi; (5). Mengembangkan lokasi transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan sosial budaya;

Indikator keberhasilan terdiri dari : (1). Menurunnya tingkat pengangguran; (2). Terwujudnya suasana kerja yang menjamin keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan serta meningkatnya produktivitas tenaga kerja; (3). Terwujudnya pola pemukiman yang layak huni.

### **3. PEMBANGUNAN HUKUM DAN HAM**

Tujuan program ini adalah : (1). Mewujudkan kepastian hukum dan menciptakan rasa keadilan dalam masyarakat, (2). Mewujudkan ketertiban, keamanan dalam masyarakat. (3). Mewujudkan hak-hak azasi manusia; (4). Meningkatnya Kesadaran Kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat dan bingkai NKRI ; (5). Terciptanya dukungan seluruh komponen masyarakat terhadap otonomi daerah; (6). Meningkatnya pelayanan prima kepada masyarakat.

Kegiatan pokok program ini adalah : (1) mengembangkan produk-produk hukum yang transparan dan responsif; (2) meningkatkan jumlah dan mutu aparat hukum; (3) meningkatkan kemampuan kelembagaan hukum; 4) pengembangan sarana dan prasarana hukum; (5) meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penegakan hukum; (6) meningkatkan perlindungan hukum dan HAM; 7) sosialisasi produk-produk hukum dan meningkatkan kesadaran hukum dan HAM dalam masyarakat.

Indikator keberhasilan terdiri dari : (a). Terwujudnya rasa aman dan keadilan dalam masyarakat, (b). Terciptanya kondisi masyarakat yang tertib, teratur dan aman, (c). Terwujudnya penegakan aturan-aturan hukum yang menjamin penegakan hak-hak asasi manusia, (d). Terciptanya aparatur dan sistem hukum yang menjamin, (e). Mengembangkan produk hukum yang transparan dan responsif, (f). Terciptanya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN.

#### **4. POLITIK, PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH**

##### **4.1. Pembangunan Politik.**

Tujuan program ini adalah 1). Memantapkan pengembangan sistem politik secara demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 45 dalam wadah NKRI;

Kegiatan pokok program ini adalah 1). Meningkatkan pemanfaatan peran komunikasi dan informasi melalui media masa; 2). Menumbuhkembangkan budaya politik demokrasi dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat; 3). Meningkatkan komunikasi politik antara lembaga eksekutif, legislatif dan masyarakat dalam semangat kemitraan; 4). Menciptakan iklim yang kondusif bagi kemandirian parpol dalam semangat NKRI; 5). Mendukung sepenuhnya penyelenggraan Pemilu Tahun 2004.

Indikator keberhasilan terdiri dari : 1). Mantapnya eksistensi NKRI di wilayah Nusa Tenggara Timur; 2). Berkembangnya sistem komunikasi dan informasi melalui media masa; 3). Terwujudnya iklim yang kondusif bagi perkembangan Parpol di Daerah;

##### **4.2. Pembangunan Aparatur Pemerintah Daerah**

Tujuan Program ini adalah membentuk profil aparatur pemerintah daerah yang professional, bersih dan berwibawa dalam membangun

pemerintahan yang baik (*good governance*).

Kegiatan pokok program ini adalah (1) Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan tentang sistem manajemen pemerintahan; (2) Meningkatkan pembinaan mental dan keimanan; (3) Memperluas kesempatan studi lanjut bagi aparatur pemerintah; (4) Meningkatkan pelatihan teknis fungsional dan struktural; (5) Meningkatkan penyediaan sarana dan fasilitas kerja.

Indikator keberhasilan terdiri dari : (1) Meningkatnya kemampuan dan keahlian serta ketrampilan manajerial; (2) Meningkatnya keimanan dan ketaqwaan (mental) aparatur; (3) Meningkatnya dedikasi dan loyalitas (disiplin) aparatur; (4) Meningkatnya kesejahteraan aparatur.

#### **4.3. Pembangunan Bidang Administrasi Publik**

Tujuan Program ini adalah 1). mewujudkan sistem administrasi publik yang efisien dan efektif dalam mendukung proses penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada publik.

Kegiatan pokok program ini adalah 1). Mengembangkan sistem informasi manajemen daerah yang mendukung aktivitas administrasi publik; 2) Menyediakan dan memelihara sarana dan prasarana penunjang teknologi informasi administrasi publik; 3). Meningkatkan tertib pengelolaan administrasi kepegawaian, baik tahap rekrutmen, penempatan, promosi, maupun purna tugas; 4). Meningkatkan Pengawasan dan pengendalian administrasi publik.

Indikator keberhasilan terdiri dari : (1) Terwujudnya sistem administrasi publik yang efisien dan efektif; (2) Terwujudnya pengembangan institusi administrasi publik; (3) Meningkatnya

kapasitas kerja administrasi publik; (4) Terlaksananya pengawasan dan pengendalian administrasi;

#### **4.4. Otonomi Daerah**

Tujuan Program ini adalah Meningkatkan kemandirian dalam pengelolaan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Kegiatan pokok ini adalah 1) Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang otonomi daerah dalam bingkai NKRI; 2) Meningkatkan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah; 3) Meningkatkan efisiensi pengelolaan anggaran; 4) Meningkatkan partisipasi lembaga swadaya masyarakat;

Indikator keberhasilan terdiri dari : (1) Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan daerah; (2) Meningkatnya kinerja lembaga eksekutif dan legislatif secara mandiri; (3) Ke Meningkatnya semangat kemitraan antara eksekutif dan legislatif; (4) Meningkatnya kesadaran kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat dalam bingkai NKRI; (5) Terciptanya dukungan seluruh komponen masyarakat terhadap otonomi daerah;

#### **4.5. Pembangunan Perdesaan**

Tujuan Program ini adalah (1). Meningkatkan kemandirian dan keswadayaan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan; 2). Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana pembangunan perdesaan.

Kegiatan Pokok program ini adalah (1).Penguatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat terdiri dari : Badan Perwakilan Desa (BPD),LKMD/LPM, Pemerintah Desa / Kelurahan, PKK,Revitalisasi Pos Yandu dan Dasa Wisma; (2).Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat terdiri dari : Pengembangan Pasar Desa, Pengembangan Usaha

Ekonomi Keluarga dan Kelompok Masyarakat, Pembangunan sarana dan prasarana penunjang pembangunan perdesaan, pemanfaatan sumber daya daratan, pesisir dan laut, pemasyarakatan dan pemanfaatan TTG; (3).Pemantapan sistim manajemen pembangunan desa/kelurahan yang meliputi : pendataan profil desa/kelurahan, penataan ruang perdesaan, perencanaan partisipasi masyarakat, musyawarah pembangunan desa/ kelurahan dan kecamatan, perlombaan desa, UDKP Model; (4).Mengurangi Peningkatan Pekerja Anak di Desa Tertinggal (P2ADT); (5). Melaksanakan program PMT-AS; (6). Pemanfaatan perpustakaan desa/kelurahan.

Indikator keberhasilan terdiri dari : (1). Terbentuknya BPD; (2).Berfungsinya Pemerintahan Desa / Kelurahan; (3).Berfungsinya LKMD/LPM, PKK, Posyandu dan Dasa Wisma; (4).Meningkatnya Kemampuan SDM masyarakat desa/kelurahan; (5). Meningkatnya sarana dan Prasarana pembangunan Perdesaan; (6). Mantapnya sistim Manajenem pembanguna desa / kelurahan.

#### **4.6. Pemberdayaan Masyarakat Miskin**

Tujuan Program ini adalah Mengentaskan kelompok masyarakat miskin.

Kegiatan Pokok program ini adalah 1). Menyediakan bantuan sosial dasar terutama pendidikan dan kesehatan; 2). Mengupayakan pelayanan bantuan paket ekonomi produktif; 3). Melaksanakan pendampingan kelompok masyarakat secara berkelanjutan; 4). Memberdayakan perempuan melalui penguatan ekonomi lokal; 5). Mendorong partisipasi dunia usaha dan lembaga kemasyarakatan dalam pengentasan kemiskinan.

Indikator keberhasilan terdiri dari : 1). Meningkatnya pendapatan penduduk miskin; 2). Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan masyarakat miskin; 3). Tersedianya fasilitas pendampingan bagi masyarakat miskin (Kader/fasilitator dan atau LSM).

#### **4.7. Pengembangan Wilayah**

Tujuan Program ini adalah 1). Memacu pertumbuhan daerah melalui percepatan pertumbuhan sosial ekonomi wilayah; 2). Mengurangi kesenjangan sosial ekonomi antar wilayah; 3). Meningkatkan kualitas sumber daya manusia; 4). Meningkatkan kemampuan kelembagaan pemerintah daerah dan masyarakat.

Kegiatan Pokok program ini adalah 1). Meningkatkan mutu aparatur pemerintah melalui pelatihan, pemagangan dan studi lanjut; 2). Melakukan penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat dan lembaga sosial lainnya dalam rangka pemantapan kerjasama kelompok serta kegiatan usaha sektor riil masyarakat; 3). Mengembangkan akses pasar dan pemantapan pasar lokal; 4). Mengamankan sumber air dan penyediaan air bersih; 5). Meningkatkan penggalangan kerjasama kemitraan Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, Negara Donor, Dunia Usaha dan masyarakat; 6). Melakukan pelatihan bagi masyarakat sesuai dengan basis usahanya dan potensi pengembangan wilayah; 7). Memantapkan penyusunan rencana pembangunan wilayah secara profesional; 8). Melakukan evaluasi kinerja pengelolaan kawasan pengembangan; 9). Menyusun data base kawasan pengembangan; 10). Melaksanakan sosialisasi tentang pengembangan wilayah sebagai model pendekatan pembangunan daerah.

Indikator keberhasilan terdiri dari : 1). Meningkatnya kapasitas daerah melalui koordinasi pengelolaan pembangunan; 2). Terwujudnya optimalisasi pemanfaatan sumber daya daerah berwawasan lingkungan; 3). Terwujudnya percepatan pertumbuhan sosial ekonomi daerah; 4). Mantapnya koordinasi pengelolaan kawasan prioritas yang meliputi kawasan khusus, kawasan kritis minus dan kawasan tertinggal.

## **5. PEMBANGUNAN AGAMA**

### **5.1. Program Pembinaan Kerukunan Hidup dan Peningkatan Pelayanan Kehidupan Bergama**

Tujuan Program ini adalah Merciptakan suasana kehidupan keagamaan di NTT yang kondusif melalui penataan sistem kelembagaan dan manajemen pelayanan keagamaan guna meningkatkan pendalaman, penghayatan dan pengamalan ajaran agama demi terlaksananya kerukunan hidup intern dan antar umat beragama.

Kegiatan pokok program ini adalah (1). Meningkatkan keimanan dan ketaqwaan umat beragama antara lain melalui perlombaan pembacaan Alkitab, paduan suara gerejawi (Pesparawi), Pelayanan Haji dan Umroh, MTQ, Utsawa dharma gita; (2). Meningkatkan peran forum komunikasi antara tokoh umat beragama; (3). Meningkatkan peran dunia usaha dan lembaga keagamaan dalam menata kehidupan lingkungan umat beragama.

Indikator keberhasilan terdiri dari : (1) meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama bagi individu, keluarga dan masyarakat; (2). Meningkatnya pelayanan dan kemudahan bagi umat beragama dalam melaksanakan ibadah; (3). meningkatnya

Partisipasi umat beragama dalam proses penyelenggaraan pembangunan manusia dan lingkungan fisik demi kesejahteraan umat manusia.

### **5.2. Program Pembinaan Pendidikan Agama**

Tujuan program ini adalah Meningkatkan kualitas pendidikan agama bagi siswa agar pemahaman, penghayatan dan pengamalan ajaran agama secara benar dan bertanggung jawab.

Kegiatan pokok ini adalah (1). meningkatkan jumlah dan mutu tenaga pengajar/guru pendidikan agama; (2). Melakukan sosialisasi tentang pentingnya pendidikan keagamaan di lingkungan keluarga.

Indikator keberhasilan terdiri dari : (1). meningkatnya kualitas pengajar ; (2). Meningkatnya etika dan moral bagi siswa.

### **5.3. Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama**

Tujuan program ini adalah menata sistem kelembagaan dan manajemen pelayanan serta terpenuhinya sarana dan prasarana keagamaan guna memberikan kemudahan bagi umat beragama dalam menjalankan ibadah.

Kegiatan pokok ini adalah 1) memberikan bantuan pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana peribadatan; 2) memberikan pelayanan kepada umat nasrani menjalankan kegiatan keagamaan antara lain Pesparawi dan siarah iman; 3) menyediakan sarana dan prasarana lembaga keagamaan; 4) meningkatkan pelayanan haji dan umroh, 5) Meningkatkan peran dunia usaha dalam kehidupan keagamaan.

Indikator keberhasilan terdiri dari : 1). meningkatnya pelayanan dan kemudahan bagi umat beragama dalam melaksanakan ibadah; 2) meningkatnya partisipasi umat dalam proses

penyelenggaraan kegiatan pelayanan kehidupan beragama.

#### **5.4. Program Pembinaan Kelembagaan Sosial Umat Beragama**

Tujuan Program ini adalah 1). Meningkatkan peran dan kemampuan lembaga-lembaga sosial umat beragama; 2). Meningkatkan partisipasi umat dalam pelaksanaan kegiatan sosial umat beragama.

Kegiatan pokok program ini adalah 1) Memberdayakan lembaga sosial umat beragama dalam rangka menciptakan kemandirian seperti Pemuda GMIT, GMKI, Pemuda Katholik, PMKRI, Peradah, Pemuda Mesjid, HMI dan lainnya; 2) memberikan bantuan sarana dan prasarana lembaga sosial keagamaan; 3) meningkatkan mutu SDM lembaga sosial umat beragama;

Indikator keberhasilan terdiri dari : 1). berfungsinya lembaga sosial umat beragama secara proposional dan bertanggugjawab. 2) terbinanya kemitraan dan kolaborasi yang harmonis antar lembaga sosial umat beragama.

#### **6. PEMBANGUNAN KEAMANAN, KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT**

Tujuan program ini adalah : 1) membangun sistim keamanan swakarsa yang berbasis masyarakat; 2) mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam kondisi aman dan tertib.

Kegiatan pokok program ini adalah : 1). Meningkatkan partisipasi dan peran seluruh komponen masyarakat dalam mewujudkan keamanan, ketenteraman dan ketertiban yang kondusif; 2) Mendorong dan mendukung terbangunnya sistim keamanan & ketertiban terutama di daerah perbatasan dengan Timor Timur dan kawasan lainnya; 3) Meningkatkan sarana dan prasarana keamanan

dan ketertiban baik didalam daerah maupun di kawasan perbatasan antara lain Timor Timur dan Australia; 4) meningkatkan mutu SDM dibidang, keamanan, ketenteraman dan ketertiban.

Indikator keberhasilan terdiri dari : 1) terwujudnya suasana rasa aman tenram dalam kehidupan masyarakat; 2) terbinanya kemitraan yang harmonis antara masyarakat dan aparat keamanan.

### **3. Kesiapan Media**

Indikator kesiapan

media meliputi :

a. Media dan penyiar

status mendukung

menyebarluaskan informasi

indikator kesiapan media

b. Sistem informasi

b. Dapat diakses seluruh

australia

c. Dapat dicapai, per-

lengkapi dengan mesin

d. Hasil diketahui

perluasan

e. Efek, waktu mendekat

dilanjutkan segera

## BAB V

# PENGUKURAN DAN EVALUASI KINERJA

### A. KERANGKA PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja digunakan untuk penilaian atas keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan, program dan kebijakan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah. Pengukuran kinerja mencakup penetapan indikator kinerja dan penetapan capaian indikator kinerja.

#### 1. Indikator Kerja

Indikator kinerja dapat dikelompokkan menjadi lima tolok ukur, yakni: masukan (*inputs*), keluaran (*output*), hasil (*outcome*), manfaat (*benefit*) dan dampak (*impact*). Penetapan kelima tolok ukur tersebut harus didasarkan pada perkiraan yang realistik dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Karena itu indikator kinerja hendaknya memenuhi persyaratan berikut ini:

- a. Spesifik dan jelas.
- b. Dapat diukur secara obyektif baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif
- c. Dapat dicapai, penting dan harus berguna untuk menunjukkan keberhasilan masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak.
- d. Harus fleksibel dan sentitif terhadap perubahan terhadap perubahan.
- e. Efektif, yaitu data/informasinya dapat dikumpulkan, diolah, dan dianalisis secara efisien dan ekonomis.

## 2. Capaian Kinerja

Penetapan capaian kinerja dimaksudkan untuk mengetahui dan menilai capaian indikator kinerja dari implementasi kegiatan, program dan kebijakan yang telah ditetapkan. Pengukuran terhadap capaian kinerja diperlihatkan dalam format berikut ini.

## FORMAT PENGUKURAN KINERJA

| No | Kebijakan | Program | Kegiatan | Indikator Kinerja | Satuan | Capaian Indikator Kinerja |             |             |       |       | Ket |
|----|-----------|---------|----------|-------------------|--------|---------------------------|-------------|-------------|-------|-------|-----|
|    |           |         |          |                   |        | Rencaaa                   | Reallisaasi | Capaian (%) | Bobot | Nilai |     |
| 1  | 2         | 3       | 4        | 5                 | 6      | 7                         | 8           | 9           | 10    | 11    | 12  |
|    |           |         |          | Masukan           |        |                           |             |             |       |       |     |
|    |           |         |          | Keluaran          |        |                           |             |             |       |       |     |
|    |           |         |          | Hasil             |        |                           |             |             |       |       |     |
|    |           |         |          | Manfaat           |        |                           |             |             |       |       |     |
|    |           |         |          | Dampak            |        |                           |             |             |       |       |     |
|    |           |         |          |                   |        |                           |             |             | X     | XX    | XXX |

### Legenda:

1. Hubungan antara Realisasi Indikator Kinerja (masukan, keluaran, hasil, manfaat, dampak) pada kolom (8) dengan Capaian Indikator Kinerja (CIK) pada kolom (9) dapat bersifat:

  - a. Positif; artinya semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian indikator kinerja yang semakin tinggi. Dalam hubungan ini, CIK dengan rumus sebagai berikut:

## Realisasi

- b. Negatif; artinya semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian indikator kinerja yang semakin rendah. Dalam hal ini CIK dihitung dengan rumus sebagai berikut:

(Rencana - (Realisasi – Rencana))

$$CIK = \frac{\text{Rencana} - \text{Realisas} - \text{Rencana}}{\text{Rencana}} \times 100\%; \quad (2)$$

2. Tanda (x) pada kolom (9) adalah rata-rata persentase CIK yang dihitung dengan rumus sebagai berikut:  $\frac{\sum CIK}{n} \times 100$

3. Tanda (xx) pada kolom (10) adalah jumlah bobot dari masing-masing indikator kinerja. Jumlah bobot = 1,00. Penentuan bobot pada masing-masing indikator kinerja ditentukan secara arbitrer dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Indikator yang menunjukkan hasil (*outcome*) atau manfaat (*benefit*) diberi bobot yang lebih tinggi daripada indikator masukan (*input*) atau keluaran (*output*).
  - b. Indikator yang erat kaitannya dengan tujuan dan sasaran serta kebijakan, program dan kegiatan diberi bobot yang lebih tinggi.
  - c. Indikator yang mempunyai keterkaitan dengan kebijakan yang lebih tinggi diberi bobot tinggi.
  - d. Indikator yang berkaitan dengan hal-hal yang dapat dikendalikan diberi bobot yang lebih tinggi dari indikator yang tidak dapat dikendalikan.

4. Nilai Indikator Kinerja (NIK) pada kolom (11) dihitung dengan rumus sebagai berikut:

NIK = CIK x Bobot; . . . . . (4)

5. Tanda (xxx) pada kolom (11) adalah total NIK yang merupakan penjumlahan dari NIK masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak.

## B. EVALUASI KINERJA

Evaluasi kinerja dimaksudkan untuk menghitung nilai capaian kinerja implementasi program dan kebijakan berdasarkan nilai capaian kinerja kegiatan pada setiap rumpun program dan kegiatan. Untuk itu, tahapan evaluasi kinerja dimulai dari menghitung nilai capaian kegiatan, nilai capaian program dan nilai capaian kebijakan.

## 1. Nilai Capaian Kegiatan (NCK)

Nilai Capaian Kegiatan (NCK) adalah penjumlahan nilai seluruh kegiatan (Kolom 7) dengan menggunakan format sebagai berikut.

## **FORMAT EVALUASI KINERJA KEGIATAN**

| No | Program | Kegiatan | Kelompok                        | Capaian   | Bobot | Nilai |
|----|---------|----------|---------------------------------|-----------|-------|-------|
|    |         |          | Indikator                       | Indikator |       |       |
| 1  | 2       | 3        | 4                               | 5         | 6     | 7     |
|    |         | (1)      | Masukan                         |           |       |       |
|    |         |          | Keluaran                        |           |       |       |
|    |         |          | Hasil                           |           |       |       |
|    |         |          | Manfaat                         |           |       |       |
|    |         |          | Dampak                          |           |       |       |
|    |         |          | Jumlah Nilai Capaian Kegiatan 1 |           |       |       |
|    |         | (2)      | Masukan                         |           |       |       |
|    |         |          | Keluaran                        |           |       |       |
|    |         |          | Hasil                           |           |       |       |
|    |         |          | Manfaat                         |           |       |       |
|    |         |          | Dampak                          |           |       |       |
|    |         |          | Jumlah Nilai Capaian Kegiatan 2 |           |       |       |

### Legenda:

- a. Kolom (5) diisi dengan cara memindahkan Nilai Capaian Indikator Kinerja pada kolom (11) format pengukuran kinerja kegiatan.
  - b. Kolom (6) pemberian bobot mengikuti pedoman pada kolom (10) format pengukuran kinerja kegiatan.
  - c. Nilai Capaian Kelompok Indikator Kinerja (NCKIK) pada kolom (7) dihitung dengan rumus sebagai berikut:

NCKIK = kolom 5 x kolom 6; . . . . . (5)

- d. Nilai Capaian Kegiatan (NCK) diperoleh dengan cara menjumlahkan seluruh NCKIK pada kolom (7).

## 2. Nilai Capaian Program (NCP)

Nilai Capaian Program (NCP) adalah penjumlahan nilai seluruh kegiatan (Kolom 7) dari masing-masing rumpun program dengan menggunakan format sebagai berikut.

## FORMAT EVALUASI KINERJA PROGRAM

### Legenda:

- a. Kolom (5) diisi dengan memindahkan Nilai Capaian Kelompok Indikator Kinerja (NCKIK) pada kolom (7) format evaluasi kinerja kegiatan.
  - b. Kolom (6) bobot kegiatan pada masintg-masing rumpun program diasumsikan sama besar (proporsional).
  - e. Nilai Capaian Akhir Kegiatan (NCAK) pada kolom (7) dihitung dengan rumus sebagai berikut:

NCAK = kolom 5 x kolom 6; . . . . . (6)

- f. Nilai Capaian Program (NCP) diperoleh dengan cara menjumlahkan seluruh NCAK pada kolom (7).

### 3. Nilai Capaian Kebijakan (NCKi)

Nilai Capaian Kebijakan (NCKi) adalah penjumlahan nilai seluruh program (Kolom 7) dari masing-masing rumpun kebijakan dengan menggunakan format sebagai berikut.

Skate: pennellae (var. sp. 1) (var. sp. 2) (var. sp. 3)

## FORMAT EVALUASI KEBIJAKAN

| Nomor                          | Kebijakan | Program | Nilai Capaian program | Bobot Program | Nilai Capaian Akhir Program |
|--------------------------------|-----------|---------|-----------------------|---------------|-----------------------------|
| 1                              | 2         | 3       | 4                     | 5             | 6                           |
|                                |           |         |                       |               |                             |
| JUMLAH NILAI CAPAIAN KEBIJAKAN |           |         |                       |               |                             |

### Legenda:

- a. Kolom (4) diisi dengan cara memindahkan nilai capaian program pada kolom (7) format evaluasi kinerja program.
- b. Kolom (5) bobot untuk program yang berasal dari rumpun program pokok lebih besar dari bobot program pada rumpun program penunjang dengan komposisi 0,60 untuk program pokok dan 0,40 untuk program penunjang.
- c. Kolom (6) Nilai Akhir Capaian Program dihitung dengan rumus:  

$$NACP = \text{kolom (4)} \times \text{kolom (5)}; \dots \dots \dots \dots \dots \dots \dots \quad (7)$$
- d. Nilai Capaian Kebijakan (NCKi) diperoleh dengan cara menjumlahkan seluruh NACP pada kolom (6).

## C. KESIMPULAN HASIL AKHIR KINERJA

Kesimpulan akhir kinerja adalah kerampatan empiris (generalisasi) dari hasil evaluasi kinerja kegiatan, program dan kebijakan yang menjelaskan derajat keefektifan strategi dan derajat pencapaian tujuan program pembangunan daerah. Kesimpulan akhir atas kerampatan empiris yang dimaksud dilakukan berdasarkan skala pengukuran kuantitatif dan kualitatif.

### 1. Skala Pengukuran Kuantitatif

Skala pengukuran kuantitatif dilakukan dengan menggunakan indeks statiftik deskriptif berupa mean (rata-rata) dan simpangan baku (standar deviasi), dengan kategori sebagai berikut:

- repit a. Mean + > 1 SD = Sangat Baik  
 anak b. Mean + 1 SD = Baik  
 dian c. Mean = Sedang  
 d. Mean - 1 SD = Kurang Baik  
 e. Mean - (> 1 SD) = Buruk

## 2. Skala Pengukuran Kualitatif

Skala pengukuran kualitatif adalah penentuan kategori tingkat keefektifan strategi dan tingkat pencapaian tujuan program pembangunan daerah cara mentransformasi nilai akhir capaian kebijakan ke dalam pengukuran ordinal sebagai berikut:

- baik a. Sangat Baik =  $\geq 80,00$   
 d. Baik =  $60,00 - 79,99$   
 c. Sedang =  $50,00 - 59,99$   
 d. Kurang Baik =  $40,00 - 49,99$   
 e. Buruk =  $< 40,00$

## D. ANALISIS PENCAPAIAN AKUNTABILITAS KINERJA

Analisis pencapaian akuntabilitas kinerja dilakukan dengan mengaraikan keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan, program dan kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi sebagai telah ditetapkan. Dalam analisis ini dijelaskan proses dan nuansa pencapaian sasaran dan tujuan secara efisien dan efektif sesuai dengan kebijakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Analisis ini dilakukan dengan menggunakan informasi atau data yang diperoleh secara lengkap dan rinci sebagaimana tergambar pada kelompok indikator kinerja (lihat format evaluasi kinerja kegiatan, program dan kebijakan). Selain itu dilakukan pula analisis terhadap komponen-komponen penting seperti analisis input – output, analisis

realisasi hasil dan manfaat, analisis dampak positif dan negatif dan analisis proses pencapaian indikator kinerja. Analisis yang dimaksud dilakukan dengan cara membandingkan indikator kinerja dan realisasi sebagai berikut:

- Perbandingan antara kinerja nyata dan kinerja yang direncanakan.
- Perbandingan antara kinerja nyata dengan tahun sebelumnya.

Selain itu, untuk mendapatkan kedalaman dan keluasan analisis, substansi analisis hendaknya menampilkan suatu penilaian kritis tentang ketepatan keterkaitan kegiatan, program dan kebijakan dengan visi dan misi pembangunan daerah sehingga diperoleh umpan balik untuk memantapkan kegiatan, program dan kebijakan yang telah ditetapkan. Dalam kaitan ini suatu ulasan tentang sejumlah kondisi dan variabel yang melatarbelakangi cakupan akuntabilitas kinerja perlu dilakukan sehingga diperoleh pemahaman yang jelas tentang penyebab kegagalan atau keberhasilan kegiatan, program dan kebijakan.

(UNIKL)

Menurut Siswonya, Pemerintah Daerah memerlukan penilaian dan kegiatan-kegiatan pokok pembangunan dalam bentuk yang dibuat oleh APBD Propinsi BKT dan Kementerian Keuangan Propinsi BKT Tahun 2002-2004 harus sejajar antara yang dimandatkan Daerah dengan menyusun Rencana Operasional (Ranop) dan/atau Rencana dengan demikian akan terjadi konsistensi dalam hal kegiatan pembangunan daerah.

Pemerintah Daerah merupakan lembaga Pemerintah Daerah yang bertujuan mencapai konsistensi antara Propinsi, Propeda, Kementerian dan Kepala daerah melalui proses perencanaan pengembangan dan pelaksanaan yang dilakukan dalam bentuk

## BAB VI

### menyeluruh, berlingkung **P E N U T U P**

#### Bab VI. Perencanaan Daerah

Naskah Rencana Strategis Pembangunan Daerah (Renstrada) Propinsi NTT Tahun 2002 - 2004 ini merupakan lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan menjadi satu kesatuan dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2002 Tanggal 25 Januari 2002 tentang Rencara Strategis Pembangunan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2002-2004.

Dalam pelaksanaannya Renstrada akan diuraikan lebih rinci dalam Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (Repetada) yang memuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang disusun berdasarkan pendekatan kinerja yang akan ditetapkan setiap tahunnya oleh Gubernur bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Menurut sifatnya, Renstrada hanya memuat program dan kegiatan-kegiatan pokok pembangunan daerah NTT yang dibiayai oleh APBD Propinsi NTT dan karena itu, Renstrada Propinsi NTT Tahun 2002-2004 harus menjadi acuan bagi dinas/instansi Daerah dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) dinas/instansinya, sehingga dengan demikian akan terjadi suatu koneksitas program dan kegiatan-kegiatan pokok pembangunan daerah.

Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat dan lembaga-lembaga Daerah bertanggungjawab untuk menjaga konsistensi antara Poldas, Propeda, Renstrada dan Repetada melalui proses perencanaan pembangunan dan anggaran setiap tahunnya. Demi terwujudnya

perencanaan pembangunan daerah yang lebih terintegrasi, menyeluruh, bertanggung-gugat dan terkendali pelaksanaannya, maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melakukan koordinasi perencanaan pembangunan, anggaran, serta pemantauan dan evaluasi kinerja. Disamping itu, diperlukan suatu komitmen yang tunggal untuk melaksanakan program, kegiatan pembangunan yang tertuang dalam Renstrada ini.

Demikianlah Renstrada ini disusun sebagai alat manajemen strategis Kepala Daerah dalam rangka mewujudkan visi dan misi serta tujuan pembangunan daerah secara effisien dan effektif. Sebagai alat manajemen strategis, keberhasilan implementasi Renstrada ini sangat ditentukan oleh pemahaman dan kreativitas pihak-pihak yang menggunakan Renstrada ini sebagai acuan untuk melaksanakan pembangunan di daerah NTT.

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**PIET ALEXANDER TALLO**

## ANALISIS SWOT

## LINGKUNGAN INTERNAL

| KEUATAN   | KELEMAHAN  |
|---|--|
| <p><b>1. LINGKUNGAN FISIK</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Wilayah lautan yang luas mengandung potensi ekonomi yang relatif besar.</li> <li>Luasan lahan yang belum dimanfaatkan relatif besar sangat potensil untuk pengembangan ternak dan tanaman perkebunan.</li> <li>Potensi tambang bahan mineral dan energi yang belum dieksplorasi dan dieksplorasi relatif besar.</li> <li>Tersedia cukup banyak obyek wisata yang dapat dikembangkan untuk menunjang perekonomian daerah.</li> <li>Letak geografis yang strategis sangat menguntungkan bagi perdagangan internasional.</li> <li>Iklim tropis yang dominan sangat menguntungkan bagi pengembangan pertanian, kehutanan, peternakan dan pariwisata.</li> </ul>  | <p><b>1. LINGKUNGAN FISIK</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tidak tersedia data yang cukup tentang potensi dan persebarannya menjadi kendala bagi investor.</li> <li>Kepemilikan lahan yang bersifat komunal sulit menjamin pengalihan kepemilikan lahan untuk kepentingan produktif.</li> <li>Tidak tersedia data potensi yang cukup dan adanya klaim kepemilikan adat terhadap lokasi tambang menyulitkan investor untuk melakukan penambangan atau kepentingan investasi lainnya.</li> <li>Promosi wisata dan sarana penunjang kepariwisataan belum menunjang, sehingga kurang menarik peminat dan investor.</li> <li>Sumberdaya ekonomi terfragmentasi dalam jumlah kecil pada rentang wilayah yang luas sehingga membutuhkan biaya pengumpulan yang tinggi.</li> <li>Rawan bencana, kekeringan dan ancaman hama.</li> <li>curah hujan yang rendah dan tidak merata.</li> <li>Topografi tanah yang rentan erosi.</li> </ul> |
| <p><b>2. LINGKUNGAN SOSIAL</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Relasi-relasi sosial yang bersifat sentrifugal sangat mendukung terciptanya kekompakan, keakraban dan partisipasi sosial yang tinggi.</li> <li>Pola kekerabatan dan komunikasi sosial yang bercorak primer memungkinkan terciptanya kegotongroyongan dalam masyarakat</li> <li>Organisasi sosial yang bercorak primer memungkinkan komunikasi langsung yang menjamin keakraban dan saling pengertian yang tinggi.</li> <li>Hirarki sosial yang bersifat komando (paternalistik) menjamin terciptanya ketataan dan kepatuhan.</li> <li>Sistem sosial yang solid dapat menjamin pelestarian nilai-nilai sosial budaya dalam masyarakat.</li> <li>Keragaman budaya yang tinggi mengandung kearifan-kearifan lokal dan daya tarik bagi percepatan pembangunan.</li> </ul> | <p><b>2. LINGKUNGAN SOSIAL</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Relasi sosial yang sentrifugal sangat rentan konflik.</li> <li>Pola kekerabatan dan komunikasi sosial yang bercorak primer cenderung menutup diri terhadap lingkungan sekitar yang semakin terdiferensiasi.</li> <li>Struktur sosial yang bercorak paternalistik menghambat adopsi inovasi teknologi yang sulit berkembang, melemahkan kreativitas dan inisiatif serta melengkakan ketergantungan.</li> <li>Sistem sosial yang kukuh (rigid) cenderung membatasi masyarakat untuk mengakomodasi nilai-nilai baru yang berkembang.</li> <li>Keragaman budaya yang tinggi membutuhkan pola pendekatan kemasyarakatan yang beragam.</li> <li>Keterikatan yang kuat pada kearifan-kearifan lokal cenderung menciptakan resistensi terhadap perkembangan teknologi atau cara-cara baru yang lebih maju dan efisien.</li> </ul>  |

|  |  |
|--|--|
| <p><b>3. INFRASTRUKTUR PEMBANGUNAN</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Terdapat banyak infrastruktur fisik yang telah dibangun. Pemanfaatan yang optimal terhadap ragam infrastruktur fisik tersebut akan memperkuat dan meningkatkan kemampuan produktif masyarakat.</li> <li>• Adanya komitmen pemerintah yang tinggi dalam pembangunan infrastruktur sebagaimana terlihat dari semakin meningkatnya alokasi anggaran pembangunan infrastruktur fisik setiap tahunnya merupakan jaminan bagi peningkatan kemampuan produktif masyarakat.</li> </ul> | <p><b>3. INFRASTRUKTUR PEMBANGUNAN</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Persebaran infrastruktur yang dibangun kurang merata, sehingga masih banyak lapisan masyarakat yang belum terlayani dengan baik.</li> <li>• Banyak infrastruktur fisik yang kurang sesuai dengan kebutuhan masyarakat sehingga tidak dimanfaatkan secara optimal, bahkan sebagian telah rusak karena tidak dimanfaatkan.</li> <li>• Penempatan infrastruktur yang tidak sesuai sebagai akibat lemahnya perencanaan mengakibatkan banyak infrastruktur yang tidak produktif.</li> <li>• Kurang baiknya pengawasan dalam pembangunan infrastruktur mengakibatkan banyak infrastruktur yang dibangun dengan kualitas yang rendah.</li> <li>• Model pembangunan infrastruktur yang sentralistik mengakibatkan kurang berkembangnya partisipasi dan kesadaran masyarakat untuk pemeliharaan infrastruktur yang telah dibangun.</li> </ul> |
| <p><b>4. KETENAGAKERJAAN</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tenaga kerja produktif sangat dominan dalam struktur ketenagakerjaan di NTT.</li> <li>• Tingkat partisipasi tenaga kerja sangat tinggi, hal ini dapat dilihat dari angka pengangguran terbuka yang relatif rendah.</li> <li>• Konsentrasi tenaga kerja produktif pada sektor pertanian diperdesaan relatif besar, merupakan dukungan bagi pengembangan sektor pertanian.</li> </ul>  | <p><b>4. KETENAGAKERJAAN</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kualitas sumberdaya manusia (tenaga kerja) relatif rendah ditunjukkan dengan rata-rata pendidikan setingkat sekolah dasar.</li> <li>• Kemampuan serapan teknologi yang relatif rendah menjadikan sulitnya menggunakan input teknologi yang lebih baik dalam proses produksi.</li> <li>• Produktivitas dan daya beli per kapita relatif rendah.</li> <li>• Persebaran tenaga kerja belum terdiferensiasi pada sektor-sektor non pertanian menjadikan sektor pertanian menyerap tenaga kerja secara berlebihan sehingga produktivitasnya rendah.</li> </ul>  |
| <p><b>5. INSTITUSI SOSIAL</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah lembaga keagamaan yang banyak dan beragam memungkinkan proses pembinaan warga masyarakat dengan baik.</li> <li>• Jumlah lembaga pendidikan formal dan non formal yang semakin bertambah dan beragam memungkinkan proses alih teknologi dan pembinaan SDM dapat berkembang dengan baik.</li> <li>• Bertumbuhnya LSM yang menangani berbagai bidang pembangunan menjadi mitra pemerintah yang produktif dalam pembangunan.</li> </ul>  | <p><b>5. INSTITUSI SOSIAL</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lembaga-lembaga keagamaan kuarang dimanfaatkan dalam menunjang pelaksanaan pembangunan.</li> <li>• Fungsi sosial lembaga-lembaga keagamaan dalam mendorong percepatan pembangunan masyarakat masih sangat terbatas.</li> <li>• Jangkauan pelayanan lembaga-lembaga pendidikan formal dan non formal kurang optimal.</li> <li>• Kurang relevannya out put pendidikan formal dan non formal.</li> <li>• Ketergantungan pendanaan LSM terhadap pihak lain sangat tinggi.</li> </ul>  |

|   |   |
|---|---|
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Belum adanya pola kemitraan yang dapat melakukan pelayanan kemasyarakatan secara terpadu antara LSM dan Pemerintah.</li> </ul>   |
| <b>6. ATURAN-ATURAN HUKUM</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tersedia berbagai perangkat peraturan yang memungkinkan pemerintah daerah dapat mengelola pembangunannya secara mandiri dan bertanggungjawab.</li> <li>Tersedianya perangkat peraturan yang cukup untuk menjamin keterturan dan kelancaran pelaksanaan pembangunan.</li> <li>Tersedianya perangkat peraturan yang cukup untuk membatasi dan menindak praktik KKN.</li> </ul> | <b>6. ATURAN-ATURAN HUKUM</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Aturan-aturan hukum yang sudah ada kurang disosialisasikan dengan baik sehingga menimbulkan keragaman pemahaman dan kekeliruan dalam penerapannya.</li> <li>Aturan-aturan hukum yang sudah belum diimplementasi secara optimal sehingga dampaknya bagi keteraturan, kelancaran dan kepastian hukum belum optimal.</li> <li>Terdapat cukup banyak aturan-aturan hukum yang kurang konsisten dengan tata urutan peraturan perundang-undangan sehingga sulit mengimplementasikannya.</li> <li>Penerapan aturan-aturan hukum dalam rangka pemberantasan KKN belum dijalankan secara menyeluruh dan konsisten.</li> </ul> |

| LINGKUNGAN EKSTERNAL   |  |
|--|--|
| PELUANG  | ANCAMAN  |
| <p><b>1. POLITIK &amp; KEAMANAN DALAM NEGERI</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Politik dalam negeri yang semakin membaik akan memberi jaminan terhadap pelaksanaan pembangunan.</li> <li>Proses demokrasi yang semakin membaik akan memberi kontribusi bagi meningkatnya partisipasi masyarakat pelaksanaan pembangunan.</li> <li>Politik dalam negeri semakin membaik akan memberi jaminan terhadap masuknya investasi asing yang berguna bagi peningkatan aktivitas ekonomi di daerah.</li> <li>Perhatian pemerintah dan masyarakat yang tinggi untuk menciptakan situasi yang aman memberi peluang bagi masyarakat untuk mengembangkan berbagai kegiatan produktif secara bebas.</li> </ul> <p><b>2. PEREKONOMIAN DALAM NEGERI</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Perekonomian dalam negeri yang semakin membaik dapat mendorong peningkatan dan pertumbuhan ekonomi di daerah.</li> <li>Semakin meningkatnya transfer pemerintah pusat akan meningkatkan ketersediaan pendanaan pembangunan di daerah.</li> <li>Minat berinvestasi yang semakin meningkat secara nasional dapat mendorong peningkatan investasi di daerah.</li> <li>Perekonomian daerah yang semakin terintegrasi dengan perekonomian nasional dan internasional dapat mendorong pembangunan ekonomi di daerah.</li> <li>Eksansi lembaga-lembaga keuangan ke daerah dapat memberikan dukungan pendanaan pembangunan bagi daerah.</li> </ul> | <p><b>1. POLITIK &amp; KEAMANAN DALAM NEGERI</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Masih terbatasnya pemahaman masyarakat terhadap proses demokrasi mengakibatkan berbagai gejolak yang mengganggu kepentingan umum dan pembangunan.</li> <li>Komunikasi politik yang kurang terkoordinasi dan terarah dapat mengakibatkan kebingungan, saling curiga dan disharmoni di dalam masyarakat.</li> <li>Tindakan pengamanan yang tidak proporsional dapat mengakibatkan ketakutan dan ketidak ketentraman dalam masyarakat.</li> <li>Kurangnya kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam menciptakan keamanan, ketertiban dan ketentraman dapat menimbulkan berbagai kekacauan yang merugikan masyarakat dan pemerintah.</li> </ul> <p><b>2. PEREKONOMIAN DALAM NEGERI</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ketidaksiapan masyarakat dan pelaku ekonomi untuk meningkatkan daya saing dapat menghambat pertumbuhan ekonomi di daerah.</li> <li>Ketergantungan yang semakin besar terhadap transfer pemerintah pusat dapat mengurangi kreativitas dan kesungguhan pemerintah daerah dalam memperkuat basis keuangan daerahnnya.</li> <li>Meningkatnya investasi tanpa kesiapan masyarakat dan pelaku ekonomi di daerah mengakibatkan mengalirnya sumber daya ekonomi ke tempat lain.</li> <li>Gejolak –gejolak perekonomian pada tingkat nasional dan internasional dapat menghambat pertumbuhan ekonomi di daerah.</li> <li>Sektor rill yang tidak dikembangkan secara sungguh-sungguh di daerah mengakibatkan semakin dominannya pelaku ekonomi yang berasal dari luar daerah sehingga mendorong pelarian modal keluar daerah.</li> </ul> |
| <p><b>3. KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pemberian kewenangan pengelolaan pembangunan yang semakin besar kepada daerah akan mendorong keleluasan untuk merencanakan dan melaksanakan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.</li> <li>komitmen pemerintah untuk mendorong perkembangan UKM memberikan peluang bagi daerah untuk mendorong pembinaan UKM kearah yang lebih baik.</li> </ul>  | <p><b>3. KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kewenangan pengelolaan pembangunan yang semakin besar pada kabupaten/kota tanpa diikuti perubahan cara berpikir mengakibatkan semakin sulitnya koordinasi Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.</li> <li>Pembinaan UKM yang tidak berkelanjutan akan mengakibatkan pembinaan yang telah dilaksanakan dengan biaya besar menjadi mubasir.</li> </ul>  |

|  |   |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Komitmen pemerintah bagi pengembangan lembaga-lembaga keuangan mikro di perdesaan akan mendorong masuknya aliran modal ke perdesaan.</li> <li>Komitmen pemerintah untuk mempercepat pembangunan Kawasan Timur Indonesia melalui pengembangan kawasan-kawasan khusus akan mendorong percepatan pembangunan di daerah.</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatnya aliran modal ke perdesaan melalui lembaga keuangan mikro perdesaan tanpa diikuti dengan pendampingan yang intensif dapat mengakibatkan masyarakat terbebani hutang kepada lembaga-lembaga keuangan.</li> <li>Pengembangan kawasan khusus tanpa diikuti kemampuan perencanaan dan pengelolaan program secara baik akan membebani Pemerintah Daerah.</li> </ul>   |
| <p><b>4. KEMAJUAN IPTEK</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat mendorong berkembangnya pikiran-pikiran pengembangan yang makin beragam.</li> <li>Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat mendorong percepatan perkembangan masyarakat.</li> <li>Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi memberikan peluang bagi daerah dalam memanfaatkan potensi-potensi sumber daya secara effisien dan effektif.</li> </ul>   | <p><b>4. KEMAJUAN IPTEK</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Rendahnya kemampuan masyarakat dalam menyerap ilmu pengetahuan dan teknologi dapat menciptakan kesenjangan pada tingkat lokal, nasional dan internasional.</li> <li>Ketidakmampuan masyarakat untuk menyeleksi masuknya nilai-nilai baru dapat menimbulkan ekses-ekses yang negatif dalam masyarakat.</li> <li>Pemanfaatan sumber daya alam yang secara berlebihan dengan teknologi maju dapat mengakibatkan degradasi lingkungan.</li> </ul>  |
| <p><b>5. INTERNASIONAL</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Integrasi dan keterkaitan perekonomian yang semakin meluas akan menciptakan peluang bagi pengembangan potensi ekonomi daerah</li> <li>Semakin meningkatnya perhatian lembaga-lembaga internasional terhadap pembangunan daerah akan mendorong percepatan pembangunan di daerah</li> <li>Perhatian dunia internasional terhadap pelestarian lingkungan di negara-negara berkembang dapat mengurangi beban daerah terhadap penaganan lingkungan.</li> <li>Peningkatan permintaan terhadap komoditas pertanian dari wilayah tropis dapat mendorong peningkatan produksi komoditas pertanian di daerah.</li> <li>Kehadiran Negara baru Timor Lorosae yang berbatas langsung dengan Propinsi NTT dapat menciptakan peluang-peluang ekonomi melalui kerjasama perdagangan lintas batas.</li> </ul> | <p><b>5. INTERNASIONAL</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Gejolak moneter internasional secara langsung akan mempengaruhi perrekonomian daerah.</li> <li>Liberalisasi ekonomi dengan kompetisi yang semakin tinggi. Ketidaksiapan masyarakat dan pelaku ekonomi dalam berkompetisi akan mengancam pertumbuhan ekonomi di daerah.</li> <li>Kekurangsiapan pemerintah daerah untuk memanfaatkan bantuan internasional dapat menurunkan kredibilitas pemerintah dan masyarakat di daerah di mata lembaga-lembaga internasional.</li> <li>Pengembangan komoditas agrobisnis di daerah dalam skala kecil dapat menghambat daya saing komoditas pertanian di daerah.</li> <li>Meningkatnya arus transaksi lintas batas tanpa diikuti kesiapan pelaku ekonomi di daerah mengakibatkan keuntungan lebih banyak dinikmati pelaku ekonomi luar daerah.</li> <li>Peningkatan permintaan agregat dari Timor Lorosae harus diikuti dengan peningkatan kapasitas produksi di daerah. Ketidak seimbangan kapasitas produksi dengan permintaan mengakibatkan hilangnya keuntungan bagi pelaku ekonomi di daerah.</li> <li>Peningkatan transaksi ekonomi lintas batas tanpa diikuti regulasi secara proposisional akan mengakibatkan tumbuhnya perdagangan gelap yang merugikan perekonomian daerah</li> </ul> |

## RINGKASAN MATRIKS SWOT

|  |  |  |
|--|--|--|
| INTERNAL   | KEKUATAN (S)   | KELEMAHAN (W)  |
|  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lingkungan Fisik</li> <li>2. Lingkungan Sosial</li> <li>3. Infrastruktur Pembangunan</li> <li>4. Ketenagakerjaan</li> <li>5. Institusi Sosial</li> <li>6. Aturan-Aturan Hukum</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lingkungan Fisik</li> <li>2. Lingkungan Sosial</li> <li>3. Infrastruktur Pembangunan</li> <li>4. Ketenagakerjaan</li> <li>5. Institusi Sosial</li> <li>6. Aturan-Aturan Hukum</li> </ol> |
| PELUANG (O)  | STRATEGI S-O   | STRATEGI W-O   |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Politik dan keamanan Dalam Negeri</li> <li>2. Perekonomian Dalam Negeri</li> <li>3. Kebijakan Pembangunan Nasional</li> <li>4. Kemajuan IPTEK</li> <li>5. Internasional</li> </ol> | <b>AKSELERASI PERTUMBUHAN SOSIAL EKONOMI</b>   | <b>PEMERATAAN KEPEMILIKAN ASET PRODUKTIF</b>   |
| ANCAMAN (T)  | STRATEGI S-T   | STRATEGI W-T   |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Politik dan keamanan Dalam Negeri</li> <li>2. Perekonomian Dalam Negeri</li> <li>3. Kebijakan Pembangunan Nasional</li> <li>4. Kemajuan IPTEK</li> <li>5. Internasional</li> </ol> | <b>PENINGKATAN STABILITAS KEAMANAN</b>   | <b>PENINGKATAN PERTISIPASI MASYARAKAT</b>  |

- kemampuan produksi masyarakat  
 • Adanya komitmen pemimpin yang tulus dalam pengembangan infrastruktur. Sebagaimana itu merupakan jaminan bagi mewujudkan kemandirian produksi masyarakat.

**PERHITUNGAN SKOR ASPEK KEUATAN**

| NO | KEUATAN   | BOBOT | RATING        | SKOR          |
|----|---|-------|---------------|---------------|
| 1  | <b>LINGKUNGAN FISIK</b>   |       |               |               |
|    | • Wilayah lautan yang luas mengandung potensi ekonomi yang relatif besar.   | 16,67 | 3             | 50,01         |
|    | • Luasan lahan yang belum dimanfaatkan relatif besar sangat potensial untuk pengembangan ternak dan tanaman perkebunan.                                     | 16,67 | 2             | 33,34         |
|    | • Potensi tambang bahan mineral dan energi yang belum dieksplorasi dan dieksplorasi relatif besar.  | 16,67 | 1             | 16,67         |
|    | • Tersedia cukup banyak objek wisata yang dapat dikembangkan untuk menunjang perekonomian daerah.   | 16,67 | 3             | 50,01         |
|    | • Letak geografis yang strategis sangat menguntungkan bagi perdagangan internasional.   | 16,67 | 1             | 16,67         |
|    | • Iklim tropis yang dominan sangat menguntungkan bagi pengembangan pertanian, kehutanan, peternakan dan pariwisata.   | 16,67 | 2             | 33,34         |
|    |   |       | <b>Jumlah</b> | <b>200,04</b> |
| 2  | <b>LINGKUNGAN SOSIAL</b>  |       |               |               |
|    | • Relasi-relasi sosial yang bersifat sentrifugal sangat mendukung terciptanya kekompakkan, keakraban dan partisipasi sosial yang tinggi.                    | 16,67 | 2             | 33,34         |
|    | • Pola kekerabatan dan komunikasi sosial yang bercorak primer memungkinkan terciptanya kegotongroyongan dalam masyarakat                                    | 16,67 | 2             | 33,34         |
|    | • Organisasi sosial yang bercorak primer memungkinkan komunikasi langsung yang menjamin keakraban dan saling pengertian yang tinggi.                        | 16,67 | 2             | 33,34         |
|    | • Hirarki sosial yang bersifat komando (paternalistik) menjamin terciptanya ketataan dan kepatuhan.   | 16,67 | 2             | 33,34         |
|    | • Sistem sosial yang solid dapat menjamin pelestarian nilai-nilai sosial budaya dalam masyarakat.   | 16,67 | 2             | 33,34         |
|    | • Keragaman budaya yang tinggi mengandung kearifan-kearifan lokal dan daya tarik bagi percepatan pembangunan.   | 16,67 | 2             | 33,34         |
|    |   |       | <b>Jumlah</b> | <b>200,04</b> |
| 3  | <b>INFRASTRUKTUR PEMBANGUNAN</b>  |       |               |               |
|    | • Infrastruktur fisik yang telah dibangun merupakan kekuatan yang berguna bagi peningkatan kemampuan produktif masyarakat.                                  | 50,00 | 2             | 100,00        |
|    | • Adanya komitmen pemerintah yang tinggi dalam pembangunan infrastruktur setiap tahunnya merupakan jaminan bagi peningkatan kemampuan produktif masyarakat. | 50,00 | 3             | 150,00        |
|    |   |       | <b>Jumlah</b> | <b>250,00</b> |

|                       |   |       |                 |        |  |
|-----------------------|---|-------|-----------------|--------|--|
| 4                     | <b>KETENAGAKERJAAN</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tenaga kerja produktif sangat dominan dalam struktur ketenagakerjaan di NTT.</li> <li>• Tingkat partisipasi tenaga kerja sangat tinggi, hal ini dapat dilihat dari angka pengangguran terbuka yang relatif rendah.</li> <li>• Konsentrasi tenaga kerja produktif pada sektor pertanian diperdesaan relatif besar, merupakan dukungan bagi pengembangan sektor pertanian.</li> </ul>   | 33,33 | 3               | 100,00 |  |
|                       |   | 33,33 | 3               | 100,00 |  |
|                       |   | 33,33 | 3               | 100,00 |  |
| 5                     | <b>INSTITUSI SOSIAL</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah lembaga keagamaan yang banyak dan beragam memungkinkan proses pembinaan warga masyarakat dengan baik.</li> <li>• Jumlah lembaga pendidikan formal dan non formal yang semakin bertambah dan beragam memungkinkan proses alih teknologi dan pembinaan SDM dapat berkembang dengan baik.</li> <li>• Bertumbuhnya LSM yang menangani berbagai bidang pembangunan menjadi mitra pemerintah yang produktif dalam pembangunan.</li> </ul> | 33,33 | 3               | 100,00 |  |
|                       |   | 33,33 | 2               | 66,66  |  |
|                       |   | 33,33 | 2               | 66,66  |  |
| 6                     | <b>ATURAN-ATURAN HUKUM</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tersedia berbagai perangkat peraturan yang memungkinkan pemerintah daerah dapat mengelola pembangunannya secara mandiri dan bertanggungjawab.</li> <li>• Tersedianya perangkat peraturan yang cukup untuk menjamin keterturan dan kelancaran pelaksanaan pembangunan.</li> <li>• Tersedianya perangkat peraturan yang cukup untuk membatasi dan menindak praktik KKN.</li> </ul>  | 33,33 | 3               | 100,00 |  |
|                       |   | 33,33 | 2               | 66,66  |  |
|                       |   | 33,33 | 2               | 66,66  |  |
| <b>Jumlah</b>         |   |       | <b>233,32</b>   |        |  |
| <b>Jumlah 1 s/d 6</b> |   |       | <b>1.416,72</b> |        |  |

## PERHITUNGAN SKOR ASPEK KELEMAHAN

| NO            | KELEMAHAN   | BOBOT | RATING | SKOR          |
|---------------|---|-------|--------|---------------|
| 1             | <b>LINGKUNGAN FISIK</b>   |       |        |               |
|               | • Tidak tersedia data yang cukup tentang potensi dan persebarannya menjadi kendala bagi investor.   | 12,50 | 3      | 37,50         |
|               | • Kepemilikan lahan yang bersifat komunal sulit menjamin pengalihan kepemilikan lahan untuk kepentingan produktif.  | 12,50 | 3      | 37,50         |
|               | • Tidak tersedia data potensi yang cukup dan adanya klaim kepemilikan adat terhadap lokasi tambang menyulitkan investor untuk melakukan penambangan atau kepentingan investasi lainnya. | 12,50 | 3      | 37,50         |
|               | • Promosi wisata dan sarana penunjang kepariwisataan belum menunjang, sehingga kurang menarik peminat dan investor.   | 12,50 | 2      | 25,00         |
|               | • Sumberdaya ekonomi terfragmentasi dalam jumlah kecil pada rentang wilayah yang luas sehingga membutuhkan biaya pengumpulan yang tinggi.   | 12,50 | 2      | 25,00         |
|               | • Rawan bencana, kekeringan dan ancaman hama.   | 12,50 | 2      | 25,00         |
|               | • curah hujan yang rendah dan tidak merata.   | 12,50 | 2      | 25,00         |
|               | • Topografi tanah yang rentan erosi.  | 12,50 | 2      | 25,00         |
| <b>Jumlah</b> |   |       |        | <b>237,50</b> |

|   |   |       |               |               |  |
|---|---|-------|---------------|---------------|--|
| 2 | <b>LINGKUNGAN SOSIAL</b>  |       |               |               |  |
|   | • Relasi sosial yang sentrifugal sangat rentan konflik.   | 16,67 | 3             | 50,01         |  |
|   | • Pola kekerabatan dan komunikasi sosial yang bercorak primer cenderung menutup diri terhadap lingkungan sekitar yang semakin terdiferensiasi.                                    | 16,67 | 2             | 33,34         |  |
|   | • Struktur sosial yang bercorak paternalistik menghambat adopsi inovasi teknologi yang sulit berkembang, melemahkan kreativitas dan inisiatif serta melenggakkan ketergantungan.  | 16,67 | 3             | 50,01         |  |
|   | • Sistem sosial yang kukuh (rigid) cenderung membatasi masyarakat untuk mengakomodasi nilai-nilai baru yang berkembang.   | 16,67 | 2             | 33,34         |  |
|   | • Keragaman budaya yang tinggi membutuhkan pola pendekatan kemasyarakatan yang beragam.   | 16,67 | 2             | 33,34         |  |
|   | • Keterikatan yang kuat pada kearifan-kearifan lokal cenderung menciptakan resistensi terhadap perkembangan teknologi atau cara-cara baru yang lebih maju dan efisien.            | 16,67 | 2             | 33,34         |  |
|   |   |       | <b>Jumlah</b> | <b>233,38</b> |  |
| 3 | <b>INFRASTRUKTUR PEMBANGUNAN</b>  |       |               |               |  |
|   | • Persebaran infrastruktur yang dibangun kurang merata, sehingga masih banyak lapisan masyarakat yang belum terlayani dengan baik.  | 20,00 | 2             | 40,00         |  |
|   | • Banyak infrastruktur fisik yang kurang sesuai dengan kebutuhan masyarakat sehingga tidak dimanfaatkan secara optimal, bahkan sebagian telah rusak karena tidak dimanfaatkan.    | 20,00 | 3             | 60,00         |  |
|   | • Penempatan infrastruktur yang tidak sesuai sebagai akibat lernahnya perencanaan mengakibatkan banyak infrastruktur yang tidak produktif.  | 20,00 | 3             | 60,00         |  |
|   | • Kurang baiknya pengawasan dalam pembangunan infrastruktur mengakibatkan banyak infrastruktur yang dibangun dengan kualitas yang rendah.   | 20,00 | 3             | 60,00         |  |
|   | • Model pembangunan infrastruktur yang sentralistik mengakibatkan kurang berkembangnya partisipasi dan kesadaran masyarakat untuk pereniharaan infrastruktur yang telah dibangun. | 20,00 | 2             | 40,00         |  |
|   |   |       | <b>Jumlah</b> | <b>260,00</b> |  |

|   |  |               |   |               |
|---|--|---------------|---|---------------|
| 4 | <b>KETENAGAKERJAAN</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Kualitas sumberdaya manusia (tenaga kerja) relatif rendah ditunjukkan dengan rata-rata pendidikan setingkat sekolah dasar.</li><li>• Kemampuan serapan teknologi yang relatif rendah menjadikan sulitnya menggunakan input teknologi yang lebih baik dalam proses produksi.</li><li>• Produktivitas dan daya beli per kapita relatif rendah.</li><li>• Persebaran tenaga kerja belum terdiferensiasi pada sektor-sektor non pertanian menjadikan sektor pertanian menyerap tenaga kerja secara berlebihan sehingga produktivitasnya rendah.</li></ul>   | 25,00         | 3 | 75,00         |
|   |  | 25,00         | 2 | 50,00         |
|   |  | 25,00         | 3 | 75,00         |
|   |  | 25,00         | 3 | 75,00         |
|   |  | <b>Jumlah</b> |   | <b>275,00</b> |
| 5 | <b>INSTITUSI SOSIAL</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Lembaga-lembaga keagamaan kuarang dimanfaatkan dalam menunjang pelaksanaan pembangunan.</li><li>• Fungsi sosial lembaga-lembaga keagamaan dalam mendorong percepatan pembangunan masyarakat masih sangat terbatas.</li><li>• Jangkauan pelayanan lembaga-lembaga pendidikan formal dan non formal kurang optimal.</li><li>• Kurang relevannya output pendidikan formal dan non formal.</li><li>• Ketergantungan pendanaan LSM terhadap pihak lain sangat tinggi.</li><li>• Belum adanya pola kemitraan yang dapat melakukan pelayanan kemasyarakatan secara terpadu antara LSM dan Pemerintah.</li></ul> | 16,67         | 3 | 50,01         |
|   |  | 16,67         | 3 | 50,01         |
|   |  | 16,67         | 3 | 50,01         |
|   |  | 16,67         | 3 | 50,01         |
|   |  | 16,67         | 3 | 50,01         |
|   |  | 16,67         | 2 | 33,34         |
|   |  | <b>Jumlah</b> |   | <b>283,38</b> |

|   |  |       |   |       |                |
|---|--|-------|---|-------|----------------|
| 6 | <b>ATURAN-ATURAN HUKUM</b>   |       |   |       |                |
|   | • Aturan-aturan hukum yang sudah ada kurang disosialisasikan dengan baik sehingga menimbulkan keragaman pemahaman dan kekeliruan dalam penerapannya.     | 25,00 | 2 | 50,00 |                |
|   | • Aturan-aturan hukum yang sudah belum diimplementasi secara optimal sehingga dampaknya bagi keteraturan, kelancaran dan kepastian hukum belum optimal.  | 25,00 | 3 | 75,00 |                |
|   | • Terdapat cukup banyak aturan-aturan hukum yang kurang konsisten dengan tata urutan peraturan perundang-undangan sehingga sulit mengimplementasikannya. | 25,00 | 3 | 75,00 |                |
|   | • Penerapan aturan-aturan hukum dalam rangka pemberantasan KKN belum dijalankan secara menyeluruh dan konsisten.   | 25,00 | 3 | 75,00 |                |
|   |  |       |   |       | Jumlah         |
|   |  |       |   |       | 275,00         |
|   |  |       |   |       | Jumlah 1 s/d 6 |
|   |  |       |   |       | 1.             |

## PERHITUNGAN SKOR ASPEK PELUANG

| NO | ASPEK PELUANG   | BOBOT | RATING | SKOR                        |
|----|---|-------|--------|-----------------------------|
| 1  | <b>POLITIK &amp; KEAMANAN DALAM NEGERI</b><br>• Politik dalam negeri yang semakin membaik akan memberi jaminan terhadap pelaksanaan pembangunan.<br>• Proses demokrasi yang semakin membaik akan memberi konstribusi bagi meningkatnya partisipasi masyarakat pelaksanaan pembangunan.<br>• Politik dalam negeri semakin membaik akan memberi jaminan terhadap masuknya investasi asing yang berguna bagi peningkatan aktivitas ekonomi di daerah.<br>• Perhatian pemerintah dan masyarakat yang tinggi untuk menciptakan situasi yang aman memberi peluang bagi masyarakat untuk mengembangkan berbagai kegiatan produktif secara bebas.             | 25,00 | 2      | 50,00                       |
|    |   | 25,00 | 2      | 50,00                       |
|    |   | 25,00 | 2      | 50,00                       |
|    |   | 25,00 | 3      | 75,00                       |
|    |   |       |        | <b>Jumlah</b> <b>225,00</b> |
| 2  | <b>PEREKONOMIAN DALAM NEGERI</b><br>• Perekonomian dalam negeri yang semakin membaik dapat mendorong peningkatan dan pertumbuhan ekonomi di daerah.<br>• Semakin meningkatnya trasfer pemerintah pusat akan meningkatkan ketersediaan pendanaan pembangunan di daerah.<br>• Minat berinvestasi yang semakin meningkat secara nasional dapat mendorong peningkatan investasi di daerah.<br>• Perekonomian daerah yang semakin terintegrasi dengan perekonomian nasional dan internasional dapat mendorong pembangunan ekonomi di daerah.<br>• Ekspansi lembaga-lembaga keuangan ke daerah dapat memberikan dukungan pendanaan pembangunan bagi daerah. | 20,00 | 2      | 40,00                       |
|    |   | 20,00 | 3      | 60,00                       |
|    |   | 20,00 | 1      | 20,00                       |
|    |   | 20,00 | 2      | 40,00                       |
|    |   | 20,00 | 1      | 20,00                       |
|    |   |       |        | <b>Jumlah</b> <b>180,00</b> |

|   |  |       |               |               |
|---|--|-------|---------------|---------------|
| 3   | <b>KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL</b>  | 25,00 | 3             | 75,00         |
|   | • Pemberian kewenangan pengelolaan pembangunan yang semakin besar kepada daerah akan mendorong keleluasan untuk merencanakan dan melaksanakan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. |       |               |               |
|   | • Komitmen pemerintah untuk mendorong perkembangan UKM memberikan peluang bagi daerah untuk mendorong pembinaan UKM kearah yang lebih baik.  |       |               |               |
|   | • Komitmen pemerintah bagi pengembangan lembaga-lembaga keuangan mikro di perdesaan akan mendorong masuknya aliran modal ke perdesaan.   |       |               |               |
|   | • Komitmen pemerintah untuk mempercepat pembangunan Kawasan Timur Indonesia melalui pengembangan kawasan-kawasan khusus akan mendorong percepatan pembangunan di daerah.                           |       |               |               |
| <b>Jumlah</b>   |  |       |               | <b>225,00</b> |
| 4   | <b>KEMAJUAN IPTEK</b>  | 33,33 | 3             | 100,00        |
|   | • Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat mendorong berkembangnya pikiran-pikiran pengembangan yang makin beragam.   |       |               |               |
|   | • Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat mendorong percepatan perkembangan masyarakat.  |       |               |               |
| • Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi memberikan peluang bagi daerah dalam memanfaatkan potensi-potensi sumber daya secara effisien dan effektif. | <b>Jumlah</b>  |       | <b>300,00</b> |               |

|   |   |       |   |       |                         |
|---|---|-------|---|-------|-------------------------|
| 5 | <b>INTERNASIONAL</b>  |       |   |       |                         |
|   | • Integrasi dan keterkaitan perekonomian yang semakin meluas akan menciptakan peluang bagi pengembangan potensi ekonomi daerah  | 20,00 | 1 | 20,00 |                         |
|   | • Semakin meningkatnya perhatian lembaga-lembaga internasional terhadap pembangunan daerah akan mendorong percepatan pembangunan di daerah                              | 20,00 | 3 | 60,00 |                         |
|   | • Perhatian dunia internasional terhadap pelestarian lingkungan di negara-negara berkembang dapat mengurangi beban daerah terhadap penanganan lingkungan.               | 20,00 | 3 | 60,00 |                         |
|   | • Peningkatan permintaan terhadap komoditas pertanian dari wilayah tropis dapat mendorong peningkatan produksi komoditas pertanian di daerah.                           | 20,00 | 2 | 60,00 |                         |
|   | • Kehadiran Negara baru Tmor Lorosae yang berbatasan langsung dengan Propinsi NTT dapat menciptakan peluang-peluang ekonomi melalui kerjasama perdagangan lintas batas. | 20,00 | 2 | 40,00 |                         |
|   |   |       |   |       | Jumlah 275,00           |
|   |   |       |   |       | Jumlah 240,00           |
|   |   |       |   |       | Jumlah 1 s/d 5 1.170,00 |

- Untuk mengelakkan kerugian dan merugikan, maka perlu dilakukan berbagai tindakan dan upaya untuk menghindari kerugian dan merugikan. Berikut ini beberapa tindakan dan upaya yang dapat dilakukan:
- Keterpungkutan dengan jalinan bisnis dengan negara-negara tetangga, sehingga dapat meningkatkan kreativitas dan kesiapsiagaan dalam menghadapi perubahan situasi di daerah dalam rangka bisa tetap bertumbuh dan berkembang.
  - Meningkatnya investasi berupa modal dan teknologi dan pelaku ekonomi di daerah yang mengakibatkan mengalihnya pertumbuhan ekonomi ke tempat lain.
  - Gagalnya negara dalam mendukung pertumbuhan ekonomi di daerah.
  - Sektor pertanian dalam bentuk perkebunan dan perkebunan sertifikasi yang tidak dapat dijangkau oleh sebagian besar masyarakat, sehingga berakibat pada kurangnya pertumbuhan ekonomi di daerah.

## PERHITUNGAN SKOR ASPEK ANCAMAN

| NO | ASPEK ANCAMAN   | BOBOT | RATING        | SKOR          |
|----|---|-------|---------------|---------------|
| 1  | <b>POLITIK &amp; KEAMANAN DALAM NEGERI</b>  |       |               |               |
|    | • Masih terbatasnya pemahaman masyarakat terhadap proses demokrasi mengakibatkan berbagai gejolak yang mengganggu kepentingan umum dan pembangunan.   | 25,00 | 3             | 75,00         |
|    | • Komunikasi politik yang kurang terkoordinasi dan terarah dapat mengakibatkan kebingungan, saling curiga dan disharmoni di dalam masyarakat.   | 25,00 | 3             | 75,00         |
|    | • Tindakan pengamanan yang tidak proporsional dapat mengakibatkan ketakutan dan ketidak ketentraman dalam masyarakat.   | 25,00 | 3             | 75,00         |
|    | • Kurangnya kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam menciptakan keamanan, ketertiban dan ketentraman dapat menimbulkan berbagai kekacauan yang merugikan masyarakat dan pemerintah.               | 25,00 | 2             | 50,00         |
|    |   |       | <b>Jumlah</b> | <b>275,00</b> |
| 2  | <b>PEREKONOMIAN DALAM NEGERI</b>  |       |               |               |
|    | • Ketidaksiapan masyarakat dan pelaku ekonomi untuk meningkatkan daya saing dapat menghambat pertumbuhan ekonomi di daerah.   | 20,00 | 3             | 60,00         |
|    | • Ketergantungan yang semakin besar terhadap transfer pemerintah pusat dapat mengurangi kreativitas dan kesungguhan pemerintah daerah dalam memperkuat basis keuangan daerahnya.                      | 20,00 | 2             | 40,00         |
|    | • Meningkatnya investasi tanpa kesiapan masyarakat dan pelaku ekonomi di daerah mengakibatkan mengalirnya sumber daya ekonomi ke tempat lain.   | 20,00 | 3             | 60,00         |
|    | • Gejolak-gejolak perekonomian pada tingkat nasional dan internasional dapat menghambat pertumbuhan ekonomi di daerah.  | 20,00 | 3             | 60,00         |
|    | • Sektor rill yang tidak dikembangkan secara sungguh-sungguh di daerah mengakibatkan semakin dominannya pelaku ekonomi yang berasal dari luar daerah sehingga mendorong pelarian modal keluar daerah. | 20,00 | 3             | 60,00         |
|    |   |       | <b>Jumlah</b> | <b>280,00</b> |

|               |   |       |   |       |               |
|---------------|---|-------|---|-------|---------------|
| 3             | <b>KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL</b>   |       |   |       |               |
|               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kewenangan pengelolaan pembangunan yang semakin besar pada kabupaten/kota tanpa diikuti perubahan cara berpikir mengakibatkan semakin sulitnya koordinasi Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.</li> </ul>      | 25,00 | 2 | 50,00 |               |
|               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pembinaan UKM yang tidak berkelanjutan akan mengakibatkan pembinaan yang telah dilaksanakan dengan biaya besar menjadi mubasir.</li> </ul>   | 25,00 | 2 | 50,00 |               |
|               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatnya aliran modal ke perdesaan melalui lembagan keuangan mikro perdesaan tanpa diikuti dengan pendampingan yang intensif dapat mengakibatkan masyarakat terbebani hutang kepada lembaga-lembaga keuangan.</li> </ul> | 25,00 | 2 | 50,00 |               |
|               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pengembangan kawasan khusus tanpa diikuti kemampuan perencanaan dan pengelolaan program secara baik akan membebani Pemerintah Darah.</li> </ul>  | 25,00 | 3 | 75,00 |               |
| <b>Jumlah</b> |   |       |   |       | <b>225,00</b> |
| 4             | <b>KEMAJUAN IPTEK</b>   |       |   |       |               |
|               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Rendahnya kemampuan masyarakat dalam menyerap ilmu pengetahuan dan teknologi dapat menciptakan kesenjangan pada tingkat lokal, nasional dan internasional.</li> </ul>  | 33,33 | 2 | 66,66 |               |
|               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ketidakmampuan masyarakat untuk menyeleksi masuknya nilai-nilai baru dapat menimbulkan ekses-ekses yang negatif dalam masyarakat.</li> </ul>   | 33,33 | 2 | 66,66 |               |
|               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pemanfaatan sumber daya alam yang secara berlebihan dengan teknologi maju dapat mengakibatkan degradasi lingkungan.</li> </ul>   | 33,33 | 1 | 33,33 |               |
| <b>Jumlah</b> |   |       |   |       | <b>166,65</b> |

| <b>INTERNASIONAL</b> |  |                       |                 |       |  |
|----------------------|--|-----------------------|-----------------|-------|--|
| 5                    | • Gejolak moneter internasional secara langsung akan mempengaruhi perekonomian daerah.   | 14,29                 | 1               | 14,29 |  |
|                      | • Liberalisasi ekonomi dengan kompetisi yang semakin tinggi. Ketidaksiapan masyarakat dan pelaku ekonomi dalam berkompetisi akan mengancam pertumbuhan ekonomi di daerah.  | 14,29                 | 1               | 14,29 |  |
|                      | • Kekurangsiapan pemerintah daerah untuk memanfaatkan bantuan internasional dapat menurunkan kredibilitas pemerintah dan masyarakat di daerah di mata lembaga-lembaga internasional.   | 14,29                 | 2               | 28,58 |  |
|                      | • Pengembangan komoditas agrobisnis di daerah dalam skala kecil dapat menghambat daya saing komoditas pertanian di daerah.   | 14,29                 | 2               | 28,58 |  |
|                      | • Meningkatnya arus transaksi lintas batas tanpa diikuti kesiapan pelaku ekonomi di daerah mengakibatkan keuntungan lebih banyak dinikmati pelaku ekonomi luar daerah.   | 14,29                 | 2               | 28,58 |  |
|                      | • Peningkatan permintaan agregat dari Timor Lorosae harus diikuti dengan peningkatan kapasitas produksi di daerah. Ketidak seimbangan kapasitas produksi dengan permintaan mengakibatkan hilangnya keuntungan bagi pelaku ekonomi di daerah. | 14,29                 | 1               | 14,29 |  |
|                      | • Peningkalan transaksi ekonomi lintas batas tanpa diikuti regulasi secara proposisional akan mengakibatkan tumbuhnya perdagangan gelap yang merugikan perekonomian daerah   | 14,29                 | 2               | 28,58 |  |
|                      |  | <b>Jumlah</b>         | <b>155,19</b>   |       |  |
|                      |  | <b>Jumlah 1 s/d 5</b> | <b>1.101,84</b> |       |  |

**REKAPITULASI PERHITUNGAN SKOR**  
**KEKUATAN - KELEMAHAN**

| NO | ASPEK/VARIABEL            | KEKUATAN | KELEMAHAN |
|----|---------------------------|----------|-----------|
| 1  | Lingkungan Fisik          | 200,04   | 237,50    |
| 2  | Lingkungan Sosial         | 200,04   | 233,38    |
| 3  | Infrastruktur Pembangunan | 250,00   | 260,00    |
| 4  | Ketenagakerjaan           | 300,00   | 275,00    |
| 5  | Institusi Sosial          | 233,32   | 283,38    |
| 6  | Aturan-Aturan Hukum       | 233,32   | 275,00    |
|    | Jumlah                    | 1.416,72 | 1.564,28  |

**REKAPITULASI PERHITUNGAN SKOR**  
**PELUANG - ANCAMA**

| NO | ASPEK/VARIABEL                    | PELUANG  | ANCAMA   |
|----|-----------------------------------|----------|----------|
| 1  | Politik dan Keamanan Dalam Negeri | 225,00   | 275,00   |
| 2  | Perekonomian Dalam Negeri         | 180,00   | 280,00   |
| 3  | Kebijakan Pembangunan Nasional    | 225,00   | 225,00   |
| 4  | Kemajuan IPTEK                    | 300,00   | 166,65   |
| 5  | Internasional                     | 240,00   | 155,19   |
|    | Jumlah                            | 1.170,00 | 1.101,84 |

Perhitungan Koordinat Sumbu X dan Y:

$$X : \text{Kekuatan} - \text{Kelemahan} = 1.416,72 - 1.564,28 = -147,56$$

$$Y : \text{Peluang} - \text{Ancaman} = 1.170,00 - 1.101,84 = 68,16$$

## DIAGRAM SWOT

